

**RESISTENSI PETANI TERHADAP HEGEMONI KAPITALISME**

**Dakwah Pembebasan Sanggar Rojolele Terhadap Petani Muslim**

**Di Desa Delanggu Klaten**



Oleh:

Peneliti :

**KETUA**

<b>Nama</b>	:	<b>Dr. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag.</b>
<b>NIP</b>	:	<b>19690509 199403 1 002</b>
<b>ID Litapdimas</b>	:	<b>200905690304065</b>
<b>Prodi / Jurusan</b>	:	<b>Manajemen Dakwah</b>

**ANGGOTA**

<b>Nama</b>	:	<b>Ade Yuliar</b>
<b>NIP</b>	:	<b>19860721201801 1 002</b>
<b>ID Litapdimas</b>	:	<b>202107860203000</b>
<b>Prodi/Jurusan</b>	:	<b>Manajemen Dakwah</b>

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman Judul	
	Halaman Pengesahan	
	Kata Pengantar	
	DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A	Latar Belakang	4
B	Rumusan Masalah Penelitian	17
C	Tujuan Penelitian	17
D	Manfaat Penelitian	18
<b>BAB II</b>	<b>LITERATURE REVIEW</b>	<b>19</b>
A	Penelitian Terdahulu	19
B	Teori Konflik Karl Marx Sebagai Perspektif	23
C	Kapitalisme di Bidang Pertanian	28
D	Sejarah Beras Rojolele	32
E	Dakwah Pembebasan	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>39</b>
A	Jenis Penelitian dan Pendekatannya	39
B	Tempat dan Waktu	41
C	Jenis Data	42
D	Teknik Sampling	42
E	Sumber Data	42
F	Teknik Pengumpulan Data	43
G	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	43
H	Analisis Data	44
<b>BAB IV</b>	<b>PROFIL DESA DELANGGU DAN SANGGAR ROJOLELE</b>	<b>45</b>
A	Profil Desa Delanggu	45
	1. Demografi Kependudukan	45
	2. Sosial, Budaya dan Ekonomi	48
	3. Geografi dan Pertanian	57

B	Sanggar Rojolele	61
	1. Latar Belakang dan Sejarah	61
	2. Seni-Budaya Sebagai Pendekatan	65
	3. Idiologi, Visi, Misi dan Program	70
<b>BAB V</b>	<b>HEGEMONI KAPITALISME DAN RESISTENSI PETANI DELANGGU</b>	<b>90</b>
A	Hegemoni Kapitalisme di Desa Delanggu	90
	1. Kepemilikan Lahan	93
	2. Petani Penggarap dan Kemiskinan Struktural	98
	3. Degenerasi Petani	102
	4. Dominasi Pengusaha Besar	105
	5. Memanfaatkan Organisasi Komunitas Tani	107
	6. Strategi Senyap Industri Bibit Pupuk Obat	109
B	Resistensi Petani terhadap Kapitalisme	110
	1. Pemandirian Petani: Pengembangan Padi Rojo Lele dan Perlakuan Organik	111
	2. Pembebasan Petani dari Eksploitasi Membangun Pasar Sendiri	117
	3. Membangun Kesadaran Kelas Melalui Seni Budaya	123
	4. Menggalang Kesadaran dengan Jejaring	127
	5. Advokasi	135
C	Sanggar Rojolele dalam Pandangan Dakwah Pembebasan	141
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>147</b>
A	Simpulan	147
B	Saran	149



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas perkenan dan ridlo-Nya, penelitian kami yang berjudul; Resistensi Petani Terhadap Hegemoni Kapitalisme Dakwah Pembebasan Sanggar Rojolele Terhadap Petani Muslim Di Desa Delanggu Klaten, dapat kami selesaikan dengan baik.

Sesuai judulnya, penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan untuk melihat perjuangan Sanggar Rojolele, dalam mendampingi petani Desa Delanggu melawan hegemoni kapitalisme. Kelihatan ganjil memang, sebuah sanggar seni dan budaya tiba-tiba mendampingi petani melawan ideologi besar kapitalisme. Tetapi memang demikian yang terjadi. Sanggar Rojolele dengan segala eksistensinya sebagai sebuah sanggar seni-budaya, meluaskan cakupannya, melangkah fungsi dan perannya hingga seolah-olah keluar dari fitrahnya, dari fitrah budaya – ke lapangan pertanian. Namun tidak demikian juga, bukankah budaya memiliki cakrawala seluas kehidupan manusia itu sendiri..... dari budaya beragama, hingga politik, dari teknologi hingga seni, itu wilayah budaya. Jadi justru, Sanggar Rojolele mengingatkan kita semua bahwa budaya seharusnya menjadi induk dari semua pikiran, sikap dan perilaku kita termasuk pertanian.

Seni-budaya menghaluskan rasa manusia, sehingga lebih peka terhadap apapun yang ada dan tiada, yang mestinya ada mengapa tidak ada, yang mestinya tidak ada mengapa ada, yang mestinya ke utara mengapa ke selatan, yang mestinya lurus mengapa bengkok, dan seterusnya. Seni budaya memudahkan kita melihat sesuatu yang dari cara pandang lainya susah untuk melihatnya.

Sanggar Rojolele mendampingi petani Desa Delanggu dari keterancaman dan hegemoni ideologi besar kapitalisme. Keterancaman tersebut berakibat petani merana, seolah kehilangan induknya. Sanggar Rojolele mencoba membimbing petani Delanggu untuk melihat apa yang semestinya, apa yang seharusnya, daripada sekedar apa yang senyatanya. Sanggar Rojolele memberi harapan pada para petani,

bahwa kehidupan yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih menyejahterakan sesungguhnya sangat mungkin diraih. Tentu tidak akan pernah turun hujan emas dari langit. Semuanya perlu diperjuangkan.

Seperti sudah menjadi hukum alam bahwa perjuangan itu bukan pesta, yang warna-warni, penuh hingar bingar alunan musik, dan nyaman. Bukan, itu semua justru meninabobokkan, membuat lupa diri pada visi dan misi. Perjuangan ibarat berjalan di hutan belantara, yang jika tidak hati-hati, hewan berbisa nan galak siap memangsa. Perjuangan perlu stamina, selain kewaspadaan, dan strategi.

Begitulah yang dialami paraa aktivis sosial, seperti halnya aktivis Sanggar Rojolele. Ada saatnya harus berlumpur di tengah sawah bersama para petani. Ada saatnya harus memasuki gedung dewan untuk melobi, ke kampus untuk bermitra, dan kembali menggelar aneka seni menghibur dan mencerahkan semua orang. Dan ada saatnya harus bersimpuh menghadap ke hadirat Tuhan, Allah SWT. memohon perlindungan dan bimbingan-Nya.

Yang kuat nglakoni perjuangan adalah para Nabi dan syuhada (pahlawan). Mereka bukan hanya pandai bertutur ayat dan fatwa, melainkan juga mandi keringat, bahkan darah. Orang-orang lemah, kaum *mustadhafin*, anak-anak yatim, orang-orang miskin adalah teman dan pengikut setia mereka. Para petani kecil, buruh tani, para petani penggarap itulah bagian dari *mustadhafin* di masa kini. Seberapapun rajin mereka tetap saja mereka miskin. Pada saat panen, bukan mereka yang menikmati, tetapi para tengkulak, tuan tanah, pabrik-pabrik industri sarana pertanian. Petani hanya buruh tenaga. Hasilnya kadang hanya cukup untuk makan saja. Itu juga seadanya.

Begitulah, dakwah mesti digelar. Ceramah di mimbar, menulis berjilid-jilid buku, bukan satu-satunya bentuk dakwah. Dakwah harus juga mendengarkan, mendampingi, memotivasi, bahkan juga bergandeng tangan membersamai perjuangan mereka orang-orang pinggiran untuk hidup layak sebagaimana mestinya manusia. Begitulah sejarah perjuangan para Nabi dan para pahlawan

mengajarkan kita tentang dakwah. Sanggar Rojolele sedang berdakwah dengan caranya.

Namun demikian upaya maksimal yang kami lakukan untuk melaksanakan penelitian ini, tetap saja tampak berbagai kekuarangan di berbagai tempat. Untuk itu saran dan kritik dari para pembaca ditunggu untuk perbaikan laporan ini.

Dalam kesempatan ini, kami tidak lupa haturkan *matur nuwun* yang sebesar-besarnya kepada Yth. :

1. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
2. Kepala LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta, Dr. Zainul Abbas, M.Ag.

Atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim peneliti untuk melakukan tugas suci dan mulia ini.

3. Para informan, petani penggarap, Pak Kades. Dan Pak Camat Delanggu, petugas PPL, dan utamanyaa Mas Eksan, pendiri sekaligus ketua Sanggar Rojolele.
4. Para reviewer yang telah memberikan kritik dan saran perbaikan hasil penelitian ini.
5. Siapapun yang telah berkontribusi terhadap penelitian ini.

Kepada semuanya kami berdoa semoga Allah, Dzat Yang Maha Rahman dan Rahim melimpahkan pahala, barokah, rahmat, dan ridlo Nya kepada kita semua.

*Wallahu a'lam bish showab,*

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Surakarta, 4 November 2022

Agus Wahyu T - Ade Yuliar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

#### **Hegemoni Idiologi Kapitalisme**

Kapitalisme sebagai idiologi sosial ekonomi mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia. Hampir tidak ada satu negarapun dapat eksis tanpa mengadopsi sebagian ataupun secara keseluruhan idiologi ini. Bahkan negara-negara eks-komunisme--rival kapitalisme—seperti Federasi Rusia, Polandia, Hongaria, Ukraina, Lithuania, Kazakhstan, Armenia, Georgia, diam-diam mengakomodasi idiologi kapitalisme dalam sistim sosial ekonomi mereka. Sangat sedikit negara sosialis-komunis yang bertahan dengan idiologi sosialisme murni mereka(Siswanto et al., 2015).

Perkembangan sosial-ekonomi negara-negara penganut idiologi kapitalisme, seperti Amerika, Inggris, Kanada, menjadi salah satu factor penyebab pesatnya perkembangan kapitalisme sebagai idiologi besar dunia. Fenomena tersebut memberikan semacam harapan bagi negara lain khususnya negara yang sedang berkembang untuk menganut dan menerapkan kapitalisme sebagai idiologi sosial ekonomi mereka. Terlebih ketika Uni Soviet, negara terbesar yang merepresentasikan penganut idiologi sosialisme-komunis tumbang, maka negara-negara yang semula bersimpati pada sosialisme-komunis berpaling pada kapitalisme sebagai idiologi lawannya.

Perkembangan kapitalisme sebagai idiologi yang hegemonistik di dunia sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain selama ini. Dalam sejarahnya, dominasi manusia atas lainnya sudah terjadi sejak lima ratusan tahun yang lalu. Sejarah tersebut dapat dibagi menjadi tiga periode(Fakih, 2003). Pertama adalah era kolonialisme. Era ini dilatari oleh keterbatasan bahan baku industry yang dimiliki oleh negara-negara industri maju. Untuk menutupi keterbatasan tersebut mereka



berupaya mencari bahan baku ke negara-negara lain khususnya negara-negara yang masih terbelakang industrinya, melalui imperialisme (perdagangan) yang kemudian bertransformasi menjadi kolonialisme (penjajahan). Negara industri menjadi penjajah atas negara lainya. Era kolonialisme ini meninggalkan trauma mendalam bagi negara yang masih terbelakang pada saat itu, sebagaimana dialami oleh Indonesia. Indonesia mengalami masa kolonialisme dengan segala penderitaannya ini selama lebih dari 3,5 abad. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya dieksploitasi sedemikian rupa oleh negara-negara kolonial Eropa.

Kedua adalah era post kolonialisme atau developmentalisme. Era ini dimulai sejak kemerdekaan negara-negara terjajah dari kolonialisme. Namun, bukan berarti mereka bebas merdeka dalam arti yang sebenarnya. Yang terjadi adalah mereka memasuki era kolonialisme baru (*neo colonialism*). Era neo kolonialisme disebut juga dengan developmentalisme karena, negara yang baru merdeka tersebut selanjutnya menjadikan pembangunan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan inilah negara-negara yang baru merdeka memerlukan bantuan donor dari negara-negara maju.

Momentum besar yang menandai era developmentalisme adalah ketika negara-negara industri mengadakan pertemuan besar di Bretton Woods pada tahun 1944. Pertemuan tersebut melahirkan tiga organisasi internasional baru; IMF (*International Monetary Funds*) untuk mengatur sistim keuangan internasional; *World Bank*, untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di dunia ketiga; GATT (*General Agreement of Tarrif and Trade*), organisasi untuk mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Melalui ketiga organisasi tersebut negara-negara maju kembali melakukan penjajahan model baru terhadap negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru menjadikan pembangunan yang sesungguhnya adalah industrialisasi sebagai idiologi. Pemerintah Orde Baru saat itu menjadikan teori “pertumbuhan ekonomi” WW. Rostow sebagai rujukan

utamanya. Menurut Rostow, semua masyarakat pada dasarnya tradisional. Masyarakat tradisional dianggap sebagai masalah utama, sehingga harus diubah menjadi masyarakat modern. Developmentalisme yang sebenarnya industrialisasi adalah media yang harus digunakan untuk modernisasi masyarakat, yang dengannya peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan. Untuk melaksanakan pembangunan inilah Indonesia memerlukan donor bantuan keuangan dari negara-negara maju. Penanaman modal asing tidak terhindarkan. Dari sinilah neo kolonialisme mendapatkan pintu untuk masuk di Indonesia.

Ketiga, era globalisasi. Inti dari globalisasi adalah liberalisasi di segala bidang. Sekat-sekat negara yang membatasi hubungan antar warga negara menjadi hilang. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi menjadikan dunia seperti desa besar. Dalam sektor perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan internasional (WTO). Sementara WTO dikendalikan oleh negara-negara maju. Melalui tiga episode tersebut, kuku-kuku tajam kapitalisme mencengkeram hampir semua negara di dunia. Kapitalisme menjadi idiologi yang hegemonistic.

Sebagai akibatnya kapitalisme menjadi satu-satunya idiologi yang secara fungsional digunakan oleh mayoritas negara di dunia untuk melakukan pembangunan di wilayahnya. Pada saat yang demikian, terjadi apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai *the end of ideology*, berakhirnya sebuah ideology dunia. Dan kapitalisme liberal adalah ideology terakhir yang menjadi pemenang atas ideology dunia yang lain (Fukuyama, Francis; Hantington, 2005).

Sementara itu, idiologi-idiologi sosial ekonomi yang lain seperti komunisme dan Islam lebih menjadi idiologi sosial komunitas-komunitas sosial non negara, kecuali di beberapa negara seperti RRT, Vietnam, Korea Utara, Laos, Kuba, dan Transnistria, untuk sosialisme-komunis, serta Iran, Pakistan, Afghanistan, dan Muritania, untuk idiologi Islam. Islam hidup di berbagai negara, bahkan menjadi agama mayoritas penduduknya, tetapi tidak serta merta menjadi idiologi negara. Beberapa negara dengan penduduk muslim mayoritas, menganut idiologi kapitalis.

Seperti yang terjadi di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara legal formal sistem sosial ekonominya didasarkan pada Pancasila.

Sebagai ideologi terbesar dunia, pengaruh kapitalisme begitu massif terjadi di berbagai negara. Di dukung oleh sistem ekonomi global dunia yang kapitalistik, maka hampir tidak ada negara yang bisa terbebas dari pengaruh kapitalisme tersebut. Seperti yang terjadi di Indonesia, sekalipun secara legal formal kenegaraan sistem sosial ekonomi negara berdasarkan Pancasila, namun pada kenyataannya sistem sosial ekonomi yang berjalan secara empiris adalah sistem kapitalisme.

### **Kapitalisme di Indonesia**

Menurut Onghokham, perkembangan kapitalisme di Indonesia sebenarnya dimulai pada masa awal Orde Baru. Berbeda dengan Orde Lama yang lebih mengedepankan konsolidasi ideologis, Pemerintah Orde Baru lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Dominasi warna ideologi-politik Pemerintahan Orde Lama ini bisa dipahami, karena dalam kenyataannya kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari penjajah dengan cara damai, melainkan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan tersebut dari pemerintah kolonial(Onghokham, 1998).

Perjuangan panjang tersebut digerakkan oleh semangat cinta tanah air yang antara lain dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan sebagai pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup sebagai sumber motivasi perjuangan ini pada gilirannya nanti bertahan sebagai ideologi politik gerakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ideologi politik ini pulalah yang kemudian mewarnai dinamika politik kenegaraan pasca kemerdekaan. Karena itulah, selama masa Orde Lama warna ideologi-politik mendominasi agenda kenegaraan.

Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa kegiatan pemerintahan yang terlalu berorientasi pada ideologi politik telah menguras energi bangsa. Sebagai akibatnya kondisi sosial-politik kenegaraan menjadi tidak stabil. Akibatnya, pembangunan di bidang sosial-ekonomi sedikit terabaikan. Bertolak pada kritik terhadap strategi

politik Orde Lama tersebut, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk lebih mengedepankan pembangunan ekonomi negara (Onghokham, 1998).

Sisi krusial lain yang terjadi pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru adalah dalam hal arah pembangunan ekonominya. Berdasarkan konstitusi negara, Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat 33 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, arah pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama lebih bercorak sosialis. Idiologi sosialis diyakini lebih mengakomodasi kepentingan rakyat banyak. Atas dasar itulah, Orde Lama menolak modal asing atau kapitalisme global dalam pembangunan ekonominya. Idiologi sosialis menjadi lebih menarik di depan mata masyarakat Indonesia, karena idiologi sosialis menjanjikan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Namun yang terjadi dengan idiologi sosialis masyarakat Indonesia semakin miskin. Hal ini disebabkan nihilnya modal besar untuk investasi di bidang ekonomi. Alih-alih menyejahterakan, sosialis justru menghadirkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gejolak sosial-politik susah untuk dihindari oleh pemerintah Orde Lama.

Memperhatikan krisis sosial yang terjadi pada masa transisi, utamanya kemiskinan yang semakin akut, kondisi politik yang tidak stabil, maka untuk mengatasi itu semua pemerintahan Orde Baru menjadikan pembangunan sebagai idiologi negara. Pembangunan dipercaya sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sinilah developmentalisme, pembangunan sebagai idiologi dimulai. Developmentalisme memungkinkan datangnya modal asing ke Indonesia yang belum lama merdeka. Developmentalisme memberi peran besar para kapital besar asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan investasi tersebut, developmentalisme menjadi industrialisasi.

Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dengan pembangunan, maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Di sinilah kemudian Pemerintah Orde Baru mengakomodasi teori pertumbuhan (Growth Theory) W.W.Rostow.

Dengan dalih *trickle down effect*, efek menetes ke bawah, pemerintah Orde Baru gencar mengejar pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan berbagai kelonggaran kepada masyarakat pemodal besar dunia (kapitalist) untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Dengan berkembangnya bisnis para pemodal ini, maka kesempatan kerja akan terbuka lebar, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat terwujud. Inilah bentuk konkrit dari *trickle down effect* (Juliantara, 2020). Masyarakat bawah secara otomatis akan semakin sejahtera dengan adanya pertumbuhan ekonomi negara, yang dipelopori oleh perkembangan modal kaum kapital besar. Realitas ideal ini yang menjadi impian sekaligus harapan Pemerintah Orde Baru dengan developmentalisme mereka. Apa yang dilaksanakan Orde Baru ini sepenuhnya merujuk pada *Growth Theory* Rostow, sekaligus teori ekonomi *Trickle Down Effect* yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman yang dipopulerkan oleh Ronald Reagan Presiden AS ke-40 yang didukung oleh Partai Republik (Yazid, 2021).

Pada masa Orde Baru negara dikendalikan oleh kaum borjuis selaku pemilik modal (Oneal & Russett, 2016). Dari sinilah berbagai regulasi yang mendukung investasi dan industrialisasi dirumuskan dan diterapkan. Di bawah legitimasi regulasi-regulasi yang dibuat tersebut, kolaborasi dan kolusi antara pemerintah sebagai pembuka pintu dengan pengusaha-pengusaha besar lokal dan internasional tidak bisa dihindarkan, sehingga muncul istilah Adji Sumekto sebagai “koalisi kepentingan” (Samekto, FX, 2018). Untuk melanggengkan koalisi kepentingan inilah sumber daya alam, lingkungan hidup, bahkan rakyat sendiri dengan mudah dijadikan korban pembangunan.

Untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967 PMA). Dengan aturan perundang-undangan tersebut investor asing dapat

menggunakan sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia. Di samping itu, investor juga diijinkan menyewa ahli dari luar Indonesia. Bagian inti yang sangat krusial dari regulasi tersebut adalah investor asing diijinkan untuk mentransfer keuntungan mereka dari berinvestasi ke negara mereka kapan saja mereka mau. Melalui pintu regulasi inilah investor global berbondong-bondong masuk ke Indonesia(Poesoro, 2005). Terlepas dari manfaat yang diperoleh Indonesia pada saat itu, yang pasti kapitalisme mulai menguasai perekonomian Indonesia.

Ringkasnya, industrialisasi berkembang pesat selama Orde Baru. Pengusaha besar yang kebanyakan dari warga keturunan etnis China mendapatkan *privilege* dibanding yang lain. Demikian juga pemodal besar internasional. Dengan hak istimewa tersebut, banyak investor local dan global yang menanamkan modal mereka di sektor industri. Pengusaha global dengan mudahnya masuk ke Indonesia dengan MNC (*Multy Nastional Corporation*) serta TNC (*Trans National Corporation*) milik mereka(J. Heryanto, 2003).

Berinvestasi di Indonesia adalah sangat menarik bagi mereka. Selain karena akan mendapatkan perlakuan istimewa berupa kemudahan-kemudahan, bahan baku industry yang melimpah, tenaga kerja Indonesia yang sangat murah, mereka juga akan mendapatkan Marxet yang sangat menjanjikan. Jumlah penduduk Indonesia yang pada masa Orde Baru hampir mencapai 200 jutaan merupakan pasar potensial atas produk mereka.

Perkembangan berikutnya, kapitalisme masuk pada hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, hingga pertanian. Konglomerasi tumbuh subur di Indonesia. Semua kebutuhan hidup mulai dari yang sangat strategis, seperti pertambangan dan minyak, telekomunikasi, transportasi, hingga air minum menjadi lahan bisnis para pemodal besar baik lokal maupun global tersebut. Hampir semua kebutuhan domestik mulai dari tekstil hingga kebutuhan makan, minyak dan gula di kuasai mereka. Bahkan kebutuhan-kebutuhan kecil rumahan, seperti sabun mandi, pasta gigi, hingga alat-alat

kecantikan, dari proses produksinya hingga distribusi berbagai produk tersebut menjadi lahan bisnis kaum konglomerat.

Kembali pada *trickle down effect*, lain harapan lain pula kenyataannya. Pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat ternyata tidak diikuti dengan kesejahteraan yang semakin merata pada semua warga negara Indonesia. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Kesenjangan sosial begitu tajam telah menjadi pemandangan umum di Indonesia. Para pemodal berhasil mengembangkan modal mereka dengan jumlah kekayaan yang fantastik. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,34 juta orang bila dibandingkan dengan data pada September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang (Bapan Pusat Statistik, 2022).

Sekalipun mengalami penurunan, namun jumlah tersebut masih sangat tinggi. Belum lagi jika standar kemiskinannya dinaikkan tentu akan didapatkan angka di atas itu. Muktar Naim menggambarkan kesenjangan di Indonesia bersifat etnosentris (bias etnis), artinya kelompok minoritas (5%) yang kebanyakan non pribumi menguasai mayoritas asset kekayaan negara. Sementara itu 95% pewaris sah republik ini, yang tidak lain adalah warga pribumi hanya menguasai sedikit asset ekonomi negara (Naim, 2011). Majalah Tempo melaporkan angka ketimpangan sosial di Indonesia bahwa, 10% penduduk Indonesia menguasai 70% asset nasional. Sementara itu 90% keluarga lainnya hanya menguasai 30% asset (Widyatama, 2019).

### **Kapitalisme di Sektor Pertanian**

Bidang pertanian adalah sektor strategis, mengingat Indonesia adalah negara agraris. Sektor ini menampung tenaga kerja terbanyak dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2020, tidak kurang dari 29,8 % angkatan kerja kita berada di sektor pertanian ini. Salah dalam mengelola sektor ini bisa berakibat fatal bagi kehidupan kita sebagai bangsa (@widyamataram, 2021).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pada hakekatnya sistem ekonomi Indonesia dikuasai oleh kekuatan ekonomi kapitalis. Karakter ekonomi kapitalis selalu memihak pada pemilik modal, dan tidak akan pernah memihak pada kaum yang lemah, dalam hal ini masyarakat (petani). Petani merupakan sasaran empuk bagi pemilik modal untuk dieksploitasi. Hampir semua lini pertanian, mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan, hingga penjualan hasil pertanian telah dimonopoli oleh pemilik modal besar (kapitalis).

Kapitalisme mulai menguasai sektor pertanian sejak Pemerintah Orde Baru mencanangkan program revolusi hijau (*green revolution*) tepatnya pada saat dimulainya Pelita I tahun 1969 (Prabowo, 2020). Program tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk swasembada pangan. Swasembada pangan antara lain bisa diwujudkan dengan cara melakukan intensifikasi pertanian. Atas dasar itulah, pemerintah melakukan intensifikasi dalam segala aspek pertanian, mulai dari bibit, pupuk, obat, dan penggunaan mesin untuk mengolah lahan. Dalam hal benih digalakkan penggunaan benih fasilitas unggul (*hibrida*). Dalam hal pupuk dan obat digunakan pupuk dan obat *unorganic*. Pengolahan lahan digunakan mesin traktor dan seterusnya.

Tidak bisa dipungkiri, sebagai hasil intensifikasi pertanian tersebut adalah meningkatnya hasil pertanian. Bahkan karena proyek intensifikasi ini Indonesia pernah berhasil berswasembada beras pada tahun 1984, dengan produksi mencapai 25,8 juta ton (Rifki, 2021). Namun demikian, proyek intensifikasi tersebut berdampak membahayakan petani. Selain menjadikan petani tergantung pada industri pupuk, obat dan benih, proyek intensifikasi juga menjadi celah masuknya kekuatan ekonomi kapitalis di sektor pertanian.

Dalam hal penggunaan pupuk un organik dapat dijelaskan bahwa, penggunaan pupuk kimia un-organik memberikan manfaat bagi petani, seperti; menyuburkan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan lebih efisien dibanding dengan pupuk organik. Namun demikian, pupuk kimia juga membahayakan sector pertanian dalam jangka panjang. Penggunaan pupuk un-



organik yang terlalu banyak menyebabkan hilangnya porositas tanah. Hal ini berarti tanah menjadi sangat padat, sehingga air sulit masuk ke dalam tanah, demikian juga sirkulasi udara. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan (Utami, 2021). Untuk mempertahankan penggunaan tanah yang telah rusak tersebut, petani harus menggunakan pupuk kimia un-organic yang semakin banyak dari masa ke masa. Akibatnya sistem pertanian menjadi sangat tergantung pada penggunaan pupuk un-organik tersebut. Akibat yang serupa juga terjadi pada penggunaan obat maupun bibit oleh petani.

Dengan menggunakan bibit, pupuk, obat kimia buatan pabrik, petani menjadi kehilangan kemandirian bibit, pupuk, dan obat untuk pertanian mereka. Petani tidak bisa membuat benih, pupuk, dan obat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan benih, pupuk, dan obat, petani harus membeli dari pabrik industri dengan harga yang sangat mahal, karena harga ditentukan secara sepihak oleh pihak pemodal (pemilik industri).

Di samping itu, proyek intensifikasi juga berakibat terjadinya degradasi lahan pertanian. Dengan penggunaan pupuk kimia buatan, maka lahan petani menjadi rusak dan tidak bisa ditanami kecuali dengan menggunakan pupuk kimia buatan tersebut secara terus-menerus.

Petani terpaksa bergantung pada industri pertanian milik kaum borjuis. Petani tidak bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Semua kebutuhan pertanian sudah disuplai oleh pabrik dengan harga yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pemilik kapital itu. Karena ketergantungan petani pada pabrik, maka petani tidak bisa mengontrol harga barang kebutuhan mereka. Seratus persen harga kebutuhan proses produksi pertanian ditentukan oleh pabrik.

Sebaliknya pada saat panen tiba, harga produk pertanian ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Dalam mekanisme pasar berlaku hukum pasar, “semakin banyak suplai barang di pasar, sementara permintaan tetap menyebabkan harga turun.” Hukum pasar ini benar terjadi pada saat musim panen tiba, suplai barang

hasil pertanian di pasar melimpah, sedangkan kebutuhan terhadap barang tersebut konstan, akibatnya harga hasil pertanian turun drastis.

Tingginya biaya produksi jika dibandingkan dengan harga jual atas barang hasil produksi pertanian, telah menyebabkan petani sering –untuk tidak mengatakan selalu merugi. Hal ini menyebabkan petani kecil dengan modal pas-pasan (mayoritas petani Indonesia) tidak lagi bisa melanjutkan usaha pertanian mereka. Tidak berhenti di sini, melihat nasib petani Indonesia yang kurang beruntung secara sosial-ekonomi, menyebabkan generasi muda enggan menjadi petani. Hal tersebut menjadikan pertanian tidak sustainable.

Fenomena yang tidak kalah bahayanya bagi nasib petani adalah keberadaan tengkulak. Tengkulak adalah pihak yang membeli hasil panen petani. Tengkulak juga sering kali memberikan pinjaman modal kepada petani, yang memang sangat berkekurangan. Tengkulak juga berperan sebagai penghubung antara petani dengan pedagang. Dengan keberadaan tengkulak ini petani menjadi memiliki banyak keterbatasan terhadap akses informasi terkait harga pasar penjualan hasil pertanian. Keberadaan tengkulak juga menyebabkan petani tergantung kepada mereka. Pada saat panen tiba, tengkulak sering kali lebih mendapatkan keuntungan jika dibandingkan dengan petani sendiri.

Persoalan petani akibat hegemoni kapitalisme tidak berhenti di sini. Kebanyakan petani tidak memiliki lahan sendiri. Berdasarkan data panel mikro PATANAS tahun 2010 sebagaimana dikutip oleh (Maulana, n.d.), petani yang tidak memiliki lahan berjumlah 19,5% di Jawa, dan 17,3% di Luar Jawa. Sedangkan jumlah petani gurem, dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha sebanyak 41,6%. Jumlah kelompok pemilikan lahan antara 0,75 ± 1,749 ha total sebanyak 32%. Dari data di atas, menunjukkan bahwa sebagian petani kita termasuk petani tanpa lahan dan memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Kecuali itu, data tersebut juga menunjukkan kecenderungan terjadi pemusatan pemilikan lahan, dimana di satu sisi jumlah petani kecil dominan, namun di sisi lain pemilik lahan luas juga relatif tinggi.

Untuk petani dengan kepemilikan lahan sempit berpotensi memiliki penghasilan yang sangat minim, demikian juga dengan petani yang tidak memiliki lahan. Petani yang tidak memiliki lahan berarti akan menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Dengan jumlah penghasilan petani yang sudah sangat kecil, karena harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi, masih harus berbagi dengan pemilik lahan. Hal ini tentu akan semakin menjadikan petani hidup miskin.

Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah wilayah yang memiliki struktur tanah yang sangat subur bagi sektor pertanian, khususnya untuk tumbuhan padi. Keadaan geografis Kecamatan Delanggu yang berada tepat di sebelah timur Gunung Berapi diduga menjadi penyebab kesuburan tanah pertanian di wilayah Kecamatan Delanggu. Di samping itu, Delanggu dapat dikatakan sebagai daerah yang diberkati, karena di sekitar wilayah ini banyak sekali mata air yang disebut umbul. Keberadaan umbul-umbul ini menyebabkan tanah pertanian wilayah ini tidak pernah kering di sepanjang tahun. Petani bisa panen tiga kali dalam setahun.

Dengan kondisi tanah yang subur inilah, maka Delanggu sejak jaman dahulu hingga kini dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Klaten atau bahkan Jawa Tengah. Karena kesuburan tanah di wilayah ini pula, Beras Delanggu menjadi *branding* tersendiri bagi pasar beras di sekitar Jawa Tengah bahkan juga beberapa provinsi yang lain, seperti DKI Jakarta. Berbagai varietas beras terbaik dapat tumbuh subur di Desa Delanggu ini.

Diantara beras varietas unggul dari Desa Delanggu adalah padi Rojolele. Namun demikian, sebagai akibat program intensifikasi pertanian Pemerintah Orde Baru, Rojolele sebagai icon beras Delanggu belakangan ini semakin sulit ditemukan. Hampir tidak ditemukan petani yang menanam padi Rojolele. Selain memerlukan waktu tanam hingga panen yang lama, menanam padi Rojolele juga memerlukan lebih banyak modal. Akhirnya, sudah puluhan tahun petani Desa Delanggu lebih banyak menanam padi varietas lain yang jauh lebih pendek masa

tanamnya, juga lebih mudah. Akibatnya petani Delanggu kehilangan icon masa lalunya sebagai petani beras Rojolele premium.

Beras Delanggu sebagai brand dari beras di luar Delanggu atau Klaten bukan satu-satunya masalah yang dihadapi petani Delanggu. Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat petani Delanggu adalah marginalisasi petani. Seiring dengan semakin masifnya intensifikasi pertanian, membuat penghasilan petani semakin kecil. Belum lagi diperparah oleh fenomena yang menyebutkan bahwa 90% petani Desa Delanggu tidak memiliki lahan persawahan sendiri. Mereka hanyalah petani penggarap. Konsekuensinya, mereka harus berbagi hasil panen dengan pemilik lahan. Akibatnya kehidupan petani semakin miskin. Di mata generasi muda pertanian bukan profesi yang ideal. Hampir tidak ada generasi muda yang bersedia hidup sebagai petani. Dari 6000 populasi penduduk Desa Delanggu, hanya ada 70 orang yang memiliki profesi sebagai petani. Dari 70 orang tersebut, sebagian kecil (dapat dihitung dengan jari) yang berusia di bawah 50 tahun. Bisa diprediksi, bahwa beberapa decade ke depan, akan semakin jarang penduduk Desa Delanggu yang berprofesi sebagai petani (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022).

Dengan latar belakang berbagai keprihatinan tersebut di atas, Eksan Hartanto akhirnya mendirikan Sanggar Rojolele. Sebagaimana sebuah sanggar, Sanggar Rojolele juga merupakan lembaga seni-budaya. Yang membedakan dengan sanggar yang lain adalah Sanggar Rojolele adalah lembaga yang menggunakan pendekatan seni-budaya sebagai wadah untuk untuk mengembalikan nostalgia kejayaan masa lalu petani Delanggu sebagai daerah penghasil padi Rojolele premium. Melalui sanggar tersebut Eksan berharap semangat generasi muda kembali muncul untuk menjadi petani padi Rojolele.

Layaknya sebuah sanggar budaya, Sanggar Petani Rojolele ini menghimpun para petani untuk “ngudoroso” masalah mereka dan berupaya menemukan jalan keluarnya, melalui pendekatan seni dan budaya. Di sanggar inilah, para stake holder pertanian, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, budayawan, hingga petani sendiri dan masyarakat dapat saling berkomunikasi dalam suasana, akrab, dekat,

non formal, sehingga banyak permasalahan pertanian di Desa Delanggu khususnya dapat dibahas dan dicarikan solusinya.

Dalam perspektif pemberdayaana masyarakat, Sanggar Rojolele adalah lembaga pemberdayaan petani. Melalui kegiatan sanggar ini, kesadaran akan potensi pertanian di wilayah tersebut dibangkitkan, penguatan kompetensi SDM pertanian dilakukan, bantuan teknologi sesuai dengan kebutuhan diupayakan. Tidak berhenti di situ, di sanggar juga dibahas permasalahan penjualan hasil produksi pertanian.

Dari sudut pandang dakwah, apa yang dilakukan Eksan Hartanto dengan Sanggar Rojolele adalah bentuk kegiatan dakwah. Dakwah bukan hanya berarti menyeru dengan lisan agar orang lain masuk Islam serta bersedia melakukan serangkaian ibadah ritual, namun dakwah juga diartikan sebagai menyeru dengan perbuatan nyata, untuk menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran dakwah. Secara teoritik, dakwah yang pertama disebut *dakwah bil lisan*. Sedangkan dakwah yang belakangan disebut dengan *dakwah bil hal*.

Penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh para petani Desa Delanggu akibat hegemoni kapitalisme, serta upaya yang dilakukan oleh komunitas petani yang berhimpun dalam wadah Sanggar Rojolele untuk keluar dari permasalahannya tersebut. Upaya-upaya dimaksud akan dibaca dengan perspektif *dakwah bil hal*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kapitalisme menghegemoni sektor pertanian di Desa Delanggu ?
2. Bagaimana upaya petani Desa Delanggu dalam membebaskan diri dari hegemoni kapitalisme di wilayahnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengungkap hegemoni kapitalisme pada sektor pertanian di Desa Delanggu.
2. Ingin mengungkap upaya petani Desa Delanggu dalam membebaskan diri dari hegemoni kapitalisme di wilayahnya?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang *dakwah bil hâl*, khususnya upaya nyata untuk menemukan solusi dan membebaskan diri dari hegemoni kapitalisme di sektor pertanian.
2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan berguna bagi semua kalangan, yang antara lain;
  - a. Bagi petani, temuan penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk bangkit membebaskan diri dari hegemoni kapitalisme yang mereka alami.
  - b. Kalangan akademis dapat menggunakan model *dakwah bil hâl* khususnya dalam rangka membebaskan diri dari hegemoni kapitalisme di sektor pertanian, sebagai model awal untuk lebih dimatangkan dalam penelitian berikutnya.
  - c. Bagi para aktifis dakwah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai salah satu rujukan pendampingan dakwah mereka di masyarakat di Indonesia yang mayoritas petani.

## **BAB II**

### **LITERATURE REVIEW**

#### **A. Previous Research**

“*Dakwah*” dan “pemberdayaan masyarakat” memiliki irisan yang sangat kuat. Keduanya memiliki persamaan yaitu mengubah masyarakat empiris yang sarat dengan permasalahan, berupa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, sehingga terwujud masyarakat ideal. Yang membedakan adalah jika dakwah merupakan idiom sosial-keagamaan, bisa dilakukan dengan deduktif (*top down*) maupun induktif (*bottom up*), maka pemberdayaan merupakan idiom sosial murni, yang bersifat induktif (*bottom up*). Pemberdayaan sebagai idiom sosial-keagamaan yang bersifat praktis bisa menjadi salah satu metode *dakwah*. Oleh karena itu, dalam *previous research* ini akan dicari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan dakwah maupun pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

Penelitian tentang pemberdayaan petani sudah banyak dilakukan orang lain sebelumnya. Diantaranya adalah Hasdiansyah, A., Sugito, Suryono, (2021) dengan judul jurnal mereka “*Empowerment of farmers: The role of actor and the persistence of coffee farmers in rural pattongko, indonesia*”. Penelitian ini dilakukan terhadap komunitas petani kopi. Dengan metode penelitian kualitatif, disimpulkan bahwa pemberdayaan petani tidak bisa dilakukan dengan kaku, terlalu bertele-tele. Yang diperlukan adalah pendekatan yang natural dan memperhatikan kearifan local.

Peneliti lainnya adalah Yang, Y., Pham, M.H., Yang, B., Sun, J.W., Tran, (2022) dengan artikel yang berjudul, “*Improving vegetable supply chain collaboration: a case study in Vietnam*”. Studi ini memberikan hasil baru yang mendalam tentang bagaimana terlibat dengan petani kecil yang terfragmentasi untuk kolaborasi dalam menyuplai kebutuhan sayuran. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana meningkatkan peran lembaga koperasi dalam industri

sayuran di Vietnam. Ini juga memberikan informasi bagi pembuat kebijakan untuk mendukung pengembangan suplai sayuran berkelanjutan.

Peneliti berikutnya adalah (Rohmawati, Sean Fitria Laily, Nurani, Farida; Ribawanto, 2017). Artikel yang berjudul “*Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)*” ini menyimpulkan tentang pemberdayaan petani di Nganjuk Jawa Timur yang berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Faktor pendukungnya antara lain dukungan pemerintah yang berupa bantuan benih, pupuk dan teknologi.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Khusna et al., (2019) dengan judul artikelnya “*Pengembangan Model Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian*”. Artikel ini menjelaskan bahwa model pemberdayaan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember Jawa Timur terhadap petani padi adalah model kemitraan. Mitra terdiri dari pemerintah provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Hortikultura, serta Gapoktan di Kabupaten Jember.

Peneliti berikutnya adalah Pramana, A., Adhianata, H., Zamaya, Y., Nopiani, Y., Alvionita, (2021) dengan artikel mereka yang berjudul “*Acceleration of Sago Food Diversification in Improving the Welfare of Sago Farmers in Riau Province*”. Dalam artikel ini para peneliti mengungkapkan pemberdayaan petani sago di Provinsi Riau. Didalamnya menjelaskan langkah-langkah praktis sebagai percepatan diversifikasi pangan sago sehingga peluang dapat diidentifikasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani sago di Provinsi Riau.

Artikel lain yang secara spesifik focus pada upaya penguatan petani kecil dalam persaingan dengan petani mega telah dilakukan oleh (Duteurtre, G., Pannier, E., Hostiou, N., Pham, D.K., Bonnet, 2021). Peneliti ini menulis artikel yang berjudul “*Economic Reforms and the Rise of Milk Mega Farms in Vietnam: Governing the Post-socialist Transition*”. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana petani sapi perah kecil harus bersaing dengan petani mega sapi perah



yang dimiliki oleh suatu perusahaan besar di Vietnam. Korporasi ini telah menyebabkan penurunan produksi susu oleh petani kecil. Studi kasus ini focus pada isu-isu yang muncul pada masa transisi pasca sosialis di Vietnam.

Artikel lain yang focus pada kapitalisasi di sektor pertanian dilakukan oleh Sinha (2021). Artikel yang berjudul, *“From cotton to paddy: Political crops in the Indian Punjab”* ini merupakan hasil penelitian terhadap masa transisi petani kapas untuk menjadi petani padi yang dilakukan di bawah kebijakan pemerintah Punjab India. Masa transisi meninggalkan dampak banyaknya tenaga kerja wanita pemetik kapas yang tidak memiliki lahan, kehilangan pekerjaan akibat konversi kapas ke padi. Para wanita ini menjadi sangat tergantung pada kaum pria mereka. Makalah ini menyarankan bahwa pergeseran dari kapas ke padi merupakan intensifikasi modal tetapi juga menghasilkan kontradiksi baru dan sumbu perjuangan politik.

Artikel Tilzey (2021) yang berjudul *“From neoliberalism to national developmentalism? Contested agrarian imaginaries of a postneoliberal future for food and farming”* ini merupakan telaah teoritis terhadap tiga buku yang membahas hubungan antara neoliberalisme dan agribisnis, di satu sisi, dan runtuhnya pertanian petani kecil, diet tradisional dan munculnya penyakit kronis terkait diet, di sisi lain. Yang pertama, ditulis oleh Timothy Wise, mengadopsi apa yang dapat dicirikan sebagai sikap 'populis agraria', membangun biner universal antara agribisnis transnasional dan sektor pertanian keluarga terpadu. Wise tampaknya lebih menganjurkan 'jalan petani' untuk pembangunan kapitalis nasional. Dua buku lainnya, oleh Alyshia Galvez dan Gerardo Otero. Buku ini melihat secara eksplisit kebangkitan neoliberalisme, penurunan pertanian tradisional dan munculnya penyakit terkait makanan olahan. Secara normatif, keduanya melihat negara sebagai penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpusat di sekitar pertanian skala kecil dan produksi makanan bergizi untuk semua. Bagi Otero, seperti Wise, kebijakan ini tampaknya terkait dengan bentuk perkembangan nasional sebagai jalan keluar dari neoliberalisme.

Penelitian dalam bidang dakwah di sektor pertanian sudah dilakukan beberapa orang. Diantarnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Warto dengan judul *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa kemiskinan petani bukan hanya berdimensi ekonomi, namun juga sosial dan budaya komunitas lokal. Oleh karena itu penanggulangannya diperlukan implementasi program yang terkoordinasi dengan baik antar berbagai stake holder yang komitmen untuk penanggulangan kemiskinan, seperti pemerintah daerah, perusahaan, hingga LSM(Warto, 2015).

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aliyuddin yang berjudul *Dakwah Bi Al-Hal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Penelitian ini mengambil studi kasus peran Kelompok Tani Harja Mukti dalam meberdayakan petani. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok tani Harja Mukti antara lain: melakukan kontak langsung dengan masyarakat untuk membahas isu dan kepentingan bersama, melakukan demonstrasi hasil dan proses untuk meyakinkan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah, menerapkan prinsip solidaritas, dan memanfaatkan pusat informasi(Aliyuddin, 2016).

Dari telaah Pustaka di atas khususnya yang menulis tema seputar pemberdayaan petani belum secara spesifik mengkaitkan antara pemberdayaan petani dengan kekuatan ekonomi kapitalisme. Padahal yang disebut terakhir ini merupakan kekuatan besar yang telah, sedang dan akan mencengkeram sektor pertanian. Pemberdayaan petani untuk bebas dari ancaman cengekeraman kapitalisme sangat perlu dilakukan. Inilah urgensi penelitian yang akan peneliti lakukan.

Sementara itu, artikel lainnya telah membahas seputar idiologi kapitalis-liberal di sektor pertanian, tetapi mereka mengambil subjek penelitian petani di luar Indonesia. Latar belakang sosio kultural pertanian antara Indonesia dengan pertanian di luar Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Untuk itu penelitian yang

mengambil tema perjuangan (*effort*) komunitas petani Indonesia untuk bebas dari cengkeraman kekuatan ekonomi kapitalis sangat urgen dilakukan.

Sedangkan dua penelitian terakhir menggunakan term dakwah bil hal untuk melihat fenomena pemberdayaan masyarakat tani. Keduanya menjadikan kelompok tani sebagai studi kasusnya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada ancaman eksternal yang berupa hegemoni kapitalisme di sektor pertanian. Variable eksternal ini tidak menjadi fokus dari kedua penelitian terakhir.

## **B. Teori Konflik Karl Marx Sebagai Perspektif**

Sebagai sudut pandang, penelitian ini akan digunakan teori konflik Karl Marx. Konflik berasal dari kata kerja latin "*Configere*" yang berarti "saling memukul". Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya"(Haryanto, 2011).

Dalam pandangan Marx konflik adalah sesuatu yang bersifat inheren dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa konflik. Konflik sesungguhnya bersifat natural. Konflik berawal dari adanya perbedaan dalam penciptaan manusia. Manusia diciptakan berbeda kemampuan nalar, fisik, kebiasaan, keyakinan, adat istiadat dan sebagainya. Perbedaan itu menyebabkan terjadinya konflik antar elemen individu maupun sosial.

Dalam ranah sosial, masyarakat terdiri dari banyak elemen sosial. Setiap elemen sosial memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Kepentingan dan cara pandang tersebut mengakibatkan terjadinya konflik sosial, yang mana satu elemen berusaha mempertahankan kepentingan dan cara pandangnya dengan cara mengalahkan atau memusnahkan elemen sosial lainnya. Menjelaskan dinamika sosial tersebut, Haryanto (2011) menyatakan "Dalam pandangan ahli sosiologi, masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi konflikual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap – tahap yang lebih sempurna"

Selanjutnya Marx mengelompokkan masyarakat menjadi dua kelas sosial, kelas borjuis dan kelas proletar. Keduanya berada dalam struktur vertikal. Kelas borjuis adalah kelas masyarakat yang memiliki atau bahkan menguasai alat produksi, seperti; alat transportasi, lahan pertanian yang luas, pabrik atau perusahaan sebagai modal berusaha. Sebaliknya adalah kelas proletar. Kelas proletar merupakan kelas masyarakat yang tidak menguasai alat produksi, melainkan hanya memiliki tenaga sebagai modal usaha. Dalam proses produksi, kedua kelas sosial tersebut selalu dalam konflik. Konflik terjadi karena dalam proses produksi kelas borjuis mengeksploitasi kelas proletar(Berry, 2004).

Konflik antara dua kelas tersebut disebabkan oleh kepentingan dan karakter yang berbeda dari masing-masing. Kelas borjuis berkepentingan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari proses produksi yang berlangsung. Keuntungan maksimal akan didapatkan diantaranya dari biaya produksi yang murah. Oleh karena itu kaum borjuis akan berusaha menekan biaya upah dari tenaga kaum proletar. Sementara itu, kaum proletar atau siapapun juga tidak akan rela ditindas, dieksploitasi oleh kelas borjuis. Mereka akan menuntut hubungan kerja yang seadil-adilnya dalam suatu proses produksi(Berry, 2004).

Dalam bidang pertanian, kaum borjuis diwakili oleh para tuan tanah sebagai pemilik tanah sebagai alat produksi, bisa juga diwakili oleh pemilik penggilingan padi, pemilik alat transportasi, dan perusahaan produsen bibit, pupuk dan obat-obat pertanian. Sedangkan kaum proletar diwakili oleh para petani yang memiliki lahan dalam jumlah kecil atau tidak punya lahan sama sekali sehingga mereka menjadi buruh tani.

Teori konflik Marx tersebut sesungguhnya bertolak dari pandangan Marxs tentang struktur masyarakat. Menurut Marx, masyarakat terdiri dari dua struktur besar, yaitu; *infrastruktur* (struktur basis) dan *superstruktur* (bangunan atas)(F. M. Suseno, 2003).

Bagi Marx, *infrastruktur* (struktur basis) terdiri dari dua kelas sosial yang saling bersaing, bahkan konflik. Konflik antar dua kelas tersebut justru menjadi penggerak dinamika sejarah. Motor atau penggerak struktur basis adalah produksi material yang terjadi di masyarakat. Struktur basis terdiri dari dua unsur yaitu tenaga-tenaga produktif (*produktivkrafte*) dan hubungan-hubungan produksi (*production sverbalt-nisse*). Tenaga produktif adalah kekuatan-kekuatan masyarakat yang dipakai untuk mengubah alam, seperti alat kerja, tenaga kerja dan teknologi (Kambali, 2017).

Hubungan produksi ditentukan oleh tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif dalam setiap fase masyarakat. Dinamika yang terjadi dalam struktur basis menentukan struktur kelas dalam masyarakat. Dari sinilah terjadinya perkembangan masyarakat lama menjadi masyarakat baru. Menurut Karl Marx, ada 5 fase perkembangan masyarakat, yaitu; primitive, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme menuju komunisme (Kambali, 2017; Ritzer, 2003).

*Pertama*, masyarakat komunal-primitif, pada tahap ini alat-alat produksi masih sangat natural seperti batu dan kayu. Pada fase ini juga belum ada hak milik. Pola produksi masih terbatas untuk kebutuhan konsumsi individu. Belum ada sistem politik yang terpisah dari komunitas. *Kedua*, masyarakat primitive kemudian berkembang menemukan alat-alat baru untuk memperbesar produksi, sehingga zaman batu berubah menjadi zaman besi. Mereka yang tidak memiliki alat produksi hanya mengandalkan tenaga untuk survive, dan akhirnya menjadi budak atas pemilik alat produksi sebagai tuan mereka. Relasi sosial antar tuan dan budak yang tidak manusiawi berhasil melahirkan kesadaran kelas kaum budak, hingga akhirnya budak berusaha memerdekakan diri hingga lahirlah masyarakat baru yang ketiga, yaitu masyarakat feodal.

*Ketiga*, fase masyarakat feodal ditandai oleh kepemilikan alat produksi berupa tanah oleh kalangan terbatas keturunan bangsawan dan tuan tanah. Sedangkan buruh *tani berasal dari budak yang telah dimerdekan*.

*Keempat*, fase kapitalisme. Fase ini lahir akibat tuan tanah dan kaum bangsawan pemilik alat produksi ingin mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Oleh karena itu mereka mendirikan pabrik-pabrik untuk melipatgandakan barang-barang produksi. Barang produksi yang melimpah membutuhkan pasar-pasar baru. Dari sini muncul kelas kaya baru (kaum borjuis) dalam bentuk kaum kapitalisme. Ciri khas fase kapitalisme ini adalah kebebasan individu yang didasarkan atas hak milik alat-alat produksi. Relasi sosial dalam fase ini dilakukan oleh kaum borjuis dan proletar.

*Kelima*, fase sosialis, yaitu fase terakhir dalam evolusi sejarah. Dalam tahap ini, masyarakat tidak lagi berkelas. Tidak ada lagi hak milik. Semua alat produksi menjadi milik bersama (komunal). Negara dalam fase ini hampir tidak memiliki fungsi kecuali menjaga masyarakat agar tidak terjadi serangan balik dari kaum borjuis.

Bangunan atas (*suprastruktur*) yang dimaksud Marx adalah fungsi dari dinamika yang terjadi di ranah infrastruktur. Suprastruktur berisi dua komponen, yaitu; tatanan institusi dan tatanan kesadaran kolektif. Institusi sosial berisi berbagai lembaga yang diperlukan masyarakat untuk mengatur perilaku komunitas sosial, seperti lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, pasar, dan sebagainya. Sedangkan tatanan kesadaran kolektif berisi nilai, ideologi, cara berfikir, dan moralitas masyarakat.

Suprastruktur adalah bangunan budaya yang terdiri dari ide, gagasan tentang agama, politik, seni, hukum, hingga etika. Dalam aspek agama misalnya, Marx menyatakan agama adalah fungsi dari kesadaran kelas “pemilik budak”, “majikan”, dan “pemilik kapital”. Agama yang mestinya berfungsi sebagai pembebas manusia, namun dalam kenyataannya justru dijadikan alat bagi kelas berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Demikian juga dengan politik. Konsolidasi politik dan militer bermula pada kepentingan ekonomi kelas yang berkuasa. Dari sini menjadi jelas bahwa struktur politik dan spiritual merupakan cerminan dari struktur kekuasaan kelas atas terhadap kelas bawah (Kambali, 2017).

Karl Marx dalam Margaret, (2010) mengemukakan beberapa pandangannya tentang kehidupan sosial yaitu : 1) Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan. 2) Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan. 3) Paksaan (*coercion*) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (*property*), perbudakan (*slavery*), kapital yang menimbulkan ketidaksetaraan hak dan kesempatan. 4) Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (*kapitalis*) demi keuntungan mereka. 5) Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

Dalam pandangan Marx, konflik antar kelas tersebut sulit untuk diselesaikan. Satu-satunya penyelesaian adalah revolusi sosial secara radikal, yaitu menghilangkan kelas-kelas sosial tersebut dengan cara mengambil alih hak milik individual. Semua alat produksi menjadi milik negara. Inilah yang disebut masyarakat tanpa kelas yang disebut dengan masyarakat sosialis-komunis. Masyarakat sosialis adalah puncak dari perubahan sosial yang harus diwujudkan dalam sejarah (Ritzer, 2003).

Di dunia ilmiah, kritik terhadap sebuah teori yang telah diyakini benar sebelumnya adalah hal yang lumrah. Demikian juga terhadap teori konflik Karl Marx. Faktor produksi yang menghasilkan kelas sosial di struktur bawah, dan kemudian menghasilkan ideologi, agama, politik, hukum dan seni sebagai struktur atas, adalah menjadi pembener atas klaim bahwa teori konflik Marx sebenarnya didasarkan pada filsafat materialisme historis. Tentu saja tesis tersebut dipahami bertentangan dengan realitas historis di berbagai ruang dan waktu oleh sementara kalangan yang memiliki pandangan bahwa spirit, ruh, adalah yang bersifat dasar dari jasad, fisik, dan material. Di kalangan ilmuwan muslim, antara lain ada Murtadha Muthahhari dari Iran yang telah mengkritisi teori konflik Marx tersebut (Muthahhari, 1993).

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, teori konflik Marx dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk menganalisis perkembangan sosial di berbagai wilayah, termasuk yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, sistem ekonomi kapitalis berkembang semakin massif dan terstruktur dalam masyarakat Indonesia, khususnya sejak dicanangkannya industrialisasi pada masa Orde Baru. Investor domestik dan global mendapatkan perlakuan istimewa oleh pemerintah, sehingga kapitalisme berkembang pesat dalam berbagai bidang dari hulu hingga hilir. Tanpa terkecuali dalam bidang pertanian. Dalam hal penguasaan lahan, alat dan sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk, dan obat, hingga monopoli perdagangan hasil pertanian adalah bidang-bidang padat investasi modal kaum kapitalis. Masyarakat tani yang umumnya tinggal di desa menjadi buruh tani, yang secara sosial ekonomi semakin terpinggirkan dari arus utama sistem pertanian nasional. Proses investor besar tersebut mencengkeram nasib petani, akibatnya yang ditimbulkannya, dan upaya petani bebas dari cengkeraman tersebut dapat dijelaskan dengan teori konflik sebagai perspektif.

### **C. Kapitalisme di Bidang Pertanian**

#### **Definisi Kapitalisme**

Berdasarkan Castells (1996, 2000) dalam (Bellanca, 2013) kapitalisme didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial di mana surplus ekonomi diambil oleh siapa yang memegang kendali organisasi ekonomi dan tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Sementara itu, menurut Bowles (2004); (Bellanca, 2013) kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana, dengan mempertimbangkan ketidaklengkapan konstitutif kontrak, manajer kapitalis memaksakan keputusan yang menurutnya dapat memaksimalkan laba bersih yang dapat diperoleh untuk dirinya sendiri. Menurut Scott (2006) kapitalisme merupakan sistem pemerintahan tidak langsung untuk hubungan ekonomi, di mana semua pasar ada dalam kerangka kelembagaan yang disediakan oleh otoritas politik misalnya pemerintah.



Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa dengan ciri-ciri: sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu; barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (*free market*) yang bersifat kompetitif; dan modal kapital (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan kedalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (*profit*)(Garnham, 1990).

Dari beberapa pengertian di atas, maka setidaknya ada duasubstansi dari sistim ekonomi kapitalis yaitu 1) alat-alat produksi dimiliki oleh privat, dan digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. 2) investasi, produksi, distribusi, pendapatan, dan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Negara tidak diperbolehkan ikut mencampuri mekanisme pasar tersebut. Itulah karenanya, di antara implementasi sistim ekonomi kapitalisme adalah dicabutnya berbagai bentuk subsidi, serta terjadinya privatisasi badan-badan usaha milik negara.

Sebagaimana nilai dasar kapitalisme bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berusaha, berinvestasi, dan bersaing dengan orang lain secara bebas, tanpa campur tangan negara. Satu-satunya yang mengatur persaingan usaha adalah mekanisme pasar. Kapitalisme tidak terbatas pemilik kapital domestik, namun juga pemilik modal besar global harus mendapatkan jaminan untuk bebas bersaing di suatu negara. Mekanisme pasar ternyata tidak bebas. Mekanisme pasar memihak terhadap pemilik modal besar. Seperti hukum rimba, yang kuatlah yang akan memenangkan persaingan bebas tersebut. Akibatnya tentulah yang kecil harus terpinggirkan dan kalah. Sebagai hasilnya terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar antara kelompok miskin dan kaya dalam masyarakat.

### **Kapitalisme dalam Bidang Pertanian**

Bentuk kapitalisme pertama kali muncul pada sektor pertanian yaitu ketika terjadi perubahan sistem pertanian feodal pada abad ke 16 yang ditandai oleh berubahnya orientasi produksi yang pada awalnya hanya untuk dikonsumsi sendiri menjadi orientasi produksi pertanian untuk dijual (Syahyuti, 2003). Hal ini menyebabkan

terbentuknya masyarakat kapitalis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara menjual komoditas.

Adanya kapitalisme ini berdampak pada terbentuknya kelas sosial yaitu kelas majikan dan buruh. Walaupun di satu sisi sistem ini membawa berbagai kemajuan, tetapi di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu tumbuhnya sifat egoisme, keserakahan, hedonisme dan individualisme. Dalam konteks ini, Magdoff (2015) berpendapat bahwa dari sudut pandang kemanusiaan, banyak aspek dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak rasional meskipun sistem ini dianggap rasional dari sudut pandang bisnis individu atau para kapitalis yang mencari keuntungan. Lebih lanjut, Magdoff (2015) menyebutkan bahwa menurut Karl Marx, pertanian yang rasional tidak sesuai dengan sistem kapitalis, (meskipun sistem tersebut mendorong perbaikan teknis dalam sektor pertanian), dan lebih membutuhkan tangan kecil petani yang hidup dengan tenaganya sendiri atau kontrol dari produsen terkait.

### **Pertanian Organik di Indonesia**

Konsep dasar pertanian organik adalah cara produksi tanaman dengan menghindari atau sebesar-besarnya mencegah penggunaan senyawa-senyawa kimia sintetik (pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh). Sistem pertanian organik semaksimal mungkin dilaksanakan melalui pergiliran tanaman, penggunaan sisa-sisa tanaman, pupuk kandang (kotoran ternak), kacang, pupuk hijau, limbah organik *off farm*, penggunaan pupuk mineral batuan serta mempertahankan pengendalian hama penyakit secara hayati, produktivitas tanah, dan suplai hara tanaman (Alamban, 2002).

Pertanian organik diyakini sebagai solusi dari kerusakan lingkungan dan berkurangnya kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada saat digalakkannya Revolusi Hijau sekitar tahun 60-an (Priadi et al., 2007). Pada pertanian organik, pestisida dan pupuk yang digunakan dibuat dari bahan organik dan pupuk kandang yang berasal dari limbah hewan, tumbuhan atau produk sampingan seperti kompos jerami padi dan tanaman lainnya. Adapun keunggulan

dari praktik pertanian organik adalah sebagai berikut: 1) Mengutamakan pencegahan daripada pemberantasan hama dan penyakit sehingga dapat meminimalkan penggunaan pestisida yang dapat merusak lingkungan. 2) Biaya produksi lebih murah. 3) Tidak merusak kesuburan tanah dan ketersediaan bahan organik. 4) Tidak merugikan makhluk hidup lainnya.

Dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut, sistem pertanian organik dapat menghasilkan pangan secara berkelanjutan serta bahan pangan yang dihasilkan lebih sehat karena meminimalkan bahan kimia. Dengan demikian, dengan mengonsumsi pangan hasil pertanian organik dapat meminimalkan risiko terjadinya keracunan makanan. Sistem pertanian organik di Indonesia telah lama diimplementasikan, khususnya oleh para petani di Pulau Bali yaitu dengan penerapan sistem *Subak*, yaitu konsep pertanian yang memadukan keserasian antara Tuhan, manusia, dan lingkungan (Wiguna, 2005 dalam Priadi et al., 2007).

Salah satu tanaman yang menerapkan sistem pertanian organik yaitu padi organik. Padi organik adalah padi yang diusahakan oleh petani atau sebuah badan independen, untuk ditanam dan diolah menurut standar ‘organik’ yang ditetapkan. Menurut Sugiyanta & Aziz (2016) walaupun belum ada satu definisi untuk “padi organik”, namun padi organik mengacu kepada standar umum pertanian organik yang berarti bahwa dalam produksinya padi organik tersebut menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Tidak ada penggunaan pestisida dan pupuk dari bahan kimia sintesis atau buatan. 2) Kesuburan tanah dipelihara melalui proses “alami” seperti penanaman tumbuhan penutup atau penggunaan pupuk kandang yang dikomposkan atau limbah tumbuhan. 3) Tanaman di sawah dirotasikan untuk menghindari penanaman tanaman yang sama dari tahun ke tahun yang dapat menyebabkan ledakan hama penyakit.

### **Minat Beli Masyarakat Terhadap Beras Organik**

Saat ini, konsumsi pangan organik termasuk beras organik semakin meningkat. Hal ini didorong dengan meningkatnya kesadaran serta preferensi masyarakat untuk

mengonsumsi pangan sehat. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui minat dan alasan masyarakat membeli beras organik, khususnya di daerah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu penelitian tersebut yaitu studi yang dilakukan oleh (Widodo et al., 2016). Penelitian tersebut mencoba menilai persepsi masyarakat terhadap beras organik dan dampaknya terhadap minat membeli beras organik di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Responden yang diteliti yaitu masyarakat yang berdomisili di daerah DIY dan Jawa Tengah sebanyak 120 orang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras organik dilakukan oleh berbagai jenis kelompok masyarakat, tetapi paling banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta anggota keluarganya relatif sedikit. Selain itu, studi yang dilakukan Widodo et al., (2016) ini menyebutkan pula bahwa karakteristik konsumen beras organik adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap keluarga, persepsi terhadap tingkat kemurnian dan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan lingkungan pertanian. Namun, konsumen masih memiliki persepsi bahwa hasil pertanian organik, termasuk beras organik cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk pertanian non organik. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa meningkatnya kepedulian terhadap keluarga, persepsi terhadap tingkat kemurnian, kepedulian terhadap kesehatan lingkungan pertanian dan persepsi terhadap praktik pertanian organik akan meningkatkan minat konsumen untuk membeli beras organik.

#### **D. Sejarah Beras Rojolele**

Rojolele merupakan salah satu varietas beras lokal yang terkenal di wilayah Jawa Tengah. Varietas beras tersebut diakui masyarakat berasal dari Kabupaten Klaten, khususnya daerah Delanggu. Masyarakat Delanggu dan sekitarnya menyebut beras Rojolele karena jenis beras ini dianggap beras “raja” karena lebih unggul dibandingkan jenis beras lainnya jika dinilai dari aspek kualitas rasanya. Rasa nasi dari beras Rojolele lebih enak jika dibandingkan dengan varietas-varietas *bulu* lain seperti Gadis, Sinta, Bengawan, dan Slogo (Ikaningtyas, 2013). Sementara itu, bentuk fisik padi Rojolele memiliki dua bulu panjang yang mirip kumis lele

sehingga masyarakat memberi nama padi Rojolele. Padi rojolele tidak hanya ditanam di daerah Delanggu saja, tetapi juga dikembangkan di wilayah Karesidenan Surakarta lainnya.

Hingga saat ini, beras rojolele merupakan produk pertanian unggulan di Kabupaten Klaten. Varietas padi yang dikembangkan yaitu padi Rojolele Srinar dan Srinuk dan ditanam pada lahan seluas 150 hektar di Desa Kahuman. Polanharjo. Dari luas lahan pertanian yang ditanami bibit kedua jenis padi tersebut, para petani mampu menghasilkan 7,9 ton gabah kering giling Rojolele Srinar dan Srinuk per hektar lahannya (mediaindonesia.com, 12 Oktober 2021). Menurut Bupati Klaten, Sri Mulyani, kedua jenis padi tersebut hasilnya lebih unggul jika dibandingkan dengan padi jenis yang lain serta nilai jualnya pun tinggi.

Untuk mendukung pemasaran padi Rojolele Srinar dan Srinuk ini pemerintah Kabupaten Klaten telah membuat kebijakan melalui Instruksi Bupati Nomor 1/2021 dengan mewajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD di wilayah Klaten untuk membeli dan mengonsumsi beras Rojolele. Kebijakan ini diterapkan mulai bulan Agustus 2021. Adapun jumlah minimal beras Rojolele yang harus dibeli oleh ASN dan Pegawai BUMD Klaten yaitu 10 kg setiap bulan (solopos.com, 13 Oktober 2021). Selain di Polanharjo, jenis padi Rojolele juga telah dikembangkan di Kecamatan Delanggu, Kalikotes, Ceper, Juwiring, Trucuk, Wonosari, Karanganyar dan Klaten Selatan.

#### **E. Dakwah Pembebasan**

Agama dalam pandangan Karl Marx merupakan kesadaran diri dan perasaan pribadi manusia pada saat belum menemukan dirinya atau tatkala kehilangan kesadaran dirinya. Agama merupakan bagian dari struktur atas (*superstruktur*) yang dibangun atas dasar struktur bawah (*infrastruktur*). Struktur bawah terdiri dari kelas sosial, lapisan bawah (*infrastruktur/basis*) ditentukan oleh dua hal, yaitu tenaga-tenaga produktif (*produktivkräfte*) dan hubungan-hubungan produksi (*produktionsverhältnisse*). Inti dari infrastruktur sosial adalah pertentangan kelas. Struktur atas

merupakan refleksi dari struktur bawah. Struktur atas terdiri dari budaya, mulai dari agama, politik, seni, filsafat, hingga etika(Kambali, 2017).

Agama dalam pengamatan Marx alih-alih membebaskan manusia dari belenggu penindasan kelas penguasa-pemodal, bahkan seringkali justru memberikan legitimasi atas perilaku menindas. Agama milik kelas penguasa atau pemodal. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan manusia, namun manusialah yang menciptakan Tuhan. Di sinilah awal mula terjadi pergeseran fungsi agama, dari yang semestinya agama sebagai pembebas manusia dari ketertindasan, ternyata yang terjadi justru sebaliknya agama menjadi legitimasi kaum penguasa yang represif untuk melanggengkan kedudukannya. Oleh karena itu dalam pandangan Marx, agama adalah candu(Ramli, 2000a).

Pandangan Marx tidak terlalu salah, karena memang aktualisasinya dalam sejarah, peran agama seringkali bertolak belakang dengan yang semestinya. Dalam sejarah Islam misalnya, aktualisasi agama mengalami dinamika sedemikian rupa. Pada suatu episode sejarah, Islam berperan sebagai pembebas masyarakat tertindas, tetapi pada episode lainnya diperankan sebaliknya. Namun demikian menurut beberapa sarjana muslim di antaranya adalah; Syariati (1982), Muthahhari (1988), Rakhmat (1986), belakangan Hanafi (1980) dan Engineer (1990), spirit Islam yang sebenarnya adalah agama pembebasan. Islam menurut mereka bukan sekedar ajaran ritual sebagaimana dipresentasikan dalam teologi tradisional, melainkan sistem nilai sosial-kemasyarakatan yang bersifat progresif, kritis, dan revolusioner.

Sebagian besar sejarah para Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam al Quran adalah sejarah penegakan nilai-nilai keadilan dan egalitarianisme untuk pembebasan mereka yang lemah dan tertindas. Nabi Ibrahim misalnya, dengan misi tauhid yang dibawakannya, Ia mengadakan pencerahan di tengah umatnya, mengusir kebodohan yang disimbolkan dengan kisah penghancuran berhala. Karena pencerahan yang ia lakukan umatnya menjadi umat yang tercerahkan, sehingga tidak mudah untuk ditindas oleh kekuatan feodalistik yang dikendalikan oleh Raja Namrut pada saat itu. Sekalipun akibatnya Ibrahim harus berhadapan dengan politik Namrut, hingga ia dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup. Kisah Nabi Musa juga dipenuhi perjuangan pembebasan kaumnya (Bani Israel) oleh bangsa

Mesir di bawah kepemimpinan politik Firaun yang menindas. Tauhid yang diajarkan Musa tidak saja diwujudkan dalam bentuk ibadah sholat, dzikir dan ibadah ritual lainnya, melainkan juga diimplementasikan menjadi sebuah gerakan heroik pembebasan Bani Israel dari perbudakan oleh bangsa Mesir saat itu. Sekalipun sebagai akibat gerakannya tersebut Nabi Musa harus berhadapan dengan kekuatan rejim Firaun yang hegemonistik dan menindas. Sekalipun Firaun tidak lain adalah bapak angkat Nabi Musa sendiri.

Sebagai sebuah catatan, gerakan Nabi Musa a.s. tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap teori determinisme sejarahnya Marx. Menurut Marx, revolusi hanya akan lahir dan dilakukan oleh kelompok tertindas. Ingat, teori determinisme sejarah, bahwa revolusi merupakan gerakan kelas proletar –mereka yang kelaparan-- untuk membebaskan diri dari kemiskinan akibat penindasan oleh kelas borjuis. Sedangkan Musa sendiri sebagai penggerak revolusi bukan berasal dari kelas tertindas, melainkan berasal dari istana, sebagai anak angkat Firaun (borjuis).

Demikian juga dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Tauhid yang menjadi misi Nabi Muhammad diimplementasikan dalam panggung sejarah kemanusiaan dalam bentuk penegakan keadilan, egalitarianisme sosial ekonomi dan pembebasan dari penindasan oleh kekuatan konglomerasi Mekah saat itu. Karena gerakan pembebasan yang dilakukan Nabi Muhammad inilah, sejarah dakwah Nabi beserta umatnya pada saat itu tidak hanya diwarnai dengan ceramah dari majlis ke majlis. Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya terjun langsung ke tengah masyarakat menegakkan nilai keadilan sosial, egalitarianisme, dan kesejahteraan. Dakwah Nabi diwarnai dengan negosiasi, diplomasi, bahkan juga konfrontasi dalam rangka menghadapi berbagai bentuk penindasan sosial, ekonomi, politik, bahkan juga militer yang dilakukan oleh persekongkolan antara para pengusaha Quraisy dengan kekuatan sosial politik lain yang ada di masyarakat Arab saat itu.

Di perempat abad terakhir ini, setidaknya ada dua buku yang secara khusus berwacana tentang agama pembebasan, yaitu Hasan Hanafi dan Asghor Ali Engineer. Menurut Engineer, prinsip ke-Esa-an Tuhan dalam doktrin teologi Islam berimplikasi pada kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*). Selanjutnya, dalam

prinsip *unity of mankind* tersebut terdapat satu nilai utama yaitu, “keadilan sosial” (*social justice*). Selanjutnya Engineer menyatakan;

“Tauhid seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai konsep teologi semata, namun mestinya juga sebagai konsep sosiologis. Inilah alasan mengapa al Quran menentang perbedaan yang didasarkan atas suku, ras, dan bangsa, dan menetapkan ukhawah antara orang-orang yang beriman” (Engineer 1990).

Oleh karena itu, konsep teologi Islam sejatinya berwatak progresif, kritis dan revolusioner. Namun dinamika sejarah kaum musliminlah yang mengubah watak revolusioner tersebut menjadi *pro status quo* dan konservatif. Watak revolusioner teologi Islam tersebut dipresentasikan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para Khalifah sesudahnya. Namun demikian, terutama sejak Dinasti Muawwiyah (661-750 M), watak teologi Islam mengalami pergeseran menjadi konservatif dan *pro status quo*. Oleh karena itu, bagi Engineer, harus diadakan pemahaman kembali kepada watak teologi Islam yang outentic sebagai agama pembebasan. Mengikuti sunnah tidak berarti menirunya secara mekanistik, seperti dijelaskan dalam teologi tradisional. Mengikuti sunnah Nabi berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang ruwet dan kompleks yang terjadi pada saat ini (Engineer 1990).

Senada dengan Engineer adalah Hasan Hanafi dengan teori Kiri Islam-nya. Kiri Islam merupakan representasi misi Islam sebagai agama yang berwatak kritis, progresif dan revolusioner. Sekalipun terinspirasi oleh revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979, Kiri Islam sejatinya bukan teori yang reaktif, berasal dari luar ajaran Islam. Kiri Islam merupakan “madzhab pemikiran” original berasal dari inti ajaran Islam itu sendiri, tauhid Shimogaki menyatakan;

“Dalam Tauhid secara logis dapat ditarik pengertian bahwa penciptaan Tuhan adalah esa. Ia menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kelas, garis keturunan, kekayaan, dan kekuasaan. Ia menempatkan manusia dalam kesamaan. Ia juga menyatukan antara manusia dan alam yang melengkapi penciptaan Tuhan” (Kazio Shimogaki, 1993).

Bertolak pada prinsip Islam sebagai agama pembebasan tersebut, dakwah Islam harus dibangun. Dakwah tidak selesai di mimbar-mimbar. Dakwah tidak



selesai karena telah menjelaskan ajaran tentang beraneka macam ritual keagamaan. Dakwah seharusnya dapat menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat yang timpang. Dakwah pembebasan adalah dakwah yang hadir di tengah masyarakat lemah yang terpinggirkan dalam struktur sosial, bukan dakwah yang mengamini perilaku lalim kaum borjuis (Idris, 2020) (Jaya, 2012). Inilah yang disebut dengan dakwah pembebasan. Dakwah pembebasan adalah dakwah yang bersifat holistik. Maksudnya dakwah mestinya mengandung; 1) usaha pembebasan (liberation) dari kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang represif dan hegemonistik, 2) dakwah pembebasan teologi masyarakat dari ajaran agama yang konservatif menuju dakwah yang transformatif.

Amrullah Ahmad dalam Triatmo (2022) mendefinisikan dakwah sebagai menyeru manusia untuk masuk dalam sistem Islam (*sabilillah*) baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, sebagai ikhtiar muslim untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, kelompok, maupun masyarakat umum, yang dilakukan secara berjamaah, sehingga terwujud *khairu ummah*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dakwah pembebasan menuntut pendakwah untuk lebih melakukan dakwah dengan perbuatan nyata (*dakwah bil haal*) dari pada dakwah di mimbar-mimbar (*dakwah bil lisan*). Dakwah di mimbar mungkin tetap diperlukan, tetapi lebih sebagai penunjang *dakwah bil haal*. Ahmad Watik Pratiknya dalam Triatmo (2014), menyatakan bahwa dakwah memiliki dua fungsi, yaitu; fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Fungsi kerisalahan adalah fungsi untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh manusia, sehingga semua manusia memahami ajaran Islam. Fungsi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di antara sahabat Nabi adalah Mushab bin Umair yang pernah diutus Nabi untuk berdakwah di Madinah pada saat setelah perjanjian Aqobah I. Sedangkan fungsi kerahmatan dakwah adalah fungsi mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, sehingga Islam dapat dirasakan kehadirannya sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dilihat dari perspektif metode dakwah tersebut, dakwah pembebasan sangat berhajat pada dakwah bil haal. Sebagai sebuah contoh, nilai sosial Islam seperti;

penegakan nilai egalitarianisme, keadilan, anti diskriminasi dalam Islam hanya bisa ditegakkan dengan dakwah bil haal. Pendakwah yang berupa lembaga dakwah secara langsung hadir di tengah masyarakat tertindas untuk mendampingi mereka, menguatkan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan, membukakan akses terhadap sumber daya dan seterusnya. Jika masyarakat miskin yang terpinggirkan oleh struktur sosial yang tidak memihak mereka, maka dakwah juga harus berupaya mengubah struktur sosial yang ada menjadi yang lebih berkeadilan. Langkah-langkah yang demikian adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dakwah pembebasan bisa diartikulasikan dalam bentuk dakwah pemberdayaan masyarakat. Dakwah pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah yang mendampingi masyarakat tertindas sebagai upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian (Azis, 2009).

Jika penyebab ketidakberdayaan masyarakat karena struktur yang kurang berkeadilan, maka tugas dakwah pembebasan tentu saja harus siap melakukan upaya-upaya struktural, mulai dari diplomasi, lobyng, hingga bernegosiasi, bahkan juga aksi, sehingga tegak struktur sosial-ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian dakwah pembebasan harus bersifat proaktif, progresif, kritis, dan revolusioner.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis, artinya novelty atau temuan penelitian merupakan hasil konstruksi peneliti yang dilakukan dalam koridor metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga bersifat naturalistik, artinya peneliti tidak melakukan intervensi maupun rekayasa terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian akan dibiarkan sealamiah mungkin. Sedangkan peneliti hanyalah outsider yang akan melaporkan hasil penelitiannya secara apa adanya.

Penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*) dengan alasan kenyataan sosial yang diangkat dalam penelitian ini bersifat kasuistik-kontekstual. Apa yang terjadi dalam kenyataan sosial dalam kasus penelitian ini bersifat khas, kontekstual dan tidak universal. Pendekatan dakwah bil hal (pemberdayaan) yang dilakukan terhadap petani Padi Rojolele berbasis atas konteks sosial budaya Desa Delanggu. Temuan penelitian ini tidak secara otomatis bisa diimplementasikan di daerah lain.

Adapun penelitian ini berjalan dengan desain sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan

Penelitian pendahuluan digunakan untuk mendapatkan pemahaman awal terhadap subjek penelitian. Bertolak pada hasil penelitian pendahuluan ini proposal penelitian ini dapat dibuat.

2. Review Proposal

Pada tahap ini proposal direview oleh team reviewer independent yang dijadikan partner oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Reviewer memberikan masukan yang signifikan terhadap proposal yang disusun. Di antara masukan tersebut adalah untuk memasukkan dimensi dakwah dalam penelitian, serta menghilangkan dimensi pemberdayaan yang

semula tertulis dalam proposal. Alasan reviewer menghilangkan pemberdayaan, karena pemberdayaan dianggap lebih pas untuk proposal pengabdian pada masyarakat. Peneliti juga berdiskusi dengan beberapa pihak yang lebih pantas disebut narasumber atau pembahas. Bagi peneliti, tahap ini juga merupakan pembekalan sebelum akhirnya penelitian dilaksanakan ke lapangan.

### 3. Pembuatan Instrumen Penelitian

Pada tahap ini pendalaman terhadap teori penelitian dilakukan, untuk kemudian dapat diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam instrument penelitian. Sekalipun peneliti sadari bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama. Artinya adalah peneliti dapat “menyesuaikan” instrument yang telah dirumuskan karena menyesuaikan kenyataan di lapangan.

### 4. Pengumpulan Data

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Langkah pertama adalah menemui key person komunitas Sanggar Rojolele, yang bernama Eksan, pria berumur 40 tahunan, energik dan berwawasan luas utamanya tentang pertanian yang maju. Untuk selanjutnya dengan rekomendasi Mas Ikhsan pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan teknik *deep interview* dan observasi. Saat di lapangan ini di samping pengumpulan data juga dilakukan analisis data, dan bahkan menyesuaikan proposal yang ada dengan kenyataan di lapangan. Pengumpulan data ini dianggap selesai saat tercapai data jenuh. Tidak ada lagi hal yang baru yang didapatkan dari pengumpulan data.

### 5. FGD Seminar Hasil

Pada tahap ini hasil penelitian yang berupa laporan sementara akan didiskusikan dalam bentuk FGD. Dari tahap ini, banyak masukan disampaikan dari para peserta FGD untuk penyempurnaan perumusan laporan hasil penelitian yang final.

6. Penyerahan Laporan ke LP2M

Laporan penelitian yang sudah final dapat diserahkan ke LP2M.

**B. Jenis Data**

Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi dengan sumber data (informan) penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung, yang diperoleh dari berbagai media masa maupun hasil penelitian yang relevan. Adapun cakupan data yang dibutuhkan adalah:

1. Kondisi sosial-geografis Desa Delanggu khususnya yang terkait secara langsung dengan latar belakang sosial-geografis keberadaan petani yang tergabung di Sanggar Rojolele.
2. Kondisi pertanian para petani anggota Sanggar Rojolele sebelum beralih kembali menjadi petani Rojolele. Keadaan yang dimaksud mencakup kegiatan pertanian (cara tanam, cara mendapatkan benih, pupuk, obat dan penjualan hasil pertanian, hubungan dengan tengkulak, hasil pertanian, dan seterusnya. Data ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran persoalan pertanian di bawah hegemoni kapitalisme di Desa Delanggu.
3. Kegiatan Sanggar Rojolele. Kegiatan ini mencakup pendampingan, pelatihan, hingga advokasi yang dilakukan oleh Sanggar, sehingga kegiatan petani padi Rojolele dapat bertahan ditengah hegemoni kapitalisme.
4. Kegiatan petani padi Rojolele. Dari aspek ini didapatkan data tentang jenis pekerjaan petani rojolele dari cara mendapatkan lahan pertanian, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, masa panen, hingga penjualan produk pertanian. Tidak lupa kesulitan yang ditemui petani, hingga agenda ke depan untuk pertanian Padi Rojolele di Desa Delanggu.
5. Latar belakang para aktivis tani padi Rojolele Desa Delanggu. Sebuah lembaga tidak lepas dari akar dan latar belakang aktivisnya. Latar belakang aktivis inilah yang akan mewarnai perkembangan Sanggar maupun kegiatan pertanian di Desa Delanggu di masa yang akan datang.

6. Keterlibatan berbagai stake holder penguatan pertanian di Desa Delanggu, baik dari sisi pemerintah maupun perguruan tinggi. Dari pemerintah, didapatkan informan Kepala Desa, Camat, dan Petugas Pertanian Lapangan (PPL) Tingkat UPT Kecamatan Delanggu. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting terhadap ketahanan petani Rojolele di Desa Delanggu. Adapun dari unsur Perguruan Tinggi diperoleh informan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang saat ini menjadikan pemberdayaan Petani Rojolele Desa Delanggu sebagai lembaga /perusahaan tempat implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Fakultas Pertanian UNS.

### **C. Teknik Sampling**

Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber data (informan). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling. Yaitu pemilihan informan berdasarkan maksud wawancara. Informan yang ditunjuk adalah orang yang dipandang memiliki data yang hendak dikumpulkan. Informan satu biasanya merekomendasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Demikian seterusnya sehingga didapatkan data dari sejumlah informan yang cukup lengkap.

### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari;

1. Pendiri sekaligus pengurus Sanggar Rojolele yang Bernama Eksan Hartanto.
2. Petani anggota Sanggar Rojolele sebanyak lima orang.
3. Kepala Desa Delanggu.
4. Camat Delanggu.
5. Pengusaha penggilingan beras sekitar Delanggu satu orang.
6. Tuan tanah (pemilik sebagian besar lahan), satu orang.
7. Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan.
8. Pendamping pemberdayaan Sanggar.
9. Wakil dari Perguruan Tinggi satu orang.

Di samping berupa informan, sumber data penelitian ini juga berupa kegiatan, yang meliputi;

1. Kegiatan pertanian para petani padi Rojolele itu sendiri dari penyiapan lahan, perawatan tanaman, hingga panen tiba,
2. Kegiatan sanggar,
3. Proses pemberdayaan yang dilakukan, baik berupa rapat-rapat yang diselenggarakan, hingga pelatihan yang diadakan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara mendalam (deep interview)  
Wawancara dilakukan kepada hampir informan yang disebut di atas. Beberapa informan (pendiri dan aktivis Sanggar serta beberapa petani Sanggar) diwawancara beberapa kali.
2. Observasi  
Observasi dilakukan terhadap kegiatan sanggar, seperti pertemuan rutinselapanan anggota sanggar, kegiatan pembuatan pupuk kompos bersama oleh anggota Sanggar, hingga penjualan hasil pertanian berupa beras Rojolele Delunggu.
3. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencermati arsip dan dokumen hasil rapat, kegiatan-kegiatan sanggar, hingga kegiatan pertanian petani Rojolele yang sudah berjalan selama ini.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid digunakan teknik triangulasi data, yang meliputi triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah mengkonfirmasi hasil wawancara dari satu informan dengan informan yang

lain. Triangulasi metode, adalah mengkonfirmasi data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya. Dengan teknik triangulasi ini akan didapatkan data yang sah.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya sudah dimulai ketika penentuan jenis data dan proses pengumpulan data. Penentuan jenis data sudah didasarkan pada pertimbangan rasional peneliti, inilah bagian dari analisis data dalam penelitian kualitatif.

Namun demikian, secara umum setelah data terkumpul analisis akan dilakukan melalui tahap:

1. **Mentranskrip data**

Adalah kegiatan menulis hasil wawancara yang berupa rekaman audio, atau hasil observasi berupa catatan-catatan observasi ke dalam bentuk data verbatim.

2. **Mereduksi data**

Yaitu membuat koding atas data verbatim, sehingga akan tersaring data yang dibutuhkan terpisah dengan data yang tidak dibutuhkan.

3. **Menentukan tema**

Berdasarkan koding yang dilakukan, maka kegiatan analisis dilanjutkan dengan mengorganisasikan koding data dalam kelompok tema-tema, sehingga akan diperoleh gugusan tema yang sistematis, sekaligus membantuk jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sampai tahap ini, jika dirasa ada data yang kurang, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang kurang, sehingga data lengkap sesuai dengan kebutuhannya.

4. **Membuat Kesimpulan**

Perumusan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis. Kesimpulan akan lahir secara alamiah seiring dengan langkah-langkah analisis.



## **BAB IV**

### **PROFIL DESA DELANGGU DAN SANGGAR ROJOLELE**

#### **A. Profil Desa Delanggu**

Desa Delanggu satu di antara 16 desa di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Posisi Delanggu berjarak 17 km dari ibukota kabupaten. Meski jarak Desa Delanggu dari kota kabupaten cukup jauh jika dibanding dengan desa-desa lainnya, namun desa ini lebih dekat ke ibukota Kecamatan Delanggu. Desa Delanggu sekaligus sebagai ibukota Kecamatan Delanggu. Desa Delanggu berbatasan dengan desa-desa lain, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepanjen, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Krecek, sebelah barat berbatasan Desa Gatak, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sabrang. Desa Delanggu dilewati jalan raya Solo Yogyakarta. (BPS Kabupaten Klaten, 2020).

Sementara itu, Kabupaten Klaten secara umum berbatasan dengan dataran lereng merapi di sebelah barat laut. Wilayah utara Kabupaten Klaten merupakan sentra tanaman padi. Di bagian selatan daerah yang relatif kering berupa dataran pegunungan Seribu di mana batuan kapur menjadi ciri khas pegunungan ini.

Gambar 4.1 Peta Desa Delanggu



Sumber : Dokumentasi Desa Delanggu

Kabupaten Klaten berada pada ketinggian (*altitudes of city*) 75 meter di atas permukaan laut, dengan luas area 655,56 kilometer persegi, dengan letak ibukota kabupaten berada dijalur utama Solo-Yogyakarta. Kabupaten Klaten dikenal memiliki varian beras Rojolele Srinuk dan Srinar. Varietas tersebut merupakan varietas turunan Rojolele, padi unggul asli Klaten. Di antara salah satu sentra penghasil Rojolele Srinuk berasal dari Desa Delanggu.

Saat ini varietas padi Srinuk dan Srinar hanya boleh ditanam oleh petani Klaten. Pembatasan hak tanam tersebut menyusul setelah pemerintah Kabupaten Klaten memiliki hak paten padi Rojolele varietas Srinuk dan Sriten dari Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Beras padi ini lantas dipasarkan salah satunya kepada aparatur sipil negara (ASN) setelah terbitnya instruksi Bupati Klaten. Program ini sudah berjalan sejak 2021 lalu. Pendistribusian beras Rojolele kepada para ASN dilakukan oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Klaten, PT Aneka Usaha Klaten.

Wilayah Kecamatan Delanggu terletak di jalur yang strategis, sebagai jalur lintas Solo-Yogya. Kecamatan Delanggu sebagai daerah penyangga memiliki peran penting sebagai kawasan perkotaan dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan dan permukiman perkotaan sesuai dengan rencana struktur ruang Kabupaten Klaten. Daerah ini terus mengalami perkembangan relatif cepat dibanding dengan daerah sekitarnya. Kecamatan Delanggu memiliki area perumahan yang cukup banyak. Pada tahun 2014 luas wilayah Delanggu sebesar 1.329 hektar tanah sawah dan sebesar 548 Hektar tanah kering. Pada tahun 2020 luas wilayah Delanggu mengalami pengurangan fungsi tanah, yaitu menjadi 1.314 hektar tanah sawah dan sebesar 564 hektar terbagi kedalam lahan tanah kering (Suherman, 2021). Dengan demikian lahan pertanian mengalami penyempitan bersamaan dengan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi permukiman maupun komersil.

Desa Delanggu merupakan ibukota Kecamatan Delanggu, memiliki luas 137,125 hektar yang terbagi menjadi 14 padukuhan. Secara administrasi, Desa Delanggu dibagi menjadi 11 RW dan 30 RT. Saat ini Desa Delanggu dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Purwanto. Dalam struktur aparat pemerintahan Desa Delanggu, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa yaitu Bapak Heri Utama dan terdapat dua Kepala Seksi (Kasie) yaitu Kasie. Pemerintahan yang dijabat oleh Bapak Tuhu Legiyono, dan Kasie. Pelayanan dijabat oleh Bapak M. Darussalam. Selanjutnya Sekretaris Desa dibantu oleh dua Kepala Urusan (Kaur) yaitu Bapak Maryana selaku Kaur Umum dan Perencanaan, serta Ibu Wara Santi selaku Kaur. Keuangan. Adapun terdapat tiga Kepala Dusun (kadus) yaitu Bapak Imam, Ibu Diyah Ayu dan Bapak Suharsono. Fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 11 orang (Monografi Desa Delanggu, 2021).

Desa ini memiliki jenis tanah regosol kelabu yaitu tanah campuran antara tanah liat dengan batuan kapur serta lapisan kelabu yang berasal dari abu gunung berapi saat meletus beberapa ratus tahun yang lalu. Jenis tanah regosol banyak

mengandung mineral, serta sifat tanahnya menjadi gembur. Jenis tanah tersebut merupakan tanah yang cocok untuk sektor pertanian. Tanah basah berupa tanah persawahan terletak di sisi tengah desa dan tanah kering melingkari persawahan sehingga ada letak RW yang terpisah. Dengan latarbelakang jenis tanah ditunjang oleh sumber mata air yang mengandung mineral cukup, maka Desa Delanggu khususnya, Kecamatan Delanggu dan sekitarnya pada umumnya, sejak jaman dahulu dikenal sebagai daerah penghasil padi kelas premium.

#### 1. Demografi Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Delanggu pada tahun 2020 sebesar 43.661 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.325 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara kepadatan penduduk di Desa Delanggu adalah 3.983 yang merupakan angka tertinggi di Kecamatan Delanggu. Tingkat aksesibilitas Kecamatan Delanggu yang sangat tinggi, menjadikan daerah ini memiliki daya tarik bagi masyarakat luar. Banyak investor dari luar Delanggu yang berminat untuk berinvestasi membangun perindustrian, membangun permukiman atau perumahan di wilayah Kecamatan Delanggu.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pada daerah Kecamatan Delanggu yang beragam, seperti; pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat aksesibilitas daerah, dan fasilitas sarana prasarana. Sebagai ilustrasi, pertambahan penduduk di daerah Kecamatan Delanggu sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 sebesar 4.187 jiwa. Hal tersebut disebabkan karena adanya angka kelahiran dan migrasi. Khusus Desa Delanggu untuk angka kelahiran di tahun 2021 sebesar 194 jiwa. Kepadatan penduduk ini telah menyebabkan perubahan guna lahan. Sementara itu, kepadatan penduduk dipengaruhi oleh kurangnya pemerataan penduduk, urbanisasi dan lapangan kerja.

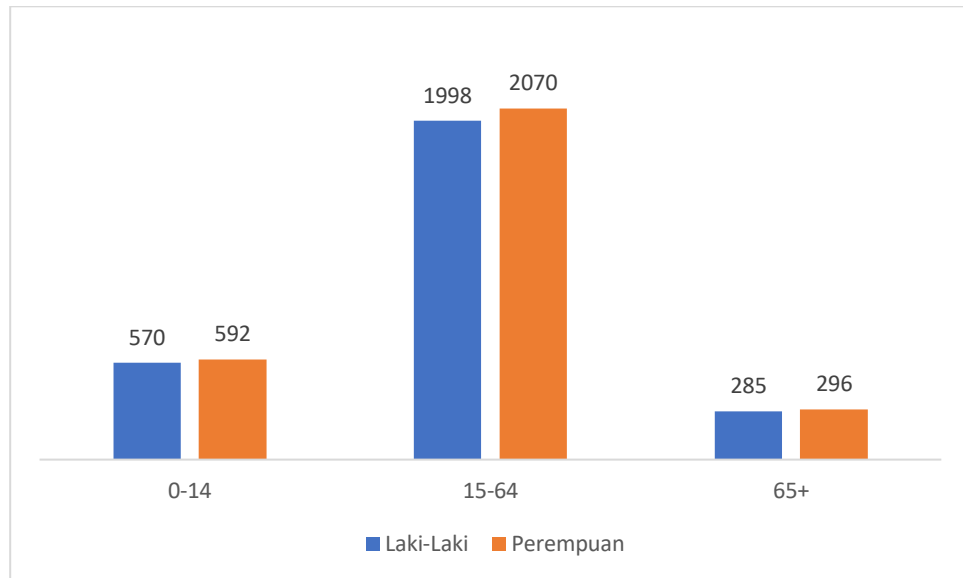
Menurut penelitian Suherman, ada beberapa desa yang mengalami perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh tingkat aksesibilitas, yaitu Desa Delanggu, Desa Banaran, Desa Gatak, Desa Dukuh, dan Desa Mendak. Perubahan tersebut

dikarenakan tersedianya tingkat sarana dan prasarana yang baik dan lengkap. Ditunjang oleh beberapa aspek sarana dan prasarana yang tersedia seperti, sarana transportasi, kesehatan dan pendidikan, maka terjadilah apa yang disebut perubahan guna lahan (Suherman, 2021). Itulah sebabnya, mengapa luas area untuk pertanian di Desa Delanggu berkurang dari tahun ke tahun.

Jika merujuk data kepadatan penduduk ( $\text{Km}^2$ ) Kecamatan Delanggu dari data BPS Kabupaten Klaten tahun 2018-2020, diketahui bahwa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Delanggu, desa yang memiliki wilayah paling luas adalah Desa Banaran yaitu  $1,85 \text{ km}^2$ . Adapun Desa Delanggu memiliki wilayah paling luas ke-3 setelah Desa Banaran dan Desa Sribit. Sementara itu desa yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Desa Krecek dan Sabrang dengan luas  $0,91 \text{ km}^2$ .

Dilihat dari jumlah penduduk, desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Delanggu dengan jumlah masyarakat sebanyak 5.457 orang. Sementara itu, desa yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu Desa Butuhan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.512 jiwa. Kemudian dari segi kepadatan penduduk, desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Desa Sabrang. Sementara itu, Desa Delanggu menempati posisi kedua paling padat penduduknya setelah Desa Sabrang. Grafik dibawah ini memperjelas diskripsi demografi penduduk Desa Delanggu.

Grafik 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Desa Delanggu



Sumber: Diolah dari Monografi Desa Delanggu, 2021

Berdasarkan grafik 4.1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Delanggu terdiri dari 2.853 orang laki-laki dan 2.958 orang perempuan. Jika dilihat dari usia, penduduk Desa Delanggu dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu penduduk usia produktif dan penduduk non produktif. Rentang usia produktif yaitu 15 tahun hingga 64 tahun sedangkan usia tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Dari sejumlah 5.811 penduduk, Desa Delanggu didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu sebanyak 4.068 orang atau sebesar 70% dari total penduduk. Sementara itu, penduduk yang termasuk kategori tidak produktif sebanyak 1.743 orang (30%). Dengan demikian, pada tahun 2021 Desa Delanggu memperoleh bonus demografi karena penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

## 2. Sosial, Budaya dan Ekonomi

Dari sekian faktor yang membedakan antara desa dan kota, maka jenis mata pencaharian merupakan faktor pembeda yang pokok dan penting. Bahwa pertanian

dan usaha-usaha kolektif adalah merupakan ciri kehidupan ekonomi pedesaan. Sermentara itu, berdasarkan ukuran komunitas dan kepadatan penduduknya, dapat dijelaskan bahwa ukuran komunitas desa lebih kecil dibandingkan dengan komunitas kota (Raharjo, 1999). Kunci karakteristik desa dan kota adalah pertanian. Tingkat kepadatan penduduk desa lebih rendah dari masyarakat kota, karena mata pencaharian kehidupan penduduk desa dari pertanian, sedangkan sektor pertanian memerlukan lahan yang luas, lebih dari masyarakat kota pada umumnya.

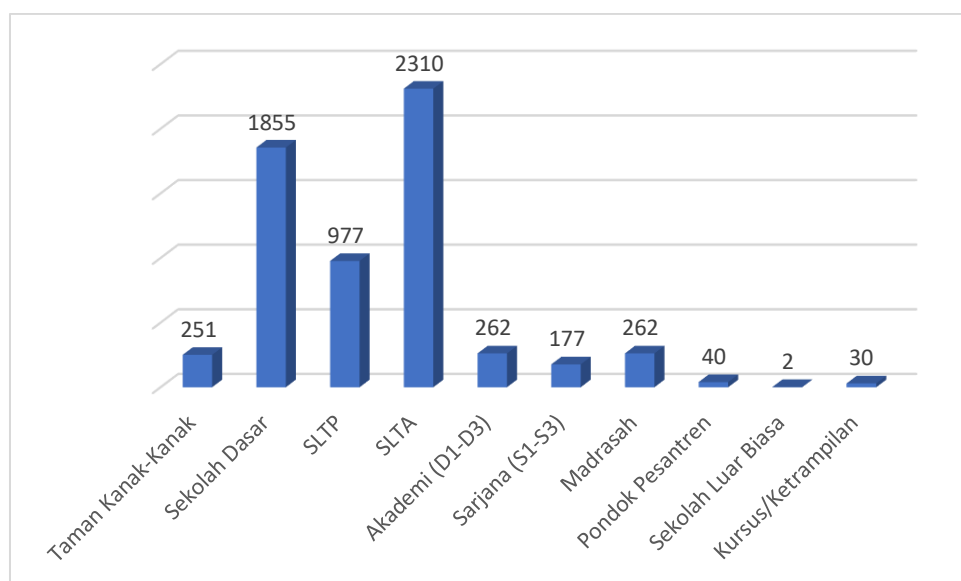
Tradisi pertanian Desa Delanggu khususnya dan Delanggu Raya pada umumnya sudah berlangsung sejak lama. Delanggu memiliki jenis tanah regosol yaitu jenis tanah yang mengandung banyak unsur vulkanik gunung berapi. Jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang sangat subur untuk pertanian maupun perkebunan. Atas dasar kondisi geografis tersebut, Delanggu memiliki tradisi pertanian sejak dahulu kala. Dengan hadirnya penjajah Belanda, Delanggu dipilih menjadi daerah sentra pertanian dan perkebunan. Padi Rojolele merupakan varietas padi paling baik adalah tanaman khas petani Delanggu, sehingga Rojolele menjadi varietas unggul yang melegenda. Setelah penjajah belanda datang, kecuali sebagai penyangga pangan dengan pertaniannya, Delanggu khususnya dan Klaten pada umumnya juga dijadikan sentra perkebunan. Tanaman tembakau, tebu (bahan baku gula) dan kemudian menyusul rosele (bahan baku karung goni) menjadi tanaman perkebunan di Delanggu sejak awal abad 20 (Fitrianto, 2017).

Berangkat dari kondisi geografis yang subur, serta posisi Delanggu sebagai pusat pertanian dan perkebunan inilah yang kemudian pada tahapan berikutnya Delanggu menjadi daerah yang masyarakatnya mengalami transformasi sosial yang lebih cepat dari daerah lainya di Pulau Jawa. Sejak awal abad 20 itulah, di samping sebagai petani, sebagian masyarakat Delanggu juga menjadi buruh industri di pabrik gula maupun pabrik goni. Dari sinilah akar dari dinamika sosial budaya masyarakat Delanggu dimulai.

Masyarakat Desa Delanggu memiliki tradisi bukan saja sebagai petani dengan varietas padi Rojolele, tetapi juga memiliki akar tradisi sebagai buruh pabrik gula

maupun goni. Banyak pabrik gula dibangun di sekitar Delanggu, Klaten, antara lain; Pg. Ceper, Pg. Gondang Winangun, Pg. Modjo, Pg. Tasikmadu, Pg. Kalibagor dan Pg. Colomadu. Di samping itu ada satu pabrik karung goni yang sangat besar di Delanggu. Pabrik karung ini dibangun di atas tanah 17 Ha, dengan memperkerjakan lebih dari 15.000 pekerja (buruh) (Fitrianto, 2017). Keberadaan pabrik-pabrik ini tentu saja berpengaruh terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Delanggu. Sebagai buruh pabrik, masyarakat Delanggu dikenal memiliki daya kritis, keberanian untuk berserikat, serta giat dalam pergerakan politik. Pada tahun 1946 berdiri Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dengan 31 anggota serikat buruh. Diantaranya yang ada di Delanggu adalah Serikat Buruh Perkebunan (Sarbupri) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Dua organisasi buruh yang punya afiliasi terhadap PKI. Ada kisah protes besar-besaran yang cukup melegenda terjadi di Klaten, yaitu demonstrasi buruh pabrik karung goni yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia yang melibatkan kedua serikat buruh tersebut. Latar belakang sosial budaya yang demikian ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Desa Delanggu yang terjadi pada saat-saat sekarang ini.

Gambar 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Delanggu Tahun 2021



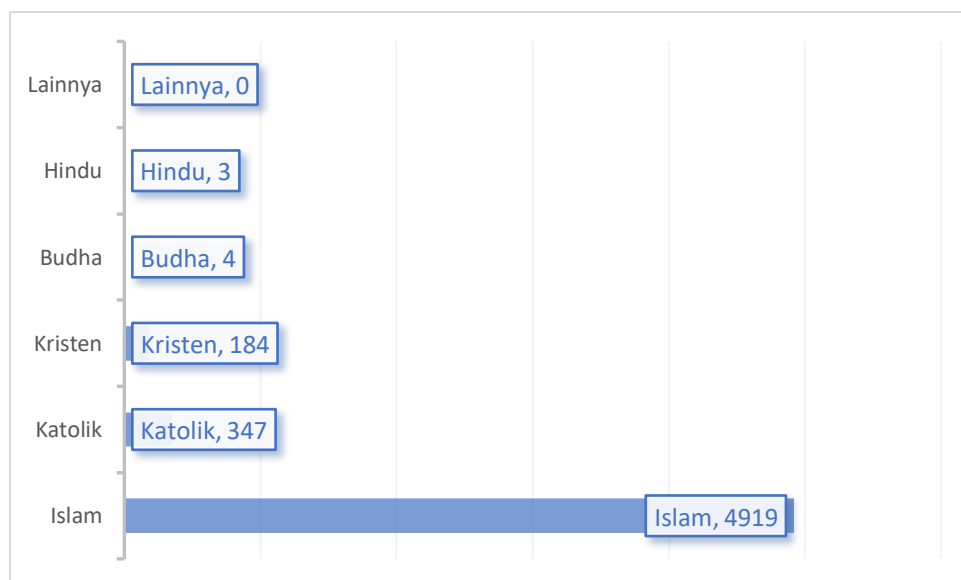
Sumber: Diolah dari Monografi Desa Delanggu, 2021



Dari data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, dapat diketahui masih banyak anggota masyarakat yang menempuh pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi. Kebanyakan mereka memiliki tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Berdasarkan data, bahwa jumlah terbanyak adalah lulusan SLTA sebesar 2.310 jiwa. Kemudian lulusan Sekolah Dasar dengan jumlah 1.855 jiwa. Jumlah lulusan pendidikan SLTP sebesar 977 jiwa sedangkan lulusan Akademi berjumlah 262 jiwa dan lulusan Sarjana sebesar 177 jiwa. Sektor pendidikan khusus, lulusan madrasah sebesar 262 jiwa, lulusan pondok pesantren sebesar 40 jiwa, lulusan kursus sebesar 30 jiwa dan Sekolah Luar Biasa dua orang.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa, dari sudut pandang pendidikan, masyarakat Desa Delanggu bukanlah masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hampir sama dengan tingkat pendidikan daerah atau desa lainya di Indonesia. Kebanyakan mereka lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hanya sedikit yang lulus dari perguruan tinggi sebagai sarjana.

Gambar 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2021

Data pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Delanggu yang terdiri dari 16 desa memiliki keberagaman dalam hal agama penduduknya. Namun demikian, dari tabel tersebut diketahui bahwa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di 16 desa yaitu agama Islam yang pada tahun 2018 sebanyak 40.703 orang, tahun 2019 berjumlah 40.061 orang dan tahun 2020 sebanyak 38.010 orang. Sementara itu, agama dengan jumlah pemeluk paling sedikit yaitu agama Budha. Terdapat majelis ta'lim sebanyak 16 kelompok dengan 360 anggota serta remaja masjid dengan 785 anggota. Majelis Gereja satu kelompok dengan 55 anggota dan remaja gereja terdapat dua kelompok dengan 250 anggota.

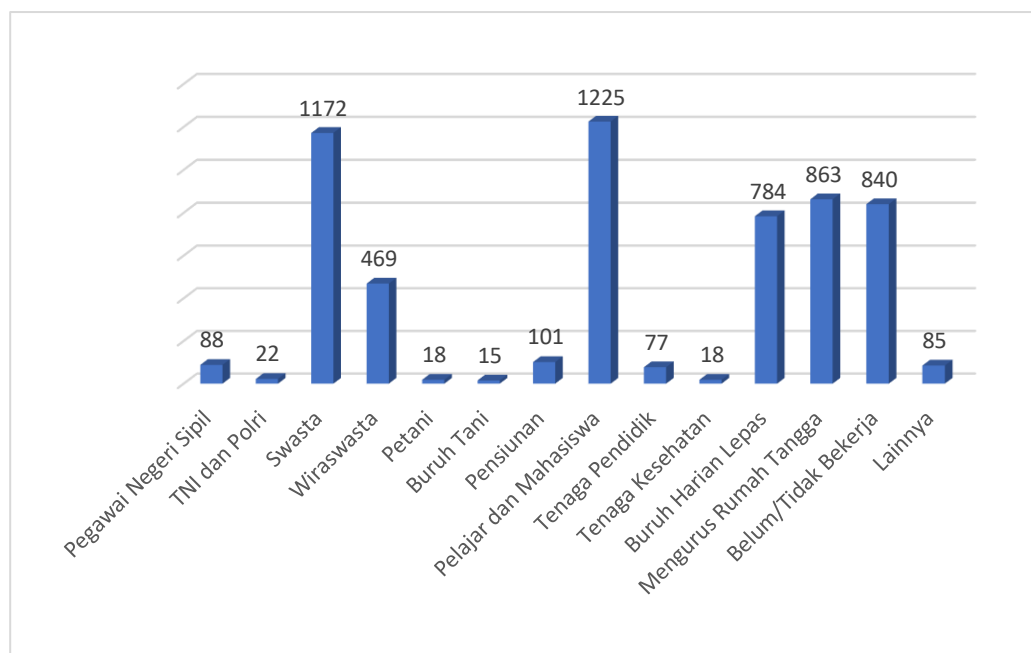
Salah satu aset keagamaan yang dimiliki masyarakat desa adalah masjid, mushola dan langgar. Desa Delanggu memiliki Masjid sebanyak 13, dan jumlah Mushola satu. Desa Delanggu memiliki satu Gereja. Masyarakat desa mengartikan masjid berbeda dengan mushola atau langgar. Masjid merupakan bentuk bangunan yang lebih besar daripada mushola dan langgar. Masjid digunakan sebagai tempat ibadah bagi muslim, baik sholat lima waktu maupun sholat Jum'at. Sementara itu mushola dan langgar tidak untuk sholat Jumat.

Secara umum mayoritas masyarakat Desa Delanggu beragama Islam. Namun demikian corak keberagaman masyarakat Delanggu bersifat heterogen, mulai dari yang tradisional hingga modern. Hal ini dapat dilihat dari aneka ragamnya budaya keagamaan yang ada. Di Delanggu dapat dengan mudah ditemui kegiatan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), madrasah diniyah, tahlilan, hingga barjanji. Di Delanggu juga banyak ditemui akulturasi budaya Jawa dan Islam, seperti *slametan* dan *mitoni* untuk menyukuri kehamilan seorang perempuan. Banyak juga *slametan* yang berkaitan dengan peringatan hari kematian, seperti *nelung dino*, *mitung dino*, *matang puluh*, *nyatus*, *nyewu* dan *mendak*.

Desa Delanggu pada tahun 2021 ditetapkan sebagai rintisan desa ramah budaya di Kabupaten Klaten oleh Dewan Kesenian atau Wankes Kabupaten Klaten. Peresmian berlangsung hari Selasa malam tanggal 21 Desember 2021 di Sanggar Rojolele Dukuh Kaibon, Desa Delanggu. Sebagai rintisan desa ramah budaya, Desa

Delanggu adalah satu-satunya desa di Kabupaten Klaten yang sudah membuat peraturan desa (perdes) tentang pemajuan kesenian daerah di desa. Acara peresmian dimeriahkan berbagai pentas seni yang dikemas dalam bentuk Festival Mbok Sri Mulih (FMSM) oleh anak-anak Sanggar Rojolele Delanggu. Selain itu juga dilaksanakan pemutaran film potensi Desa Delanggu dan film Sri yang menggambarkan kegiatan tanam padi Rojolele sebagai padi unggulan Desa Delanggu. Festival Mbok Sri Mulih (FMSM) adalah sebuah pertunjukan seni yang dilaksanakan secara kolosal oleh masyarakat atas inisiasi Sanggar Rojolele di Delanggu. FMSM ini dilakukan bukan semata ingin *nguri-uri* budaya Jawa yang adiluhung, tetapi juga untuk membangkitkan semangat nostalgia masa lalu Delanggu sebagai produsen padi Rojolele. Semangat ini penting untuk mengembalikan *icon* Delanggu sebagai penghasil beras premium di Indonesia.

Gambar 4.4 Desa Delanggu Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021

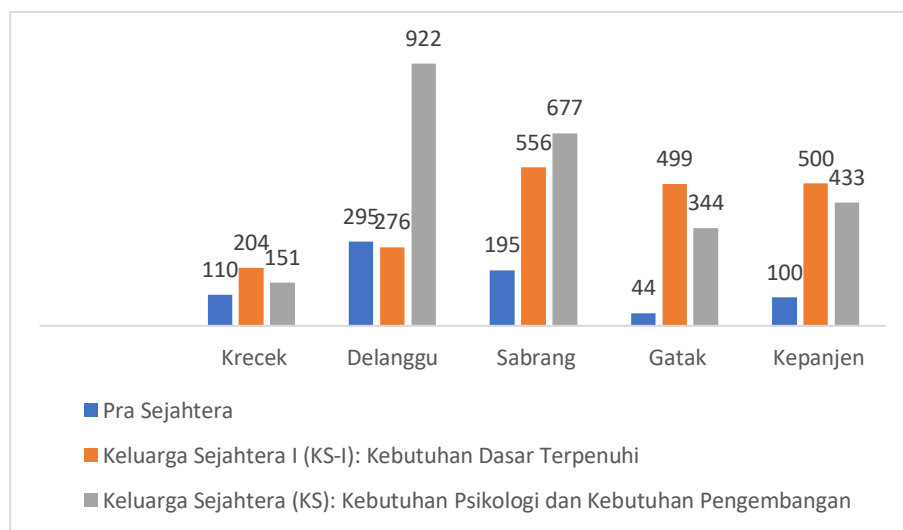


Sumber: Diolah dari Monografi Desa Delanggu, 2021

Berdasarkan data, bahwa penduduk Desa Delanggu bekerja dalam berbagai sektor, mulai dari ASN, wirausahawan, hingga pengangguran. Sektor swasta

menyerap tenaga kerja terbanyak sebesar 1.172 jiwa dan buruh harian lepas berjumlah 784 jiwa. Adapun yang seharusnya membuat prihatin adalah pekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar di Desa Delanggu. Namun demikian jumlah untuk profesi sebagai petani hanya sebesar 18 jiwa dan sebagai buruh tani sebesar 15 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan telah terjadi mobilitas penduduk secara vertikal, di mana terjadi perubahan status seseorang, seperti pada tahun 2021 saat ini seseorang bekerja pada bidang pertanian, namun pada beberapa tahun kemudian berubah menjadi pedagang. Faktor perubahan vertikal tersebut terutama disebabkan adanya banyak faktor yang tidak mendukung profesi petani. Atau sebaliknya, banyak faktor di luar pertanian yang lebih menggiurkan, sehingga seseorang berhenti menjadi petani dan pindah ke bidang yang lebih menarik tersebut.

Gambar 4.5. Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Desa Delanggu dan Desa Sekitar Kecamatan Delanggu Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa dari 13.636 keluarga di Desa Delanggu, masih memiliki status ekonomi kurang mampu. Hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang masuk kategori pra sejahtera sebanyak 922 keluarga pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan desa sekitar di Kecamatan Delanggu, maka Desa Delanggu termasuk memiliki jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat (Banowati, 2013). Jika dalam suatu masyarakat terdapat kesenjangan (disparitas) status ekonomi yang cukup lebar, maka di desa tersebut memiliki cukup potensi akan munculnya persoalan-persoalan sosial. Oleh karena itu, Desa Delanggu sebenarnya di samping memiliki permasalahan sosial umum sebagai akibat letaknya yang strategis dan dekat dengan ibukota kecamatan, ditambah lagi potensi permasalahan sosial sebagai akibat dari adanya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat seperti digambarkan dalam grafik tersebut.

Sebagai desa perkotaan, maka permasalahan perkotaan seperti bahaya narkoba, kenakalan remaja, hingga kriminalitas, mulai bisa ditemukan di Desa Delanggu. Sebagai respon pemerintah, maka Desa Delanggu baru-baru ini terpilih sebagai desa paling awal di Kecamatan Delanggu yang dicanangkan sebagai desa tangguh narkoba (P. Suseno, 2022).

Permasalahan lain Desa Delanggu adalah kesenjangan antara pertambahan jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di desa ini luas tanah pertanian hampir sebanding dengan tanah kering untuk pemukiman. Sementara jika dibanding jumlah penduduk dan tenaga kerja yang tersedia, kesempatan untuk bekerja di sektor pertanian terbuka lebar. Namun yang terjadi kemauan untuk menjadi petani atau petani penggarap sangat minim, karena profesi tani tidak menjanjikan dengan penghasilan yang cukup. Kebanyakan petani dan buruh tani menduduki posisi ekonomi tidak mampu.

Bagi masyarakat non pertanian, ada sebagian yang berprofesi di sektor swasta. Istilah ini meliputi orang yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan swasta, juga bekerja sebagai buruh pertukangan dan sebagai pedagang atau wiraswasta. Banyaknya alat transportasi menggambarkan tingginya mobilitas warga masyarakat Desa Delanggu. Hal ini mudah dipahami karena sebagian Desa

Delanggu termasuk kategori daerah perkotaan. Didapatkan data jumlah kepemilikan sepeda motor sebanyak 575 unit dan mobil pribadi 50 unit. Namun, kepemilikan alat transportasi baik sepeda motor maupun mobil tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya dikotomi antara golongan kaya dan miskin. Di jaman sekarang ini kepemilikan kendaraan bermotor sudah bukan lagi menjadi barang mewah atau tersier. Memiliki sepeda motor dan mobil seringkali dilandasi oleh sebuah kebutuhan.

### 3. Geografi dan Pertanian

Kondisi Geografi Desa Delanggu termasuk dataran sedang dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 153 M dan memiliki suhu udara rata-rata 28°C. Adapun sektor pertanian Desa Delanggu yang terbesar adalah padi. Delanggu mempunyai identitas sebagai penghasil beras Rojolele yang terkenal dengan keunggulan cita rasanya. Desa Delanggu dan desa-desa lain di Kecamatan Delanggu secara umum merupakan bagian daerah dataran rendah yang cukup luas. Dengan latar belakang dari dua gunung yang salah satunya masih aktif, yaitu Gunung Merapi dan Merbabu, lahan-lahan pertanian di daerah ini memiliki kandungan humus yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi irigasi menjadi faktor penting dalam pertanian. Dengan tersedianya sumber air dan saluran irigasi dengan kualitas dan kuantitas air yang cukup sebagaimana dibutuhkan di sektor pertanian, menjadikan daerah ini menjadi centra pertanian khususnya padi. Faktor kedekatan jarak area pertanian Delanggu dengan sumber air alami, seperti Umbul Cokro, Umbul Pongkok dan suplai air dari bendungan, menjadikan air pertanian di Delanggu memiliki kaya mineral. Faktor-faktor tersebut menjadikan Delanggu memiliki keunggulan untuk pertanian padi khususnya.

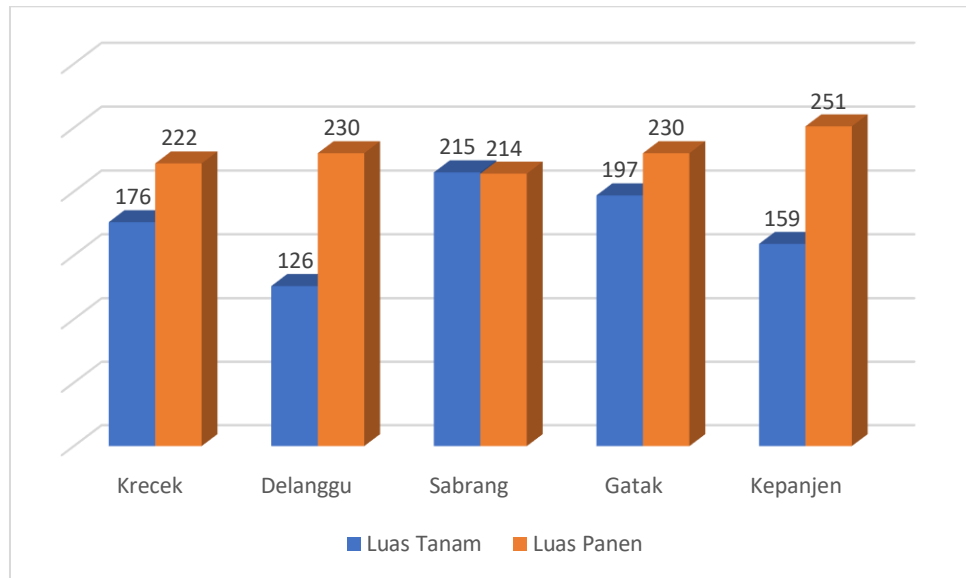
Menurut data Monografi pada tahun 2021 Desa Delanggu memiliki luas wilayah 132,29 Ha, terdiri dari tanah sawah 74,03 Ha dan tanah kering 58,26 Ha. Data ini menunjukkan jika wilayah Desa Delanggu masih didominasi areal persawahan sekitar 56 %. Persawahan di Desa Delanggu secara keseluruhan adalah sawah irigasi teknis yang potensi masa panen hingga tiga kali dalam setahun

(Monografi Desa Delanggu, 2021). Berdasar luas tanah garapan, secara umum petani di Jawa digolongkan ke dalam tiga kategori yakni petani gurem untuk luas sampai dengan 0,5 hektar, petani menengah untuk di atas 0,5 hektar yakni sampai dengan 1,00 hektar dan petani luas untuk diatas satu hektar (Cahyono, 1983). Berdasarkan klasifikasi tersebut, jumlah petani dan buruh tani Desa Delanggu yang mencapai 60 orang (tahun 2021), semuanya termasuk dalam klasifikasi petani gurem. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan lahan jelas merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam kerangka pengembangan usaha pertanian di Jawa Tengah umumnya, dan Kecamatan Delanggu khususnya.

Secara umum, lahan yang dimiliki petani semakin sempit, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Kenyataan tersebut berdampak pada kinerja dalam bidang pertanian yang jauh dari optimal. Hal ini dikuatkan oleh data nasional yang didasarkan pada hasil sensus pertanian, yang menunjukkan bahwa jumlah pertanian dalam kurun waktu 1983-2003 meningkat, namun dengan jumlah lahan pertanian yang menurun, sehingga rata-rata pemilikan lahan per petani menyempit dari 1,30 ha menjadi 0,70 ha per petani (Amanah & Farmayanti, 2014). Dengan luasan lahan usaha tani demikian, meskipun produktivitas per luas lahan tinggi namun tidak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan usaha petani,

Masyarakat petani Desa Delanggu terdiri dari buruh tani dan petani (pemilik lahan). Bagi buruh tani, mereka tidak mempunyai lahan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka hanya menjadi tenaga penggarap tanah milik orang lain, melalui sistem maro. Dengan sistim maro, biasanya penggarap membiayai biaya-biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Namun ada juga pemilik lahan yang memberikan dana (antara Rp 300.000-500.000) sebagai keperluan biaya operasional. Sementara ada sedikit orang kaya di Desa Delanggu yang memiliki hingga lebih dari 5 ha sawah. Kepada mereka inilah para petani penggarap harus membagi hasil pertaniannya sebagai konsekuensi dari “sewa” lahan.

Gambar 4.6. Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Padi Sawah Desa Delanggu dan Desa Sekitar Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020

Berdasarkan data di atas, Desa Delanggu dibandingkan desa-desa sekitar di Kecamatan Delanggu seperti Desa Kepanjen, masih tertinggal. Desa Kepanjen memiliki luas tanam maupun luas panen lebih tinggi dari Desa Delanggu. Jika melihat trend kenaikan Kecamatan Delanggu dari tahun 2018 mengalami penurunan untuk luas tanam padi di tahun 2019 hingga tahun 2020. Desa Delanggu memiliki potensi pertanian padi jika melihat dari luas panen tanaman padi. Terdapat trend kenaikan luas panen tanaman padi Kecamatan Delanggu di tahun 2018 sebesar 3.760 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 4.068 namun terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 3987.



## **B. Sanggar Rojolele**

### **1. Latar Belakang dan Sejarah**

Delanggu konon berasal dari dua kata “*dalan*” dan “*gung*”. “*Dalan*” berarti jalan, “*gung*” berarti agung. Jadi “*dalangung*” berarti jalan besar yang menghubungkan dua kota atau kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Delanggu berasal dari kata “*delangung*” yang berarti persawahan tempat para peternak menggiring itik-itik (Sundoro, 2020). Terlepas dari mana yang benar-benar sebagai asal kata dari Delanggu, namun keduanya sama-sama memiliki legitimasi realitas hingga saat ini. Jalan utama Solo-Yogya melintasi Delanggu. Hingga saat ini Delanggu benar-benar menghubungkan dua kota bekas dua kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Hingga saat ini pula Delanggu masih berstatus sebagai sentra beras premium untuk Klaten dan Jawa Tengah, bahkan Indonesia. “Beras Delanggu” masih menjadi *icon* beras di berbagai pasar beras di berbagai kota, Solo, Yogyakarta, bahkan sampai Jakarta.

Delanggu merupakan sebuah wilayah yang memiliki ciri khas dengan tanah persawahan yang subur. Di samping tanah sawah yang subur, area persawahan Delanggu juga dialiri oleh air kaya mineral yang bersumber dari umbul Cokro. Dengan modal sumber daya alam berupa kondisi tanah dan air tersebut, Delanggu dikenal sejak jaman dahulu hingga saat sekarang ini sebagai daerah penghasil padi varietas Rojolele premium. Dalam sejarahnya padi Rojolele asal Delanggu menjadi beras yang dikonsumsi oleh para Raja di Kraton Surakarta maupun Kraton Yogyakarta. Bahkan hingga saat ini, keluarga besar Kraton Yogyakarta masih mengonsumsi beras Rojolele Delanggu. “Saya masih diminta kirim 8-10 kuintal (beras Rojolele indukan) ke keluarga kraton Yogyakarta. Termasuk pabrik Madukismo itu dari saya berasnya.” (Wawancara dengan HR pada 15 Juli 2022). Atas dasar kenyataan sejarah tersebut, kemudian muncul *icon* Delanggu sebagai penghasil beras premium hingga sekarang ini.

Namun seiring dengan berjalannya revolusi hijau yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru, petani Delanggu mulai “tergiur” untuk ikut program

revolusi hijau tersebut. Petani Delanggu mengganti benih padi Rojolele indukan menjadi benih padi kualitas unggul yang ditawarkan oleh pemerintah melalui program revolusi hijau. Padi varietas baru memiliki usia tanam yang relatif pendek, sekitar 90 hari. Sementara itu pada Rojolele memiliki usia tanam 5-6 bulan sampai dipanen. Tentu saja dengan menanam padi varietas baru itu petani bisa panen tiga kali setahun. Sementara dengan padi Rojolele petani hanya panen satu hingga dua kali. Dampak dari revolusi hijau tersebut, padi Rojolele semakin ditinggalkan oleh petani Delanggu dan beras Rojolele mulai susah ditemukan di pasar. Seiring dengan keberhasilan program revolusi hijau dan hilangnya beras Rojolele dari pasar, *icon* Delanggu sebagai penghasil beras Rojolele kualitas premium ikut menghilang. Delanggu menjadi daerah penghasil beras biasa sebagaimana daerah lain, sekalipun beras asli Delanggu tetap memiliki cita rasa yang jauh lebih enak.

Prihatin akan hilangnya *icon* Delanggu tersebut, Eksan dan beberapa pemuda anak petani dari Desa Delanggu mulai berpikir mencari cara untuk mengembalikan *icon* Delanggu tersebut. Berbarengan dengan itu, Eksan juga mendapatkan semacam tawaran bantuan dana dari untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat. Sebagai syarat untuk menerima bantuan dana tersebut, masyarakat calon penerima bantuan harus sudah memiliki lembaga pengembangan seni budaya. Terdorong oleh dua hal tersebut, akhirnya Eksan Hartanto, demikian nama lengkapnya, adalah seorang pemuda asli Delanggu, mantan aktivis buruh pabrik industri di Batam, beserta beberapa pemuda lainnya dari Dukuh Kaibon Desa Delanggu mendirikan sanggar seni budaya yang mereka beri nama Sanggar Rojolele. Sebuah nama yang mereka harapkan mampu menggugah nostalgia para petani akan kejayaan Delanggu di masa lampau, sebagai penghasil beras kualitas premium Rojolele. Dengan nostalgia tersebut, para pendiri Sanggar Rojolele berharap petani Delanggu memiliki semangat untuk menanam kembali padi Rojolele.

Sanggar Rojolele adalah suatu perpaduan antara lembaga seni-budaya dengan budaya tani. Tidak langsung menjadi besar dengan peran yang berarti bagi masyarakat banyak, sebagai lembaga yang baru berdiri Sanggar Rojolele

melakukan peran sederhana. Masyarakat sekitar melihat Sanggar Rojolele dengan apatisme dan keraguan. Belum ada petani yang bergabung kecuali beberapa orang. Sikap masyarakat tersebut bisa pahami mengingat Eksan, sang pendiri dikenal bukan siapa-siapa, kecuali sebagai pemuda desa yang baru pulang dari kota rantau. Diantara kegiatan yang dilakukan Sanggar pada awal pendiriannya adalah mengadakan latihan tari untuk anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan jejaring yang Eksan bangun, Sanggar Rojolele kini berkembang menjadi ruang belajar, diskusi dan pergerakan masyarakat Desa Delanggu untuk membahas persoalan pertanian sebagai hajat utamanya (Rojolele, 2016).

Tidak banyaknya petani yang mau bergabung dengan sanggar ini di awal pendiriannya, kecuali disebabkan oleh *blueprint* Sanggar yang belum jelas kemanfaatannya bagi mereka, mungkin juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran petani untuk berkumpul dalam suatu institusi, apalagi Sanggar Rojolele merupakan institusi seni-budaya. Namun seiring perkembangan Sanggar, khususnya dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan pertanian, serta jejaring yang dibangun dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesejahteraan para petani, maka kini telah bergabung di Sanggar Rojolele tidak kurang dari dua kelompok tani dengan 60-an petani sebagai anggotanya.

Sebagai pendiri Eksan sadar bahwa, keberadaan pengurus sanggar sangat penting. Ia tidak mungkin untuk melakukan peran seorang diri. Oleh karena itu, Eksan mulai mendekati beberapa remaja, pemuda, dan petani di sekitar Dukuh Kaibon Desa Delanggu untuk dijadikan pengurus Sanggar Rojolele. Kepala Desa Delanggu sebagai Pembina, dan Eksan sendiri sebagai ketua Sanggar. Selengkapnya pengurus Sanggar Rojolele dapat dilihat di bagan berikut:

Gambar 4.7. Pengurus Sanggar Rojolele

EKSAN  
HARTANTO

Pendiri dan Inisiator



**Eksan Hartanto**

Pendiri Sanggar Rojolele & Inisiator Festival Mbok Sri

MUKSIN  
MLETHO

Ketua Divisi Seni Budaya



**Muksin**

Ketua Divisi Seni Budaya

ZULIA  
AMALIA

Fasilitator Kelas Anak



**Zulia Amalia**

Fasilitator Kelas Anak Sanggar

SHINTA  
MEYLINDA

Fasilitator Seni Tari



**Shinta Meylinda**





Fasilitator Seni Tari

WIWIK  
HANDAYANI

Kordinator Pengembangan SDM



**Wiwik Handayani**

<p style="text-align: center;"><b>PRIYADI</b> N G E B O N G</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kordinator Petani 1</p>  <p style="text-align: center;"><b>Priyadi</b> Kordinator Petani 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>SRI MULYONO</b> K A I B O N</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kordinator Petani 2</p>  <p style="text-align: center;"><b>Sri Mulyono</b> Kordinator Petani 2</p>
<p style="text-align: center;"><b>SRI WIDODO</b> K A I B O N</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Penasehat Organisasi</p>  <p style="text-align: center;"><b>Sri Widodo</b> Penasehat Organisasi</p>	<p style="text-align: center;"><b>SARJU</b> K A I B O N</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kordinator Sekolah Tani</p>  <p style="text-align: center;"><b>Sarju</b> Kordinator Sekolah Tani</p>

Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

## 2. Seni-Budaya Sebagai Pendekatan

Kehadiran kembali Eksan Hartanto, --pendiri, ketua, aktivis Sanggar Rojolele— di Desa Delanggu untuk menggerakkan petani, sedang latar belakang dirinya bukan seorang petani, adalah sebuah beban psikis tersendiri. Untuk mengatasi beban psikis tersebut, akhirnya ia justru menemukan ide untuk menggunakan seni-budaya sebagai pendekatan agar kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat khususnya para petani Desa Delanggu. Oleh karena itu, sebagaimana biasanya sebuah sanggar seni, diadakanlah program seni-budaya, diantaranya adalah pelatihan tari untuk

anak dan remaja. Sebagai lembaga seni dan budaya, Sebagai lembaga seni-budaya, Sanggar Rojolele juga aktif membangun jejaring dengan para budayawan, seniman, bahkan juga agamawan di Kabupaten Klaten. Dengan jejaring ini, eksistensi Sanggar semakin mapan di tengah masyarakat tani. Sanggar bukan saja sebagai lembaga tempat melatih kesenian untuk anak-anak dan remaja, bahkan Sanggar juga ikut serta merawat budaya Jawa. Bahkan dalam perkembangannya kemudian Sanggar menjadi media pencerah bagi masyarakat Delanggu, Klaten dan sekitarnya, untuk lebih peka terhadap berbagai permasalahan masyarakat kecil di Kabupaten Klaten.

Sebagai lembaga yang berdiri di tengah para petani, sanggar kemudian akrab dengan berbagai persoalan pertanian di sekitar Delanggu. Sanggar menjadi semacam lembaga non pemerintah yang mengambil peran sebagai pendamping, fasilitator, bahkan juga advokasi bagi para petani Delanggu. Dari sinilah kontribusi sanggar terhadap pertanian Delanggu mulai dirasakan oleh para petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Singkatnya, dengan pendekatan seni-budaya tersebut, Sanggar Rojolele kini menjadi “milik” petani, masyarakat dan bahkan juga pemerintah Desa Delanggu. Hal tersebut disampaikan informan berikut;

“Nah akhirnya kami berpikir perlu pendekatan khusus. Awalnya saya juga bukan petani pak. Justru seni budayanya nanti yang menjadi daya tarik gerakan saya. Di sini tradisi budaya itu pada seneng pak. Nah saya melewati jalur seni budaya itu, pertama. Tapi itu kita pakai untuk kendaraan saja. Visi utama tetap di pertanian.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Sanggar mulai dipercaya oleh pemerintah Desa Delanggu untuk mewakili para petani ikut berpartisipasi dalam berbagai forum desa, kecamatan bahkan juga kabupaten, untuk menyampaikan aspirasi petani dan pertanian. Pengakuan terhadap eksistensi Sanggar juga disampaikan oleh Kepala Desa Delanggu. “Nek wonten nopo-nopo hubunganipun kalian pertanian kulo cekap ngajak Mas Eksan niki.” (Wawancara dengan PW pada 7 Juli 2022)

Eksan dengan kemampuannya sebagai aktivis di tengah para petani memang masih terkesan sebagai *single fighter*. Namun dengan kemampuannya dalam hal komunikasi dan ketrampilan membangun jejaring dengan berbagai kalangan sebagaimana dijelaskan di atas, menjadikan Sanggar Rojolele terkesan sebagai lembaga yang kuat. Eksan dengan Sanggar Rojolelanya, dan para aktivis Klaten berkolaborasi membangun gerakan mendampingi para petani, untuk terbebas dari pola interaksi sosial yang meminggirkan mereka. Hal ini disampaikan informan berikut;

“Ya ketemulah jejaring yang Klaten seperti Pak Anshori itu, Kiai Sam, Kiai Jazuli, Romo Herjito yang dari Muntilan, terus ketemu dengan aktor-aktor politik Klaten. Di situ saya melihat ada celah untuk berkolaborasi. Kolaborasinya pentas seni budaya dulu pak. Tapi setelah di situ, kok saya kalau berhenti di seni budaya saja.... Sedang Delanggu punya identitas besar. Bagi beberapa orang sih Delanggu itu lebih besar dari Klaten. Nah saya bergerak pelan-pelan, brainstorming.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Kecuali itu, Sanggar dengan jejaringnya tersebut, aktif melakukan gerakan seni-budaya untuk mencerahkan masyarakat pada umumnya, khususnya para petani, bahwa mereka sesungguhnya memiliki modal sumber daya alam, modal sosial dan budaya yang sangat besar, yang dengannya mereka bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan komponen sosial lainnya. Fungsi pencerahan tersebut dilakukan Sanggar antara lain dengan mengadakan pentas seni kolosal, yang mereka namakan dengan Festival Mbok Sri Mulih. Festival tersebut tidak seperti pentas seni mainstream yang tampil di alon-alon, melainkan diselenggarakan di tengah sawah, pinggir kali, tempat para petani berjuang hidup. Hal ini menjadikan seni sebagai alat kritik sosial terhadap pola hubungan sosial yang hegemonistik. Festival Mbok Sri Mulih menjadi media untuk membuka mata semua orang termasuk petani akan identitas mereka. Kesadaran identitas itulah yang disebut kesadaran kelas, yang jika dimiliki oleh petani, menjadikan mereka eksist, independen, berdaya, untuk tidak dieksploitasi oleh siapapun. Secara sosiologis, fungsi dan peran pencerahan tersebut mendudukan Sanggar Rojolele sebagai bagian dari kelas menengah, *civil society* yang secara aktif mendampingi masyarakat

menengah ke bawah dalam berinteraksi dengan kelompok sosial elit.

Bentuk *civil society* bisa bermacam-macam, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah, atau sekelompok orang yang mempunyai respon terhadap isu politik dan sosial. Di jaman Orde Baru *civil society* melalui program-program memberikan bantuan layanan kesehatan masyarakat, pendidikan kewirausahaan, advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tujuan gerakan tersebut untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan masyarakat selain itu sebagai langkah kritik terhadap kebijakan negara (Santoso, 2021). Pendampingan tersebut sangat penting dalam rangka membela mereka yang lemah, khususnya para petani dari hegemoni kelas elit sosial.

Gambar 4.8. Festival Mbok Sri Mulih (FMSM)



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Peran kritis Sanggar ini sesuai dengan latar belakang sosial kelahirannya untuk mendampingi mereka yang terpinggirkan. Kondisi petani Sanggar Rojolele



yang sebagian besar adalah petani penggarap yang menurut Bung Karno mempunyai istilah sendiri sebagai kaum “Marhaen” yaitu petani-petani yang mengerjakan bidang tanah yang kecil sekali. Golongan ini adalah korban dari sistem feodal. Mereka dimelaratkan oleh sistem sejak era penjajahan yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dan Bung Karno sendiri sebetulnya tidak mau atau merasa kurang tepat jika menggunakan istilah proletar Karl Marx, walaupun mempunyai irisan kesamaan. Jadi yang termasuk dalam kategori marhaen adalah semua kaum yang melarat, kalau sebagai buruh adalah buruh kecil (Wasikoen & Saksono, 2014).

Klaten sendiri memiliki sejarah tentang perlawanan kaum tani atau gerakan protes petani khususnya di daerah Klaten yang terkait erat dengan program *landreform* ketika dicanangkan oleh Pemerintah Orde Lama melalui keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Gerakan protes petani Klaten dimotori oleh Barisan Tani Indonesia (BTI). Gerakan protes ini disebut dengan aksi sepihak atau aksef. Beberapa program *landreform* yang ditentang petani adalah larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, larangan pemilikan tanah secara *absentee* (pemilikan tanah yang letak tanah di luar daerah tempat tinggal pemilik tanah), redistribusi tanah-tanah yang terkana larangan *absentee*. Aksi penolakan yang dilakukan para petani seperti memperlambat waktu penyerahan lahan, menolak sawah disewa oleh perusahaan perkebunan. Protes petani juga nampak dalam bentuk perusakan kebun-kebun tebu (Sukirno, 2018).

Di samping itu, Klaten juga dikenal memiliki sejarah pergerakan buruh yang cukup melegenda, yaitu demonstrasi pemogokan kaum buruh dari Pabrik Karung Goni Delanggu yang terjadi pada tahun 1948. Gerakan buruh tersebut disponsori oleh beberapa organisasi serikat buruh antar lain SOBSI, BTI, dan Perbupri, yang semuanya berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan tersebut dipicu oleh adanya perlakuan yang tidak adil antara buruh kasar dengan staff administrasi di Pabrik karung Goni Klaten. Fitriyanto melaporkan bahwa gaaji buruh kasar Rp 30, - Rp 40,-, sementara staff administrasi menerima sepuluh kali lipat lebih besar dari upah buruh kasar tersebut, yhaitu sekitar Rp 300,- - Rp 400,- (Fitriyanto, 2017).

Dari sudut pandang politik, masa lalu Delanggu juga memiliki beberapa organisasi politik yang masing-masing mewakili ideologi yang berbeda. Kecuali PKI, yang memiliki anggota paling banyak, di Delanggu juga ada Partai Nasionalis Indonesia (PNI), maupun parta yang berideologi keagamaan, yaitu Masyumi. Berbagai varian aliran agama, ideologi, sosial-ekonomi, dan politik, tersebut tidak mungkin hilang begitu saja, melainkan bermetomorfose dalam berbagai gerakan yang terjadi pada saat ini dan bahkan mungkin juga pada masa mendatang. Realitas dinamis sejarah sosial politik Delanggu tersebut menjadi latar belakang gerakan Sanggar Rojolele. Dengan kata lain tidak mungkin memahami Sanggar Rojolele beserta dinamika gerakannya, kecuali diawali dengan memahami dinamika sejarah Delanggu.

Gambar 4.9

Pabrik Karung Goni Delanggu Simbol Sejarah Perlawanan Petani Delanggu



Sumber : Dokumentasi dari Solo Pos.Com diakses pada 10 Mei 2022

### 3. Ideologi dan Misi Sanggar Rojolele

Idiologi terdiri dari dua kata *ideo* dan *logi*. *Ideo* berarti gagasan, pemikiran, konsep, keyakinan dan sebagainya. Sedangkan *logi* adalah logika, ilmu, atau pengetahuan. Sehingga idiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang keyakinan dan cita-cita. Seorang idiolog adalah seorang pembela idiologi atau keyakinan tertentu. Dalam hal ini ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh kelompok atau kelas sosial tertentu (Syariati, 1995).

Menurut Syariati (1995), setidaknya ada tiga fungsi idiologi bagi kelompok atau kelas sosial yang memeluknya, pertama, memberikan cara pandang terhadap eksistensi, alam semesta, dan manusia. Kedua, memberikan cara memahami semua benda, gagasan atau ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental. Ketiga, mencakup usulan-usulan, metode-metode, dan berbagai pendekatan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah *status quo*.

Idiologi, sebenarnya adalah termasuk wilayah budaya karena dibuat dan dibangun oleh manusia. Jadi ideologi bukanlah agama. Lantas bagaimana hubungan idiologi dengan agama? Agama, di antaranya Islam adalah terdiri dari cara pandang terhadap realitas kehidupan. Islam memiliki pandangan tentang Tuhan, manusia sebagai individu, dan masyarakat, alam, nabi dan rasul, akherat, bahkan juga pandangan setan (Rahman, 1980). Atas dasar semua pandangan tersebut, munculah pandangan dunia (*world view*) menurut agama Islam. Itulah karenanya seorang muslim sebenarnya memiliki pandangan dunia yang khas karena pengaruh dari pandangan dunia Islam. Sebagaimana dikatakan H.A.R. Gibb (1998), bahwa di samping sebagai sistem teologi, Islam juga berisi keyakinan dan cita-cita. Oleh karena itu bisa berarti dan berfungsi sebagai agama sekaligus idiologi bagi pengikutnya. Namun demikian, dari doktrin Islam yang satu memunculkan beraneka ragam penafsiran. Hal tersebut menyebabkan Islam dengan pandangan dunianya tersebut, bukanlah pemahaman tunggal terhadap doktrin Islam. Hal tersebut menyebabkan implementasi dan aktualisasi Islam dalam kehidupan, sebagaimana dinyatakan oleh Engineer (1999), dapat menampakkan diri dalam dua

wajah. Wajah pertama, Islam sebagai agama yang melegitimasi *status quo* dan wajah kedua adalah Islam yang mendorong pemeluknya untuk membebaskan diri dari hegemoni *status quo*. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi terkait erat dengan agama. Agama yang berdasarkan pada kebenaran wahyu, mempengaruhi pemeluknya untuk memiliki cara pandang terhadap kehidupan mereka. Islam sendiri, dengan nilai utamanya, tauhid, lahir satu pandangan dunia.

Berbeda dengan Marx yang berpendapat bahwa ideologi berakar pada determinasi materialistik. Pemikiran, cita-cita dan keyakinan orang dipengaruhi oleh keadaan perutnya. Kesadaran kelas sebagai *infra structure* mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan bercita-cita yang kemudian manifes dalam bentuk pola hubungan, interaksi, institusi, bahkan agama, pada level *supra-structure* sosial. Di mata Marx, bukan Tuhan yang menciptakan manusia dan kehidupannya, tetapi manusialah yang menciptakan “Tuhan”. Bagi Marx, hanya ada dua kelas sosial, kelas yang tertindas dan kelas sosial penindas. Kelas tertindas (*proletar*) mengembangkan pemikiran kritis untuk membebaskan diri dari ketertindasannya, yang selanjutnya disebut berideologi kiri. Sementara kelas penindas (borjuis) mengembangkan pemikiran yang membela kaum borjuis, atau penguasa, sehingga pro *status quo* dan konservatif, yang selanjutnya disebut dengan berideologi kanan. Dalam sub bahasan ini akan didiskripsikan ideologi Sanggar Rojolele.

Berbicara Sanggar Rojolele, tidak bisa dipisahkan dengan Eksan Hartanto, pendiri (inisiator) sekaligus ketua, dan tokoh kuncinya. Pandangan dunia Sanggar Rojolele seolah-olah terwakili oleh ideologi Eksan. Oleh karena itulah, memahami Eksan memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk memahami ideologi Sanggar.

Masa kecil Eksan boleh dibilang biasa-biasa saja seperti anak pada umumnya. Hal itu berjalan hingga Eksan lulus dari STM (Sekolah Teknik Menengah), sekarang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yang semuanya dijalani di Delanggu. Selepas STM, tepatnya tahun 2007 hingga tahun 2015, Eksan menjadi buruh di Batam, daerah sentra industri Indonesia pada saat itu. Kesempatan sebagai buruh industri di Batam ini rupanya, secara sengaja atau tidak, dimanfaatkan oleh

Eksan untuk belajar sebagai aktivis buruh. Banyak level dalam organisasi buruh yang sempat dijalani Eksan, dari yang paling rendah dan kecil yaitu sebagai anggota serikat pekerja di internal pabrik, hingga terakhir menjadi Ketua Konsulat Cabang Batam dari salah satu Serikat Pekerja.

“Saya ditempa di Batam. Dulu saya bicara di depan lima orang saja *ndredek* pak. Tapi setelah di sana kerja di pabrik dengan keadaan kayak dijajah Jepang, kerja delapan jam per hari tidak dapat makan gratis. Akhirnya kita buat yo buat serikat pekerja dulu internal pabrik, kemudain dihalang-halangi, hanya difasilitasi forum *bipartheit*. Federasinya Serikat Pekerja Metal Indonesia pak (SPMI). Induknya konfederasinya, Konfederasi nasionalnya Serikatt Pekerja Indonesia (SPI). Induk Asia Pasifiknya *Industrial All*, itu Asia Pasifik. Tapi klu untuk internasionalnya, ITUC (*International Trade Union Confederatio*)”. (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022).

Banyak wawasan maupun pengalaman yang didapatkan Eksan sebagai aktivis buruh di Batam. Ia mulai belajar berbicara di depan umum, bekerjasama dengan berbagai orang dengan aneka ragam latar belakang agama, suku, ras, maupun pendidikan, belajar menghadapi tekanan, berempati dengan mereka yang terpinggirkan, bernegosiasi, *lobbying*, hingga belajar berdemonstrasi. Lebih dari itu Eksan juga belajar berorganisasi, sekaligus berpolitik untuk memperjuangkan aspirasi kaum buruh. Lebih dari itu, Eksan juga belajar mengenal berbagai aliran pemikiran para filosof dunia. Hal tersebut disampiakan dalam wawancara berikut:

“Adakah kaderisasi di serikat pekerja. Ada pak. Serikat-serikat pekerja yang militan itu memang hasil perkaderan. Ada, pendidikan TOT, pendidikan dasar organisasi, pendidikan lanjutan...ada pendidikan-pendidikannya. Termasuk diajarkan pemikiran-pemikiran, termasuk gerakan-gerakan sosial. Kita datangkan dosen ekopol juga pak. Saya termasuk yang dulu di awal-awal buruh *go pilitic*. Sinaunya sampai ke Omah Tani Bandar Batang, Pekalongan itu, punya Handoko Wibowo itu. (Wawancar dengan EH pada 12 Juni 2022)

Satu di antara hal-hal penting yang didapatkan Eksan di Batam adalah munculnya rasa empati terhadap kaum buruh khususnya dan mereka yang terpinggirkan pada umumnya. Empati tersebut mendorongnya untuk terlibat dalam pergerakan kaum buruh melalui berbagai serikat pekerja. Kepekaan ini menjadi

semacam mindset dan cara pandang terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang menyatu dalam kepribadian seorang Eksan.

Pada saat ia kembali ke Delanggu pada tahun 2015 Eksan bukan lagi Eksan pada masa lalu. Ia seorang kader serikat buruh yang mewakili pola berpikir sangat kiri. Ia menyaksikan kehidupan petani Delanggu yang tidak kunjung sejahtera di tengah kekayaan alam berupa lahan sawah yang sangat subur. Ia merasakan banyak permasalahan di sekitar petani Delanggu khususnya dan petani Indonesia pada umumnya. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran kelas dan kehidupan petani yang semakin individualistik (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022).

Bertolak pada banyaknya permasalahan petani di Delanggu tersebut, Eksan berniat mengonsolidasikan potensi petani yang sementara ini masih berserakan. Sebagai wadahnya dibentuklah Sanggar Rojolele. Pemilihan sanggar sebagai institusi petani bukan tanpa pertimbangan. Eksan yang memiliki latar belakang sebagai aktivis buruh –bukan petani—merasa tidak percaya diri bergabung dengan komunitas tani, maka diperlukan media sebagai pendekatan. Seni budaya merupakan bidang yang melekat kuat pada komunitas petani di Indonesia, demikian juga Delanggu. Bahkan hingga saat ini di desa-desa di mana para petani menjaalani kehidupan masih sering kita jumpai kesenian wayang kulit, kethoprak, pertunjukan aneka jenis tari, dan sebagainya. Oleh karena itu, sanggar yang *notabene* institusi seni budaya merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai media atau jembatan antara Eksan sebagai penggerak dengan para petani Delanggu. Wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.

“Pulang dari Batam, sampai di sini kok individu-individu. Tetapi saya juga tak ingin terkesan *nguyai segoro*. Saya mengorganisir 3000-4000 orang dengan mudah pak. Tapi mengorganisir petani 50-60 orang dari dua kelompok tani sulitnya bukan main. Nah akhirnya kami berpikir perlu pendekatan khusus. Awalnya saya juga bukan petani pak. Justru seni budayanya nanti yang menjadi daya tarik gerakan saya. Di sini tradisi budaya itu pada seneng pak. Nah saya melewati jalur seni budaya itu, pertama. Tapi itu kita pakai untuk kendaraan saja. Visi utama tetap di pertanian.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Gambar 4.10. Konsolidasi Petani Delanggu



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Itulah karenanya Sanggar Rojolele didirikan, dan gilirannya nanti banyak berperan sebagai lembaga tempat belajar mengembangkan minat dan bakat seni masyarakat Desa Delanggu, khususnya dari kalangan pemuda-pemudi, serta tempat belajar, tempat “*jagongan*” bagi para petani Delanggu. Dengan Sanggar Rojolele pula berbagai potensi, kekuatan, bahkan berbagai persoalan yang dialami petani, dapat dikonsolidasikan dan dibicarakan untuk dicarikan solusinya. Yang tidak kalah penting dari itu semua adalah Eksan secara perlahan dapat diterima dan bahkan menjadi “pemimpin” bagi petani Delanggu.

Gambar 4.11. Latihan Tari di Sanggar Rojolele



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Dalam berbagai kegiatan internal Sanggar, Eksan berperan sebagai pemimpin petani. Hal tersebut tampak pada waktu pertemuan rutin petani yang tergabung dalam keanggotaan Sanggar, Eksan membuka rapat atau yang mungkin lebih pas dikatakan sebagai “jagongan” itu. Eksan yang menerima dan memperkenalkan semua tamu yang datang ke Sanggar dan hendak bertemu petani. Banyak tamu berkunjung ke Sanggar untuk berbagai kepentingannya, mulai dari komunitas tani dari daerah lain untuk studi banding, hingga kehadiran kalangan akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, maupun kehadiran pemerintah dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi Jawa Tengah yang berkunjung ke Delanggu untuk sekedar melihat pertanian masyarakat, maupun dalam rangka memberikan bantuan pada mereka. Pelaksanaan semua itu dikoordinasikan oleh Eksan.

Gambar 4.12

Sanggar Menerima Tamu dari Komunitas Petani Blora Jawa Tengah





Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

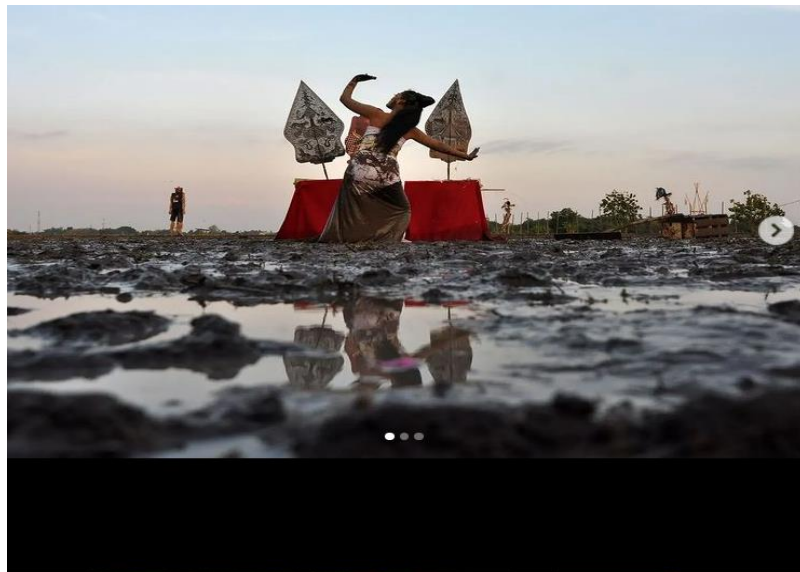
Kegiatan seni-budaya bukan hanya media bagi Eksan dan petani, melainkan juga media pergerakan Sanggar. Melalui seni budaya Sanggar membangun jejaring dengan para budayawan Klaten yang tergabung dalam wadah Gerakan Peduli Klaten. Sebagai budayawan seni, masing-masing tokoh yang tergabung dalam Gerakan Peduli Klaten menyuarakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lingkungan di mana para budayawan tersebut berasal. Berbagai permasalahan tersebut diartikulasikan dalam bentuk seni budaya, untuk menjadi perhatian publik atau khalayak umum. Dengan demikian, seni budaya menjadi semacam bahasa atau alat komunikasi antar komunitas di Klaten. Hal tersebut tergambarkan dalam wawancara berikut;

“Bahkan kalau boleh jujur, kami ini embrio Gerakan Peduli Klaten pak. Kalau bapak tahu Gelora Nusantara pak...yang ada di youtube itu gerakan sosial budayanya pak. Tapi untuk kemasyarakatannya ya Gerakan Peduli Klaten. Orang-orang di belakangnya itu seperti Pak Agus Bebek yang mantan ketua DPRD 2014-2019, Romo Kirjito, Kiai Jazuli, Ketua PP. Pancasila Sakti yang cucunya Mbah Liem itu, ya Mbah Agus Bimo Budayawan Klaten, Bu Siti Farida mantan DPRD Klaten, yang sekarang anggota Umbosmen RI. Di belakang kami kuat pak. Cuman kita nggak menonjolkan mereka. Jadi “aku iso opo, aku tandang opo, ayo temandang”. Karena kalau kita hanya menyalahkan pemerintah nggak jalan. Menggerutu saja habis-habiskan energi, dan tidak melakukan sesuatu. Awalnya kami menari-nari di tengah sawah, orang menduga duga jangan-

jangan ini Lekra, gerakan kiri. Karena seni budaya kita beda dengan mainstream pak. Bukan seni wayang, ketoprak, yang panggungnya di alon-alon. Tapi ini di tengah sawah, di pinggir sungai Kali Woro, pinggir Kalianjik, ya gerakan-gerakan satire itu lho pak. Cuman nggak ini banget. Sebenarnya Pemkab itu nangkap apa yang kita suarakan.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Persis yang terjadi dengan masalah kehidupan petani Delanggu, yang kemudian dikomunikasikan oleh Sanggar Rojolele dalam bentuk drama kolosal yang berjudul “Mbok Sri Mulih”. Pertunjukan seni Mbok Sri Mulih yang gelar setahun sekali setiap bulan Oktober-November tersebut, berhasil menggugah kesadaran berbagai pihak akan potensi pertanian Delanggu tempo dulu yang harus dikembangkan pada saat-saat sekarang ini.

Gambar 4.13  
Festifal Mbok Sri Mulih



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Hal serupa juga ditampilkan oleh budayawan Desa Burikan Kecamatan Cawas Klaten. Mereka menggunakan seni Gejok Lesung yang sebagai media mengomunikasikan permasalahan petani kedelai di wilayah setempat untuk menjadi perhatian publik maupun pemerintah. Bahkan dengan seni budaya, Sanggar

Rojolele juga dapat membangun jejaring dengan para aktivis dari daerah tambang pasir dari daerah Kaliworo Magelang dan mereka yang kemudian bergabung dalam komunitas Gerakan Peduli Klaten. Mereka bersama-sama mengusung berbagai permasalahan rakyat yang terjadi di berbagai daerah asal mereka, yang dikemas dalam bentuk bahasa seni-budaya satire yang di gelar di berbagai tempat yang tidak biasa, seperti di tengah sawah, di pinggiran sungai, di area tambang galian C, dan seterusnya. Seni-budaya, menjadi semacam bahasa untuk menyampaikan pesan berupa kritik atas berbagai masalah sosial yang harus segera didengar oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah, sehingga segera dapat diurai dan dibuatkan solusinya. Wawancara berikut menggambarkan situasi di atas;

“Tapi yang di kecamatan-kecamatan ya didorong untuk itu, menyuarakan isu-isu lokalnya,. Lha Delanggu itu setiap Sepetember. Seperti Mbok Sri Mulih yang gelar setahun sekali tiap September. Kalau di daerah Kaliworo ya gerakan satire tentang Galian C. Di daerah itu pak perputaran uang luar biasa besar. Itu bukan ranahnya orang-orang lokal pak. Tapi ada perang bintang pak. Perangnya para jenderal. Di sana itu kerja enam jam, lulusan SD saja pendapatanya sampai Rp 1.200.000 per hari. Itu tahun 2016-2017. Tapi berbanding lurus dengan penyakit masyarakat di sana. Angka HIV/AIDS di Klaten itu ya disumbang daerah itu, yaitu di Kemalang. Posisinya di atas Jatinom. Guyonanya, malam Minggu mau mendata pengunjung kafe terkenal di Jogja itu orang Kemalang. Dan itu dikuasai oleh beberapa orang elit, pemodal, dan politisi-politisi Klaten punya...ha ha. Rakyat tidak menikmati. Kami tidak anti tambang. Kalau tidak ditambang ya bahaya. Yang kami pro itu ya tambang yang kerakyatan. Bukan tambang yang ugal-ugalan, tidak merusak lingkungan, merusak jalan, bukan kebun-kebun warga itu ditambangin. Nggak daerah aliran sungai saja. Jadi kalau jual kebon berpasir di sana satu, bisa untuk beli kebon di tempat lain lima pak.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Gambar 4.14

Festifal Mbok Sri Mulih sebagai Pembangkit Nostalgia Masa Lalu Delanggu



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Dari pemaparan di atas, menjadi jelas posisi seni-budaya dalam konteks perjuangan para petani Delanggu. Pertama, seni-budaya merupakan pendekatan yang digunakan Eksan untuk mengambil hati masyarakat pada umumnya dan petani Delanggu khususnya. Kedua, seni-budaya merupakan media pergerakan bagi Sanggar untuk menggugah kesadaran semua pihak dalam rangka mewujudkan cita-citanya membantu petani yang selama ini terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat modern. Permasalahannya adalah apa dan bagaimana ideologi Eksan yang kemudian menjadi ideologi Sanggar yang sebenarnya?

Sebagai pendiri, penggerak, dan sekaligus pemimpin Sanggar, cara pandang, mimpi-mimpi, cita-cita Eksan secara perlahan menjadi ideologi Sanggar Rojolele. Eksan melihat permasalahan petani Delanggu pada pola hubungan sosial. Permasalahan petani Delanggu tidak disebabkan oleh budaya masyarakat yang malas, bukan juga disebabkan oleh sumber alam yang miskin. Permasalahan petani Delanggu terutama disebabkan oleh pola hubungan sosial yang tidak adil. Pada satu sisi terdapat pemilik kapital besar, yaitu penguasa tanah dan pengusaha beras, yang jumlahnya minoritas yang hidupnya bergelimang harta, pada sisi lain terdapat mereka para petani penggarap dan buruh tani yang jumlahnya mayoritas, tetapi

hidup miskin. Kelompok pertama adalah kapitalis-borjuis, kelompok kedua adalah proletar. Para buruh tani dan petani penggarap yang jumlahnya 95% dari semua petani Delanggu tersebut miskin karena pendapatan per bulannya sangat kecil, sebagai akibat dari semakin mahalnya biaya produksi pada satu sisi dan harga gabah kering yang tidak kunjung naik dari dulu hingga kini pada sisi yang lain. Pendapatan itu semakin kecil, karena harus terbagi menjadi dua, masing-masing adalah penggarap atau buruh tani dan pemilik lahan. Ketidakadilan itu tidak terlepas dari tata niaga hasil pertanian secara nasional serta tata kelola / hak kepemilikan lahan, yang keduanya dibawah wewenang pemerintah. Untuk konteks kabupaten Klaten, harga gabah kering dan mekanisme penjualan hasil juga dipandang masih kurang memihak pada petani. Diantara contohnya adalah pengusaha beras rekanan Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha, yang diijinkan hanya menerima penjualan hasil petani dalam bentuk gabah, bukan beras. Akibatnya, petani dirugikan sekitar Rp 2.000 per kg., jika dibandingkan mereka bisa menjual dalam bentuk beras. Sementara petani masih kesulitan menjual hasil dalam bentuk beras ke pasar umum, karena memang harga beras Rojolele Srinuk lebih mahal dibanding harga beras varietas lainnya.

Dari berbagai data hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, Sanggar Rojolele menjadi satu diantara komunitas yang ada di Klaten yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, maupun perilaku kelompok sosial-masyarakat yang merusak lingkungan, eksploitatif terhadap rakyat atau masyarakat lain, dan sebagainya. Mereka berupaya untuk memihak rakyat yang terpinggirkan, membantu mereka untuk mendapatkan keadilan dalam pola interaksi sosial. Adapun sebagai medianya dapat berupa seni-budaya, komunikasi politik, hingga aksi turun ke jalan jika diperlukan.

Menyikapi permasalahan petani tersebut, Sanggar berusaha untuk membantu petani dengan menggunakan pendekatan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Diantara melalui jejaring dengan pihak pemerintah maupun perguruan tinggi dan

organisasi kemasyarakatan, mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petani, membangun sarana pertanian modern, hingga membantu menjualkan beras petani secara langsung kepada *end user*. Dengan semua itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Upaya yang dilakukan Sanggar ini sesungguhnya bertolak pada visi dan misi Sanggar Rojolele, yaitu pertama, untuk penguatan pertanian Desa Delanggu; kedua, membentuk usaha tani Sanggar Rojolele untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui jalan koperasi, kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru pertanian, kemudian mengawal regulasi pertanian di stakeholder desa, daerah, maupun pusat (Qadavi, 2022).

Namun demikian menurut Eksan, pendekatan kultural tersebut kurang begitu signifikan hasilnya. Oleh karena itu Sanggar juga mengusahakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural yang dimaksud adalah pendekatan untuk mempengaruhi atau mendekonstruksi struktur sosial yang menghambat atau menghalangi terwujudnya kesejahteraan petani. Di antara bentuk pendekatan struktural yang dimaksud adalah membangun kesadaran kelas di kalangan petani dan mempromosikan program reformasi agraria.

Keberadaan kelas atau golongan sosial tidak dengan sendirinya efektif untuk perjuangan kelas mewujudkan cita-citanya. Golongan atau kelas sosial akan berarti sebagai kelas jika mereka memiliki kesadaran subyektif sebagai kelas atau sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan spesifik, serta mau memperjuangkannya. Kesadaran kelas seperti inilah yang menurut Eksan belum dimiliki oleh petani. Dari belum adanya kesadaran kelas ini maka sulit sekali melibatkan partisipasi petani untuk bergerak memperjuangkan nasibnya. Hal tersebut Eksan rasakan sangat berbeda dengan kesadaran kelas buruh. Oleh karena itu menggerakkan 50-60 orang petani lebih sulit daripada menggerakkan 50.000-60.000 buruh. Untuk itu, Eksan melalui berbagai kesempatan melakukan edukasi dan sosialisasi kesadaran kelas ini kepada para petani.

“Persoalannya adalah kesadaran kelasnya masih kecil. Kalau kesadaran kelas sudah terbangun, ayo nanti klu ada isu apapun yang tidak lancar kita turun dengan aksi. Ketika di Batam itu, kesadaran kelas di sana, sangat baik. Sampai tahun tersebut kenaikan upahnya menjadi maksimal. Dulu makan siang bayar, makan siang jadi gratis; buruh dapat cuti gajah, bagi yang masa kerja lima tahun ke atas, dapat cuti tahunan 15 hari. Nah tapi kalau sudah berhasil itu, kesadaran kelas itu turun lagi pak. Kalau di sini, Rojolele baru laku sedikit saja, terus pada egois, banyak “raja-raja” kecil. (Wawancara dengan EH pada 20 Juli 2022).

Eksan mewakili Sanggar Rojolele juga merasakan kegelisahan luar biasa akan keberadaan tuan tanah yang menguasai 90% lahan di Desa Delanggu. Keberadaan tuan tanah ini yang menyebabkan petani hidup miskin, karena pendapatan mereka mesti terbagi dua. Sebagai solusi mendasar menurut Eksan adalah melaksanakan apa yang disebut dengan reformasi agraria. Reforma agraria, sebagaimana didefinisikan oleh Usep Setiawan dalam karyanya yang berjudul, “Dinamika Reforma Agraria di Indonesia” dalam Tjondronegoro (2008) adalah sebagai suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional.

Bagi Eksan, reforma agraria masih memungkinkan memiliki pemahaman yang bias. Oleh karena itu, Eksan lebih cocok menyebut reforma agraria dengan redistribusi lahan. Kedua istilah tersebut menurut Eksan memiliki makna yang berbeda. Reformas agraria dipahami Eksan sebagai membagi tanah-tanah negara yang tidak produktif untuk digarap para petani dengan hak guna lahan. Sedangkan redistribusi lahan, yaitu membagi lahan persawahan yang sementara ini banyak dikuasai oleh tuan tanah untuk dibagikan pada petani muda. Eksan menjelaskan langkah teknisnya adalah negara memberikan pembatasan hak kepemilikan lahan bagi seseorang dan selebihnya dibeli oleh negara untuk dibagikan pada petani dengan cara hak guna, bukan hak milik. Jika program ini dapat diwujudkan maka, hasil panen para petani akan dimiliki petani itu sendiri, tanpa harus membaginya dengan pemilik lahan (tuan tanah). (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022)

Reforma lahan ini bagi Eksan merupakan solusi yang sifatnya fundamental dan hasilnya secara langsung dapat dinikmati para buruh tani atau petani penggarap. Jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan petani maka program reforma lahan ini penting dilakukan. Negara mestinya menjadi pemilik yang menguasai tanah, sebagaimana air, dan semua tambang lainnya, sebagai aset yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Bagi Eksan pendekatan kultural yang selama ini dilakukan pemerintah maupun *stake holder* pertanian yang lainnya hanyalah ritual yang kurang bermakna. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai petani aktivis ia menyuarakan gagasannya tersebut ke berbagai kalangan mulai dari pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, dinas pertanian atau dinas terkait lainnya, hingga bupati, maupun kalangan legislatif di daerah kabupaten Klaten.

“Yang dimaksud redistribusi lahan teknisnya saya kurang tahu pak. Tapi maksudnya Kementerian Agraria dimulai dari memetakan lokasi yang menjadi lumbung pangan di Indonesia ini. Nah Perda tentang pemetaan tata ruang wilayah juga dikuatkan. Yang zona hijau harus dijaga betul, jangan sampai disentuh oleh pembangunan nasional. Nah anak muda itu diberi hak guna saja pak. Kalau hak milik rawan dijual. Yang pasti tanah tersebut digarap anak muda dan hasilnya dipakai sendiri. Tidak dibagi dua. Ekstrimnya seperti itu pak. Saya sampaikan di provinsi dan kabupaten, tapi mereka reaksinya itu bukan ranah kami.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022)

Gagasan tentang reforma agraria-redistribusi lahan yang disampaikan Eksan ini tampaknya merupakan gagasan utamanya baik sebagai ketua Sanggar Rojolele maupun aktivis petani. Gagasan ini merupakan refleksi atas pengalamannya sendiri sebagai petani penggarap. Eksan merupakan satu dari beberapa gelintir pemuda Delanggu yang mau menjalani profesi sebagai petani. Namun karena tidak memiliki lahan sama sekali, ia rela hanya sebagai petani penggarap. Dari sini, ia merasakan secara nyata sedalam dan sebesar apa kesulitan yang dialami petani penggarap, yang mana hasil pertaniannya yang sudah sangat kecil karena biaya produksi yang semakin naik, serta masih harus dibagi menjadi dua, dia dan pemilik lahan. Sementara itu, ada seseorang yang bernama PJ, tetangga kampungnya bukan petani tetapi memiliki 35 petak sawah. Kenyataan tersebut tentu saja merupakan fenomena kesenjangan sosial yang sungguh luar biasa. Menjadi petani harus menerima resiko



memiliki penghasilan yang sangat kecil, sebagai akibat semakin tingginya biaya produksi. Sementara harga gabah atau beras tidak kunjung meningkat dalam waktu yang sangat lama. Nasib *apes* petani ini akan dirasakan dua kali lebih berat bagi petani penggarap. Mereka harus membagi penghasilan tani mereka dengan pemilik sawah yang ia garap. Akibatnya adalah terjadinya degenerasi petani. Hampir tidak ada anak muda Desa Delanggu yang bersedia memilih profesi menjadi petani. Hal ini tentu sebuah ironi yang luar biasa bagi Delanggu sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa lahan sawah yang sangat subur, serta wilayah pemilik *icon* sebagai daerah penghasil beras premium. Bagi Eksan fenomena tidak adanya petani dari generasi muda harus dilihat sebagai sebuah potensi ancaman bagi eksistensi Delanggu atau bahkan juga berarti ancaman bagi ketahanan pangan untuk Indonesia sebagai negara agraris.

“Indonesia 10 tahun ke depan krisis profesi petani pak. Contohnya di kita. Dealnggu, jiwa 6000 data BPS 2021. Data Desa Delanggu menyebutkan ada 33 RT, 11 RW dengan jumlah jiwa 6000 sekian, DPT-nya 4000 sekian. Profesi petani hanya 60 orang. Padahal Delanggu *icon*-nya beras. Di forum-farum HKTI, kabupaten, kurangi seremoni pelatihan yang skupnya kecil...*useless*. Bikin regulasi yang benar-benar menrik anak muda untuk terjun pak, reforma agraria, redistribusi lahan. Itu baru.... Nah sekarang satu patok hasilnya delapam juta, dibagi dua. Hasilnya empat juta, dikurang ongkos garap 1,5 juta, hasilnya dibagi dua. 2,5 juta rupiah ...dibagi empat bulan, tidak mencapai 500 ribu rupiah. Lajangpun hasil itu tidak cukup..... tapi intinya biar nggak ada pembagian hasil panen. 60 orang petani kami, 90% usianya di atas 55 tahun. 10 tahun lagi, nyangkut di sawah sudah *repo lho*. Tiga orang 30-40 tahun. Yang dua orang kerja karena terpaksa, bukan cita-cita. Mungkin *njih*, Delanggu itu seperti juga di Bekasi. Sebelum jadi satelitnya Jakarta pak. Sekarang *amboradul*.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022)

Dari berbagai data hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, Sanggar Rojolele menjadi satu diantara komunitas yang ada di Klaten yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, maupun perilaku kelompok sosial-masyarakat yang merusak lingkungan, eksploitatif terhadap rakyat atau masyarakat lain, dan sebagainya. Mereka berupaya untuk memihak rakyat yang terpinggirkan, membantu mereka untuk mendapatkan keadilan dalam pola interaksi sosial. Adapun

sebagai medianya dapat berupa seni-budaya, komunikasi politik, hingga aksi turun ke jalan jika diperlukan.

Jika dilihat dari perspektif Eksan dalam memandang masyarakat seperti dinarasikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Eksan memiliki ideologi Marxian. Diantara ciri ideologi Marxian adalah memandang masyarakat menjadi dua kutub borjuis dan proletar, serta pola hubungan keduanya yang bersifat hegemonistik-eksploitatif (Elster, 1986). Disamping itu dilihat dari pemihakannya terhadap mereka yang lemah atau dilemahkan, sikap kritis terhadap sistem sosial yang eksploitatif, perjuangannya yang progresif, maka Sanggar dapat dikatakan memiliki ideologi kiri.

“Kiri” dan “Kanan” merupakan simbol dari tipologi ideologi. Christopher Hibert, “The French Revolution dalam Shimogaki (1993), menyatakan bahwa sejak revolusi Perancis, kelompok radikal, kelompok Jacobin mengambil sisi kiri dari kursi Ketua Kongres Nasional. Sejak itu “kanan” dan “kiri” sering dipakai sebagai terminologi politik. Secara umum “kiri” diartikan sebagai partai yang cenderung radikal, sosialis “anarkis”, reformis, progresif, liberal.

Marxian dan “kiri” tidak identik dengan komunisme-atheis. Marxian, lebih menggambarkan cara Sanggar dalam memahami permasalahan petani Delanggu. Sanggar mempetakan masyarakat Delanggu terdiri dari masyarakat “*the have*” atau kapitalis-borjuis yang terdiri dari pengusaha beras dan tuan tanah di satu sisi, serta kelompok sosial “*the have not*” yang terdiri dari petani penggarap dan buruh tani di sisi yang lain. Sanggar juga melihat pola hubungan keduanya yang cenderung eksploitatif. Sementara itu, “kiri” karena pemihakannya terhadap kaum yang dilemahkan. Pemihakan tersebut tampak dalam berbagai kegiatan Sanggar, mulai dari pembinaan internal untuk peningkatan kapasitas petani, negosiasi Sanggar dengan berbagai pihak, dari budayawan, politisi, hingga birokrasi pemerintah dalam rangka melahirkan kebijakan yang memihak petani, hingga pertunjukan seni-budaya yang menyentak kesadaran kelas petani sebagai kelas sosial yang terpinggirkan. Di samping itu, Sanggar juga melakukan upaya yang cukup radikal

berupa cita-cita sekaligus ikhtiarnya dalam mewujudkan keadilan untuk kaum yang terpinggirkan tersebut. Hal itu tampak pada gagasan Sanggar tentang reformulasi lahan persawahan yang senantiasa diperjuangkan oleh Ikhsan maupun Sanggar di manapun dan kapanpun ia berjuang. Hal tersebut dinyatakan informan dalam wawancara berikut:

“Saya masih yakin, seniman-seniman Klaten yang kiri itu banyak. Nah, itu kita manfaatkan saja untuk menarik perhatian publik. Tanpa harus menjadi kiri. Tapi kita bukan kiri yang atheis komunis kok pak. Tapi kritis. Tapi sejak th 2017 akhir-2018, semacam ada evaluasi dengan gerakan Peduli Klaten. Ayo kalau gerakan kita itu monumental, tidak fokus pada masing-masing, lama-lama gerakan ini kurang mengakar. Maka karena lingkungan kita itu pertanian ya sudah fokus ke pertanian. Yang diangkat Delanggu, sejak th 2018, kita diajak Dinas Pertanian Klaten untuk uji Rojolele, setelah Desa Gempol itu. Ya di balik semua itu ada deal-deal orang-orang yang saya sebut tadi pak. Di balik gerakan Peduli Klaten, Gelora Nusantara, ada semacam lobi yang orang di desa tadi yang orang desa ini gak bisa lihat. (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Reforma agraria sendiri diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah. Gagasan baru tentang redistribusi tanah misalnya redistribusi tanah pertanian untuk pekarangan dengan luasan tertentu serta kriteria penerima redistribusi, harusnya dilihat dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, kegiatan redistribusi tanah perlu didukung oleh sinergi dan koordinasi antar lembaga yang berperan dan bertanggungjawab terhadap program reforma agraria (Sumardjono, 2008).

Redistribusi lahan sesungguhnya berawal dari adanya pembaharuan undang-undang tentang agraria atau sering disebut dengan reforma agraria. Reformasi agraria didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian (pasal 2 Tap MPR IX/2001). Dalam kalimat tersebut dapat dipahami bahwa reforma agraria menyakuti dua hal; pertama, tentang penguasaan dan pemilikan di satu sisi; kedua, mengenai penggunaan serta pemanfaatan di sisi

lainnya. Kedua sisi tersebut digambarkan sebagai dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan (Sutomo, 2011).

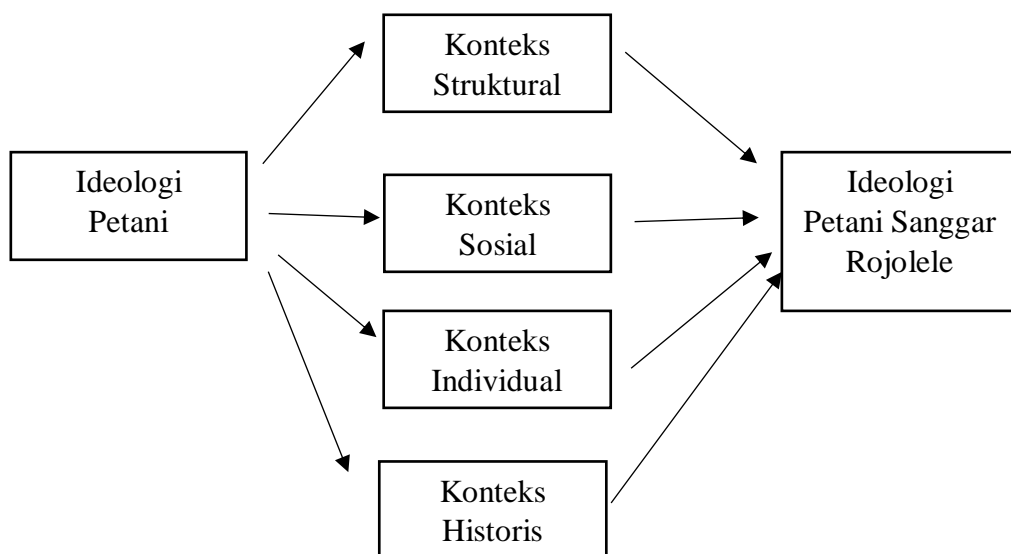
Munculnya gerakan kiri di Klaten juga akibat permasalahan konflik agraria yang terjadi semenjak Kabupaten Klaten menjadi bagian wilayah Kerajaan Kasunanan Surakarta (setelah perjanjian Giyanti, 1975). Delanggu atau Klaten dipilih oleh penjajah sebagai sentra perkebunan tempakau dan tebu. Berikutnya di sekitar Delanggu kemudian dibangun beberapa pabrik gula yang dikelola oleh penjajah dan digunakan sebagai penyedia kebutuhan mereka. Pemilihan Delanggu atau Klaten sebagai pusat perkebunan tersebut menjadikan masyarakat Delanggu - Klaten khususnya para petani harus menyewakan lahan persawahan mereka untuk kebutuhan penanaman tembakau dan tebu. Akibatnya, petani kehilangan penghasilan mereka dari sawah. Dari sinilah awal munculnya sumber penderitaan rakyat akibat. Penyewaan lahan sawah oleh perusahaan yang dikelola penjajah ketika itu menggunakan sistem *glebagan* (pemaksaan penyewaan tanah secara bergantian dengan harga sewa yang jauh lebih rendah dari biasanya). Akibatnya tanah garapan petani berkurang setengahnya karena ditanami tanaman perdagangan seperti tembakau oleh perusahaan Barat.

Awal abad XX terdapat perubahan kebijakan agraria yang menimbulkan konflik kepemilikan tanah karena terjadi polarisasi kepemilikan lahan pertanian, di satu sisi banyak petani tanpa tanah dan di lain pihak sedikit petani yang memiliki tanah yang luas. Dampak kebijakan tersebut yang berlarut-larut menyebabkan kemiskinan struktural masyarakat khususnya Kabupaten Klaten yang menjadi bagian Kasunanan Surakarta. Salah satu ekspresi gerakan kiri di masa awal kemerdekaan adalah penentangan terhadap kekuasaan Kasunanan Surakarta dalam bentuk Gerakan Anti Swapraja. Bentuk gerakan ini antara lain membagi-bagikan tanah yang kosong kepada petani yang tidak memiliki tanah dan miskin dengan memberikan dukungan dana untuk mengusahakan tanah tersebut (Purwanta, 2014).

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa ada beberapa bagian yang menjadi dasar pembentukan ideologi komunitas Sanggar Rojolele, yaitu; pertama, konteks

struktural yang melingkupi Sanggar Rojolele, yaitu ketidakberpihakan pemerintah dalam membantu kesejahteraan petani. Bagaimana pemerintah menyikapi askes pupuk, bibit dan juga harga jual beras saat panen raya yang tidak dilindungi serta isu redistribusi lahan. Kedua, konteks sosial yaitu perubahan sosial yang dialami petani akibat modernisasi yang dijalankan pemerintah, yang telah memungkinkan para petani menjadi partisipatif terhadap kehidupan berpolitik dengan ideologinya. Partisipasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antar sesama warga petani, maupun interrelasi yang insentif dengan kelompok-kelompok sosial politik dari luar. Misalnya pola hubungan petani Rojolele dengan Lembaga Pemberdayaan Petani NU (LPPNU). Ketiga, konteks Individual, di mana kondisi mental para petani memiliki harapan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan reforma agraria untuk redistribusi lahan. Untuk mewujudkan ide dan gagasan tersebut petani mesti memiliki kekuatan yang besar, solid, dan kuat. Kekuatan tersebut setidaknya untuk saat ini masih jauh panggang dari api (Azhar, 1999). Jika boleh menambahkan, ideologi sasi gerakan Sanggar Rojolele sebenarnya juga didorong oleh konteks historis, yaitu dinamika ideologi-politik, sosial, ekonomi masyarakat Delanggu yang terjadi dalam sejarah Delanggu selama ini.

Gambar 4.14. Dinamika pembentukan ideologi Sanggar Rojolele



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa konteks struktural, sosial, individual, dan historis, menjadi faktor yang mendorong lahirnya landasan ideologi petani sanggar yang menggambarkan perilaku petani.

## **BAB V**

## **HEGEMONI KAPITALISME DAN RESISTENSI PETANI DELANGGU**

Delanggu adalah nama salah satu desa dan kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Namaun dalam penelitian ini yang dimaksud Delanggu adalah Desa Delanggu. Sesuai dengan posisi geografisnya, Delanggu memiliki kekhasan yang berupa daerah penghasil beras Rojolele kelas premium. Bahkan, bukan hanya Rojolele, tetapi apapun jenis padi yang ditanam di Delanggu menghasilkan beras yang memiliki citra rasa yang istimewa (Wawancara dengan Camat Delanggu, 7 Juli 2022). Keistimewaan Delanggu disebabkan oleh posisi geografisnya yang persis di bawah lereng sebelah timur Gunung Merapi. Posisi geografis tersebut berdampak pada jenis tanah. Delanggu memiliki jenis tanah regosol kelabu, yaitu tanah campuran antara tanah liat dengan batuan kapur, serta lapisan kelabu yang berasal dari abu gunung Berapi saat meletus ratusan tahun yang lalu, sehingga tanah tersebut memiliki banyak kandungan mineral dan gembur. Jenis tanah tersebut sangat baik untuk pertanian (Kartasapoetra, 1991).

Air yang digunakan untuk mengairi sawah Delanggu juga berasal dari mata air berkualitas sangat baik, yaitu mata air Cokro Tulung. Mata air Cokro Tulung dikenal dengan mata air yang mengandung banyak mineral. Jarak antara Cokro Tulung dengan Delanggu yang relatif tidak jauh, menjadikan mineral air tersebut belum banyak terbuang. Apalagi ditunjang dengan sistim sarana irigasi yang sangat bagus, maka tidak banyak mineral air yang terbuang di jalan. Mineral-mineral tersebut akhirnya menjadi nutrisi bagi tanaman padi di Delanggu. Faktor air merupakan faktor penting untuk menghasilkan beras berkualitas premium dari Delanggu (Qadavi, 2022).

Dengan keistimewaannya tersebut, Delanggu telah lama dikenal sebagai daerah penghasil beras kelas premium di hampir seluruh Indonesia. Dengan kekhasan sebagai penghasil beras premium tersebut Delanggu menjadi sebuah

*brand* besar beras premium. Dengan “kebesarannya” tersebut, lahirlah semacam adagium yang menyatakan “Delanggu (kota kecamatan) lebih besar dari Klaten (kota kabupaten)”. Hingga kini *brand* “beras Delanggu” identik dengan beras kualitas premium. Tidak mengherankan jika *brand* “beras Delanggu” digunakan oleh para pedagang beras seluruh Indonesia untuk menarik pelanggannya (P. Suseno, 2021). *Brand* tersebut menjadi semacam alasan bagi para pedagang beras untuk menggunakan *brand* “Beras Delanggu” untuk melabeli atau membranding beras mereka. Sekalipun beras tersebut tidak berasal dari Delanggu. Akibatnya banyak beras menggunakan *brand* “Beras Delanggu” tidak bercita rasa sebagai beras premium. Dari sinilah *brand* “Beras Delanggu” mulai rusak.

Delanggu dikenal sebagai penghasil beras Rojolele, jenis beras yang memiliki citarasa wangi, enak, dan pulen. Padi Rojolele memerlukan masa tanam yang lama, sekitar lima bulan, berbulu, tinggi tanaman hampir 1,5 m. Dengan ciri khasnya tersebut, beras Rojolele memiliki harga yang jauh lebih mahal dari jenis beras lainnya. Sehingga wajar jika dalam sejarahnya, beras Rojolele hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas, kelas priyayi dan raja-raja (P. Suseno, 2021).

Dengan keistimewaannya pula, Delanggu menjadi daerah yang pertaniannya maju, petaninya makmur dan sejahtera. Namun seiring dengan terjadinya perubahan sosial-budaya nasional maupun global, kisah sukses tersebut tidak berlanjut sampai saat ini. Terutama karena kapitalisme dalam bidang pertanian, *icon* Delanggu sebagaimana didiskripsikan di atas, pada beberapa dekade belakangan ini mulai memudar, dan cenderung menjadi masalah. Pada bab ini akan dibahas permasalahan sejauhmana hegemoni kapitalisme pertanian di Delanggu, serta bagaimana resistensi (perlawanan) yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani. Oleh karena itu bahasan berikut akan terdiri dari dua bagian besar, yaitu hegemoni kapitalisme di Desa Delanggu dan kedua, perlawanan (resistensi) petani Delanggu terhadap hegemoni tersebut.

## **A. Hegemoni Kapitalisme di Desa Delanggu**



Sebagai ideologi terbesar dunia, pengaruh kapitalisme begitu massif dan sistematis terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Sekalipun secara legal formal kenegaraan sistem sosial ekonomi negara berdasarkan Pancasila, namun pada kenyataannya sistem sosial ekonomi yang berjalan secara empiris adalah sistem kapitalisme. Hampir semua sektor kehidupan mulai dari ekonomi, pendidikan, seni-budaya, agama, hingga pertanian, tidak lepas dari hegemoni kapitalisme. Demikian juga secara geografis, cakar-cakar kapitalisme telah mencengkeram berbagai bidang kehidupan masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok desa.

Salah satu nilai dasar dari kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan usaha guna mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli individu maupun komunitas masyarakat tersebut memiliki modal kecil maupun besar akan bersaing secara bebas. Satu-satunya aturan yang ditaati dalam kapitalisme ekonomi adalah hukum pasar. Pemodal besar dapat menguasai alat-alat produksi dan akhirnya menguasai pasar. Akibatnya tentu bisa ditebak, bahwa pemodal kecil dapat dengan mudah dikalahkan oleh pemodal besar.

Dalam bidang pertanian, pemodal besar dapat menguasai alat-alat produksi pertanian, seperti tanah, perusahaan penggilingan padi, alat transportasi, modal berupa uang, sehingga dapat mengatur pasar. Sebaliknya si pemodal kecil akan terkalahkan dan terpinggirkan dalam persaingan tersebut. Demikian pula yang terjadi di Desa Delanggu. Tuan tanah, pengusaha beras, pemilik perusahaan penggilingan padi, perusahaan pupuk dan obat pertanian, para petani penggarap dan buruh tani, masing-masing sebagai kelompok sosial yang berinteraksi dalam suatu pola hubungan antara borjuis dan proletar yang hegemonistik. Bagaimana persaingan di antara mereka, dapat didiskripsikan dalam bahasan berikut.

## **1. Kepemilikan Lahan**

Salah satu alat produksi dalam bidang pertanian adalah lahan. Dibandingkan dengan dengan alat produksi yang lain, seperti mesin pembajak, lahan adalah alat produksi yang paling pokok. Siapa pemilik lahan pertanian, dialah yang menguasai pertanian. Oleh karena itu, kepemilikan lahan bagi petani adalah segalanya. Lahan menjadi sumber penghidupan mereka. Namun sayangnya, pada saat kapitalisme dianut oleh suatu masyarakat atau negara, maka kepemilikan lahan menjadi alat produksi yang secara otomatis menjadi milik petani. Tanah atau lahan menjadi modal yang dikuasai oleh segelintir orang, yaitu para pemilik modal. Sedang petani bisa jadi hanyalah tenaga kerja atau buruh dalam industri pertanian, yang menempati posisi sejajar dari berbagai komponen produksi pertanian lainnya. Hasil produksi pertanian tidak secara otomatis menjadi milik petani, melainkan milik pemilik modal atau pengusaha di sektor pertanian tersebut.

Karena posisi strategis lahan sebagai alat produksi, maka kepemilikan lahan atau tanah sering menjadi problem sosial. Perselisihan tanah sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu, baik antara rakyat dengan penguasa, maupun antara rakyat dengan pemilik modal (*capital*). Diantara konflik agraria yang cukup monumental adalah terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintah berada di balik pengusaha menyerobot tanah petani untuk pembuatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) (Fakih, 1995). Belakangan ini konflik agraria kembali terjadi antara lain di Mukomuko-Bengkulu (Aryanto, 2022), kemudian di Desa Wadas Purworejo (Suprana, 2022). Bahkan menurut Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2021, sedikitnya 207 konflik agraria dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia (Mantalean, 2022).

Delanggu sebagai daerah pertanian dengan kesuburan tanah yang istimewa, menempatkan lahan persawahan pada posisi yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu tidak heran jika banyak orang yang menginginkan untuk memiliki tanah persawahan di Delanggu. Sekalipun belum berbentuk konflik, namun kepemilikan lahan persawahan di Delanggu berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Gambar 5.1. Lahan sawah Delanggu yang subur (Ilustrasi)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Secara umum berdasarkan data BPS 2021, dapat dijelaskan bahwa Desa Delanggu memiliki 71,15 Ha lahan sawah atau 54 % dari keseluruhan luasnya. Sedangkan menurut Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Pemerintah Desa Delanggu tahun 2021, dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani hanya sejumlah 18 orang dan 15 orang buruh tani atau sekitar 0,005 % dari keseluruhan jumlah penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan EH, didapatkan data yang lebih *uptodate*, yakni 95% dari petani Desa Delanggu tidak memiliki lahan sendiri. Artinya 95% petani Desa Delanggu adalah petani penggarap (Wawancara dari EH pada 12 Juni 2022). Petani penggarap adalah petani yang menggunakan lahan milik orang lain untuk bercocok tanam sebagai petani.

Dari data di atas memunculkan pertanyaan, jika 95 % petani di Delanggu adalah petani penggarap, lalu siapakah pemilik lahan persawahan tersebut? Dari data di lapangan ditemukan adanya kepemilikan lahan pertanian yang tidak merata di Delanggu. Ada sebagian besar petani tidak berlahan, dan sebagian lainnya memiliki lahan yang terlalu banyak. Seperti disebutkan di atas, Delanggu memiliki 70-an Ha sawah. Dari luas sawah tersebut, 20 % diantaranya dimiliki oleh satu orang sebut saja nama WR.

Sebenarnya kepemilikan tanah oleh tuan tanah ini terjadi pada dua dekade terakhir ini saja. Sebelumnya hampir semua petani di Delanggu memiliki lahan sawah sendiri, sehingga kehidupan petani masih sejahtera. Namun seiring dengan perubahan sosial budaya di tingkat nasional maupun lokal, kepemilikan sawah ini berubah. Beberapa orang pemilik lahan sawah yang *notabene* petani kemudian menjual sawah mereka.

Berdasarkan penuturan beberapa informan didapatkan data bahwa para petani menjual sawah mereka karena alasan-alasan tertentu, yaitu; a) Anak keturunan tidak mau menjadi petani. Sebenarnya orang tua mereka pada masanya dahulu memiliki lahan persawahan satu hingga dua pathok. Ketika orang tua mereka itu uzur (meninggal) kemudian anak keturunannya sudah sukses sebagai ASN atau profesi lainnya non-pertanian. Akhirnya ahli waris tersebut menghendaki untuk menjual sawah orang tua mereka. Kasus seperti ini yang paling banyak terjadi di Delanggu. Informan berikut menyampaikan data penyebab penjualan sawah oleh petani Delanggu.

“Masa dahulu sebenarnya hampir semua petani memiliki sawah sendiri. Factor lain mereka menjual karena keturunan sudah tidak ada yang mau Bertani, akhirnya sawah dijual dan dibeli jendral. Sekarang kebanyakan petani adalah petani penggarap.” (Wawancara oleh PR pada tanggal 6 Juli 2022)

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Ketua Sanggar Rojolele, Eksan Hartanto,

“Karena sistim waris kita saat ini sudah salah kaprah. Sekarang apa ada orang punya sawah? Karena orang tua petani mewariskan sawahnya ke bukan petani, sehingga sawah tidak digarap sendiri tapi disewakan. (Wawancara dengan EH pada tanggal 12 Juni 2022)

b) Ahli waris tidak tinggal di Delanggu. Ahli waris menjual sawah tinggalan orang tua mereka karena semua ahli waris (anak) tidak ada yang tinggal di Delanggu. Oleh karena itu mereka menjual sawah peninggalan orang tuanya, dengan alasan tidak bisa mengelolanya. Seperti yang dialami anak-anak alm. Mbah Sastro. Tiga orang anak Mbah Sastro saat ini tinggal di Jakarta dan sudah sukses.

Satu pathok sawah tinggalkan almarhum sudah dijual. Yang tersisa tinggal rumah almarhum, yang saat ini dipinjamkan untuk markas Sanggar Rojolele (Wawancara dengan EH pada tanggal 20 Mei 2022).

c) Ahli waris lebih dari satu. Ahli waris yang lebih dari satu orang cenderung menjual sawah peninggalan orang tua mereka, dalam rangka membagi warisan ke seluruh anaknya. Membagi warisan dalam bentuk uang *cash* jauh lebih mudah dan praktis. Ada juga berapa petani yang menjadi petani penggarap atas sawah dari orang taunya sendiri. Ahli waris yang terdiri dari beberap orang itu membuat kesepakatan untuk tidak menjual warisan yang berupa lahan sawah tersebut. Hasil pertaniannya saja yang secara bergantian dibagi setiap tahun. Seperti yang dialami oleh Sriyono (52 tahun). Ia sebagai satu-satunya anak dari empat saudaranya lainnya, yang masih tinggal di Delanggu. Ia mengelola sawah milik almarhum orang tuanya, dan hasilnya diberikan kepada semua saudaranya secara bergilir. Hampir semua petani menyatakan anak-anak mereka tidak ada yang menjadi petani. Di antara anak-anak para petani itu ada yang berwiraswasta dan sebagiannya bekerja di pabrik sekitar Delanggu (Wawancara dengan SR, SY dan TR pada 12 Juli 2022).

Seorang demi seorang petani Delanggu menjual sawahnya kepada pemilik kapital yang bernama WR. Diceritakan oleh masyarakat bahwa pada saat-saat pembelian sawah tersebut kekayaan WR seperti tidak terbatas. Setiap habis transaksi sawah WR mengadakan syukuran yang mengundang tetangga-tetangganya satu Rukun Warga (RW). Selain mendapatkan jamuaan, serta hiburan yang ditampilkan, semua yang menghadiri acara tasyakuran akan mendapatkan uang saku yang bervareasi mulai Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Hal tersebut berdampak pada legitimasi WR sebagai pemilik kapital yang seolah tidak terbatas. WR menjadi satu-satunya pembeli sawah di Delanggu, karena hanya dia yang berani membeli dengan harga sangat tinggi jika diukur dengan standar harga tanah saat itu. Hal ini dikatakan seorang informan sebagai berikut:

“Pak WR punya 70 patok se desa. WR membeli semua dari penjual sawah. Tidak ada saingan karena berani membeli dengan harga mahal. Petani tidak bisa bersaing dengan dia. Sistem lainnya yang menguatkan, WR membeli sawah, tetapi sawah masih digarap oleh yang punya dengan sistem *paron*.” (Wawancara dengan beberapa anggota Sanggar Rojolele pada tanggal 12 Juni 2022)

Akhirnya WR ini berhasil memiliki 70 pathok sawah atau sekitar 14 Ha. Sawah-sawah itu kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Kira-kira satu pathok sawah didirikan rumah untuk anak WR. Satu pathok yang lain digunakan sebagai pemakaman keluarga. Dua pathok sawah ditanami pohon jati. Sebagian sisanya diolah oleh para petani penggarap dengan sistem *paron*. Untuk setiap petani penggarap bisa menggarap satu, dua, hingga tiga pathok sawah milik WR. Hal ini dinyatakan oleh informan sebagai berikut:

“WR adalah penguasa tanah di Delanggu. Ia punawirawan jenderal TNI. Ia memiliki 14 ha, 20% wilayah Delanggu. Petani2 ini yang menggarap, ada yg dua, tiga, empat patok. .... Pada awal-awal pembelian, masih a.n pak WR sendiri. Tapi belakangan ini a.n. anaknya. Karena saat awal beli, beliau masih dinas. Ia hanya transfer uang nya.” (Wawancara dengan beberapa petani anggota Sanggar Rojolele pada 12 Juni 2022)

Kerjasama antara WR dengan petani penggarap menggunakan sistem *paron*. WR sebagai pemilik sawah memberikan subsidi kepada penggarap untuk membantu biaya operasional sawah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada masa panen, seorang petani penggarap berhak mendapatkan setengah dari keseluruhan hasil panen, dikurangi biaya operasional satu kali musim tanam. Jika setiap pathok sawah ia mendapatkan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), dan biaya operasional setiap musim tanam untuk satu pathok sawah sebesar Rp 1.500.000, maka penghasilan bersih seorang petani penggarap hanyalah Rp 2.500.000. Untuk satu tahun dengan tiga kali panen, penghasilan seorang petani penggarap sebesar  $Rp. 2.500.000 \times 3 = Rp 7.500.000$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu, jumlah total penghasilan WR sebagai tuan tanah, adalah  $Rp 4.000.000 \times 70 = Rp 280.500.000$  sekali panen. Dalam masa satu tahun ia akan

mendapatkan penghasilan Rp 280.000.000 X 3 = Rp 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Dari angka-angka tersebut, hasil yang diperoleh WR dalam setahun memang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan nilai uang yang diinvestasikan. Namun akan menjadi sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan petani penggarap yang bekerja pada WR. Di sinilah kesenjangan sosial itu menjadi nyata di Desa Delanggu.

WR inilah yang dalam teori Karl Marx tentang lima fase perkembangan masyarakat pada fase feodal disebut sebagai tuan tanah. Sementara petani yang lain menjadi petani penggarap atau buruh tani. Penguasaan alat produksi berupa tanah oleh segelintir orang ini menjadikan kesenjangan sosial ekonomi di Delanggu. Tuan tanah benar-benar menguasai dan mengatur pasar jual beli aset produksi.

Dalam interaksi sosial, hubungan antara tuan tanah dengan buruh tani atau petani penggarap sebenarnya dapat dikatakan tidak harmonis. Semacam ada kecemburuan sosial. Petani penggarap sebenarnya merasakan ketertindasan. Mereka merasakan kesulitan hidup yang susah diatasi atas usaha mereka sendiri. Mereka merasa menjadi kurban atas ketidakadilan sistim sosial yang sedang berjalan. Solusi kultural yang dilakukan berbagai pihak dengan cara pemberdayaan masyarakat tani, mereka rasakan sebagai sesuatu yang kurang bermakna (*absurd*). Mereka berharap ada pendekatan struktural yang pada suatu saat akan dilakukan oleh pemerintah. Sistim sosial yang menghasilkan kesenjangan sosial tentulah sesuatu yang tidak sehat, sehingga harus diupayakan perubahan sebagai solusinya.

## **2. Petani Penggarap dan Kemiskinan Struktural**

Sebagai kosekuensi dari status petani penggarap, kehidupan sosial ekonomi petani berada dalam situasi sulit. Petani menggarap harus membagi hasil panennya menjadi dua bagian; satu untuk dirinya dan sebagian lain untuk pemilik lahan. Ada beberapa bentuk pembagian hasil yang dilaksanakan di Delanggu. Pertama, *paron*. Yang dimaksud *paron* adalah hasil panen dibagi dua dengan ukuran yang sama. Biasanya pemilik lahan memberikan subsidi biaya kepada petani penggarap sebesar

Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali musim tanam, setiap pathok. Ada juga yang disebut *seprotelon* (sepertigaan). Yang dimaksud *seprotelon* adalah petani penggarap hanya mendapatkan pembagian hasil panen sepertiga bagian. Pertigaan ini dilakukan dengan ketentuan petani penggarap tidak mengeluarkan biaya operasional. Semua pembiayaan menjadi tanggung jawab pemilik lahan.

Sistim pembagian hasil tersebut di atas sudah berjalan di Delanggu sejak jaman dahulu hingga kini. Suatu sistim kerjasama yang dianggap adil. Yang pasti, status sebagai petani penggarap adalah suatu persoalan tersendiri bagi petani. Jika hasil pertanian saja masih dihargai sangat kecil, apalagi untuk petani penggarap. Bagi petani penggarap, bagaimanapun hasil pertanian yang diperoleh pada saat panen, masih harus dibagi dua. Seiring dengan semakin mahalanya biaya produksi yang tidak diiringi dengan kenaikan harga hasil pertanian saat panen, maka penghasilan petani semakin mengecil. Terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh petani penggarap pada jaman dahulu dengan saat sekarang ini. Hal tersebut dinyatakan seorang informan sebagai berikut;

“*Klu dulu coro buruh mrapat mawon pun saget ngge urip. Sekarang hasilnya tidak menjanjikan, makanya ya tidak ada anak muda mau bertani. Lebih suka di pabrik. Tenaga-tenaga tander itu juga sudah banyak yang tua.*” (Wawancara dengan TR dan YT pada tanggal 6 Juli 2022)

Maksud dari pernyataan di atas adalah pada jaman dahulu, bagi seorang petani penggarap, pembagian hasil panen masih bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk menyekolahkan anak, biaya hidup sehari-hari, dan sebagainya. Bahkan bisa juga untuk ditabung dalam bentuk emas. Namun tidak dengan saat sekarang ini. Hasil panen terlalu sedikit jika dibanding dengan biaya yang harus ditanggung oleh petani untuk menggarap sawahnya. Variabel lain yang menjadikan beban hidup petani penggarap semakin berat adalah biaya hidup yang juga semakin tinggi pada satu sisi, serta tidak diimbangi dengan kenaikan harga hasil pertanian. Oleh karena itulah, keberlakuan sistim *paron* atau *seprotelon* bagi



petani penggarap merupakan bagian dari struktur sosial penyebab kemiskinan yang mereka alami.

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa biaya operasional sawah untuk setiap pathok pada saat ini menghabiskan dana Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun hasil panen untuk satu petak sawah sekitar Rp 8.000.000 (empat juta rupiah). Untuk petani penggarap, hasil tersebut harus dibagi dengan pemilik lahan. Oleh karena itu seorang petani penggarap hanya mendapatkan pembagian hasil Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Sebagai hasil bersihnya, dana Rp 4.000.000 tersebut dikurang biaya operasional sebesar Rp 1.500.000, sehingga sisa bersih hasil petani sebenarnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) selama satu kali masa tanam (empat bulan). Dengan demikian hasil tiap bulannya adalah Rp 2.500.000 dibagi empat. Sebagai hasil akhirnya, petani penggarap mendapatkan sekitar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah tiap bulan). Penghasilan petani tersebut masih bersifat fluktuatif, bergantung pada biaya bibit, pupuk, dan obat yang cenderung naik dari waktu ke waktu.

Angka Rp 500.0000 hingga Rp 600.000 sebulan tentu merupakan angka yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) dari hampir semua daerah di Indonesia pada saat sekarang ini, yang berada pada kisaran Rp 1.800.000 hingga Rp 2.000.000. Dana tersebut tentulah terlalu jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan primer sehari-hari petani, mulai dari makan, tempat tinggal, maupun biaya pendidikan anak-anak mereka. Jika pendidikan (sekolah) anak petani tidak bisa optimal dilakukan tentu akan berdampak pada kualitas SDM mereka. Dengan kualitas SDM yang rendah, maka petani dan anak keturunannya akan semakin kesulitan untuk *survive* di negeri ini pada saat mendatang. Dengan memperhatikan angka-angka di atas dapat dipahami jika petani merupakan profesi yang terpinggirkan secara struktural. Artinya serajin dan se-sholeh apapun, jika seseorang menjadi petani harus siap hidup dalam kemiskinan. Sistem pertanianlah yang menjadikan mereka miskin. Beban berat seorang petani Delanggu tersebut disampaikan oleh serorang informan berikut:

“*Negoro ora mikir rakyat. Dulu kalau kita panen bisa beli apa-apa, nyelengi emas. Dulu garap dua patok saja sudah cukup. Tapi sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena biaya operasional sekarang tinggi, sementara harga jual tetap. Kalau beras harganya naik sedikit saja, orang protes. Pemerintah malah impor. Akhirnya harga turun.*” (Wawancara dengan TR pada tanggal 6 Juli 2022)

Persoalan berikutnya adalah apakah hubungan kemiskinan petani pada umumnya dan terlebih petani penggarap di Delanggu dengan kapitalisme? Kapitalisme membebaskan akumulasi modal hingga jumlah yang tidak terbatas pada diri seseorang. Akumulasi modal tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menguasai alat produksi. Dari sinilah pemilik modal akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pola hubungan sosial yang berjalan. Dalam konteks pertanian, akumulasi modal diwujudkan dalam bentuk lahan, pabrik penggilingan padi, alat transportasi, pengusaha pupuk, bibit, dan obat dan seterusnya. Siapapun yang menguasai alat-alat produksi tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal.

Dalam hal kepemilikan lahan, Kapitalisme melahirkan dua kelompok sosial dalam masyarakat pertanian. Tuan tanah pada satu sisi dan para petani penggarap atau buruh tani di sisi yang lain. Pada awalnya proses penjualan sawah merupakan efek samping dari gelombang kapitalisme yang masif terjadi di Indonesia. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa intensifikasi pertanian menjadi pintu masuk kapitalisme di sektor pertanian. Petani begitu bergantung pada industri pertanian, baik dalam hal penyediaan bibit, pupuk, maupun obat. Hal itu berdampak pada biaya produksi pertanian yang semakin tinggi. Sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan subsidi khususnya untuk pupuk tertentu, seperti Orea dan Ponska. Namun jatah pupuk bersubsidi tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pupuk petani. Sebagai gambaran, untuk satu pathok sawah membutuhkan pupuk Orea sebanyak 1,5 - 2 kuintal. Sementara jatah pupuk bersubsidi hanya 30 kg. Kenyataan ini masih ditambah dengan sulitnya petani mendapatkan pupuk tersebut. Pernyataan informan ini menggambarkan kesulitan petani sebagaimana dijelaskan di atas;

“Pupuk Orea subsidi seharga Rp 120.000. Pupuk yang tidak subsidi dari Kujang, 0,5 kuintal seharga Rp 500.000. *Lha niku kan ora tekan*. Yang subsidi tinggal Orea dan Ponska. Sekarang pupuk dasar TPSP sudah tidak ada. *Duko diilangke teng pundi*. Padahal yang bisa memperbaiki tanah itu TPSP. Tapi sekarang malah hilang. TPSP itu membuat gembur tanah.” (Wawancara dengan TR, SR, dan YT pada tanggal 6 Juli 2022)

Di sisi lain, hasil produksi pertanian tidak mengikuti kenaikan biaya produksi tersebut. Semua itu berakibat semakin beratnya beban hidup menjadi petani. Petani menjadi profesi yang terpinggirkan. Akibatnya, petani menjadi profesi yang tidak diminati oleh generasi muda. Anak petani tidak mau menjadi petani seperti orang tua mereka, karena menjadi petani identik dengan menjadi miskin atau termiskinkan. Petani melahirkan ahli waris yang bukan petani. Dari sinilah awal mula penjualan lahan pertanian terjadi di Delanggu. Penjualan lahan pertanian terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Sementara ada pemilik modal berupa uang yang dapat dikatakan tidak terbatas. Pemilik uang inilah yang kemudian berpotensi untuk membeli semua lahan persawahan yang dijual oleh petani. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kapitalisme telah melahirkan tuan tanah dan petani penggarap, serta buruh tani. Mereka hidup dalam kesenjangan sosial yang tidak bisa dibiarkan ketika kita hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **3. Degenerasi Petani**

Dampak lain dari kesulitan yang dialami petani pada umumnya sebagaimana dijelaskan di atas, menjadikan petani bukan profesi yang ideal bagi anak muda. Anak keturunan petani tidak lagi memilih petani sebagai profesinya. Di antara mereka bekerja sebagai wirausaha dan bahkan sebagian yang lain memilih sebagai karyawan pabrik. Dari 60 petani Delanggu, 90% di antaranya sudah berusia di atas 55 tahun, tiga orang lainnya berusia 30-40 tahun. Dua dari tiga orang yang terakhir disebut menyatakan menjadi petani karena terpaksa. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara berikut:

“60 orang petani kami, 90% usianya di atas 55 tahun. 10 tahun lagi, nyangkut di sawah sudah *repo lho*. Tiga orang berusia 30-40 tahun. Yang dua orang kerja karena terpaksa, bukan cita2. Mungkin njih, delanggu itu menjadi seperti juga di Bekasi, sebelum jadi kota satelitnya Jakarta Pak.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022).

Dari data di atas, menjadi jelas bahwa kapitalisme yang terjadi telah menghasilkan kesenjangan sosial di Delanggu, dengan menempatkan petani pada posisi tertindas dan sebaliknya kelompok borjuis di antaranya adalah tuan tanah berposisi sebagai penindas. Akibat domino yang ditimbulkan berikutnya adalah terhentinya proses regenerasi petani. Jika tidak diatasi secara tuntas, maka sepuluh tahun mendatang akan terjadi krisis petani di Delanggu, sehingga Delanggu dengan *icon* daerah penghasil beras premium akan tinggal cerita. Persoalan tersebut telah disadari oleh berbagai kalangan, dari para aktivis pertanian, hingga pemerintah tingkat desa dan kecamatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Eksan Hartanto, ketua Sanggar Rojolele;

“Indonesia 10 tahun ke depan krisis profesi petani pak. Contohnya di kita. Dealnggu, jiwa 6000 data BPS 2021. Data desa 33 RT, 11 RW jiwa 6000 sekian, DPTnya 4000 sekian, profesi petani hanya 60 orang. Padahal Delanggu iconya beras. Diform-forum HKTI, kabupaten, saya usulkan kurangi seremoni pelatihan yang skupnya kecil...*useless*. Bikin regulasi yang benar-benar menarik anak muda untuk terjun pak.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022).

Kesadaran yang sama juga sudah dinyatakan oleh seorang pengusaha beras Kecamatan Delanggu. Ia menyatakan

“Ya masa depan pertanian suram. Saya sudah sulit untuk mencari pekerja nandur, dan seterusnya..... Solusinya, ya sekarang kan sudah ada mekanisasi. Sudah ada mesin baik itu untuk potong padi, maupun tanem, sampai membajak sudah pakai traktor semua. Saya juga punya mesin *ngalis-ngalisi*. yang *mopokke* manusia. Tetapi tetap saja masa depan suram. Karena tidak ada pemuda yang mau ke sawah. Petani yang paling muda 50 tahun.” (wawancara dengan HJ pada 15 Juli 2022)

Pemerintah Desa maupun Kecamatan Delanggu juga merasakan kekawatiran akan semakin hilangnya generasi petani. Dalam wawancara, Camat Delanggu menyatakan bahwa ;

“Begini pak, yang diperlukan untuk diperjuangkan adalah kesejahteraan petani. Ketika jadi petani menjanjikan hasilnya, maka (anak muda) akan berbondong-bondong untuk menjadi petani. Nah ini adalah menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Campur tangan dari siapapun tidak akan atasi masalah ini, kecuali mekanisme pasar yang mesti ditata ulang.” (Wawancara dengan Camat Delanggu pada 7 Juli 2022).

Antara penjualan aset dan degenerasi petani adalah sebuah lingkaran setan. Penjualan aset atau alat produksi berupa lahan sawah telah menjadikan petani semakin sulit (mengalami kemiskinan). Kemiskinan di kalangan petani mengakibatkan terjadinya degenerasi petani. Selanjutnya degenerasi petani menyebabkan begitu mudahnya petani menjual aset.

Terjadinya degenerasi petani adalah persoalan serius bagi pemerintah khususnya dan masyarakat sebagai bangsa Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara agraris, memiliki sumber daya alam berupa tanah yang luas dan subur. Dengan populasi penduduk yang cukup banyak, mestinya Indonesia bisa mandiri dalam pengadaan pangan. Namun ironisnya adalah Indonesia terancam oleh mandegnya regenerasi petani.

Delanggu sebagaimana dideskripsikan di atas memang hanyalah sebuah pedesaan. Namun sebagai desa dengan sumber daya alam yang kondusif untuk pertanian, --tidak bermaksud berlebih-lebihan-- Delanggu bisa menjadi cermin dari desa-desa lain di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi di Delanggu sangat mungkin juga terjadi di desa atau daerah lain. Keprihatinan yang terjadi di Delanggu mengindikasikan keprihatinan di desa-desa lainnya di seluruh Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 64,50 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur pemuda. Namun, persentase pemuda yang bekerja di sektor pertanian hanya 21% dibanding dengan sektor manufaktur sebanyak 24% dan sektor jasa sebanyak 55%. Masih sedikitnya persentase pemuda yang memilih pertanian sebagai profesinya tersebut, menurut Leli Nurhayati, Kepala Pusat pelatihan Pertanian Universitas Gadjah Mada, disebabkan antara lain oleh masalah lahan yang semakin sempit (terkonsentrasi di

Jawa), prestise sosial (image branding pertanian yang buruk), profesi yang paling beresiko dari segi alam dan harga, serta terakhir pendapatan yang rendah karena kurangnya insentif dari pemerintah (Satriya, 2021).

#### **4. Hegemoni Pengusaha Beras**

Alat produksi lain dalam bidang pertanian khususnya beras adalah bibit, pupuk, obat, alat transportasi hasil padi, tempat penggilingan beras, dan pasar beras. Siapa yang menguasai atau memiliki alat-alat produksi tersebut, dapat dipastikan merekalah yang akan menguasai dunia perberasan.

Di Desa Delanggu alat-alat produksi tersebut dikuasai oleh penebas dan pengusaha beras. Jika penebas hanya bermain transaksi pada fase panen, dengan membeli gabah milik petani dengan cara menebas, maka pengusaha beras membeli gabah dari petani sekaligus penebas. Jadi penebas merupakan sub-sistem dari bisnis pengusaha beras.

Bagi keduanya yang pikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan untung besar tersebut, keduanya akan berusaha untuk mendapatkan beras sebanyak-banyaknya dengan harga yang serendah-rendahnya. Untuk itu mereka melakukan setidaknya dua hal, yaitu: 1) Membeli dalam bentuk gabah bukan beras; 2) membeli beras dari luar daerah Delanggu atau Klaten.

##### 1) Membeli dalam bentuk gabah bukan beras

Terdapat selisih yang cukup signifikan antara membeli beras atau gabah. Harga gabah untuk satu petak sawah adalah sekitar Rp 3.500.000 hingga Rp 4.000.000. Padahal jika petani menjual dalam bentuk beras bisa mencapai harga Rp 5.000.000 hingga Rp 6.000.000. Oleh karena itu wajar jika pengusaha beras maupun penebas memilih untuk membeli gabah bukan beras dari petani. Dengan membeli gabah, mereka akan mendapat untung Rp 2.000.000 lebih banyak dari setiap petak sawah. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Beberapa tahun lalu, ada pemilik sawah yang menghendaki untuk jual gabah Rojolele. Penggarapnya mau jual dalam bentuk beras. Tapi pemiliknya *ngeyel*. Akhirnya dibeli sama Eksan sendiri lima ribu (lima juta rupiah). Setelah diselep, dijual beras Eksan untung dua juta, bisa untuk bangun cakruk itu. Kalau penebas beli paling banyak 4 ribu. Itu sudah dibeli mahal. Tapi masih untung dua ribu (dua juta rupiah).” (Wawancara dengan SR pada 6 Juli 2022)

## 2) Membeli beras dari luar daerah Delanggu atau Klaten

Pengusaha besar beras Delanggu menyadari bahwa *brand* beras Delanggu dapat meningkatkan animo masyarakat pembeli. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membeli beras dari luar daerah Kabupaten Klaten untuk kemudian dioplos dengan beras Delanggu, sehingga mereka akan mendapat untung karena menggunakan *brand* beras Delanggu.

Sekalipun, bisa jadi mereka juga mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya melakukan pengoplosan beras Delanggu dengan beras dari luar Klaten tersebut akan sangat merugikan petani padi Delanggu. Dalam skala nasional, masyarakat *customer* menjadi tidak percaya lagi dengan *brand* beras Delanggu. Artinya beras Delanggu dimasukkan dalam pasar gelap (*black market*). Dalam black market, semua barang bagus akan dianggap barang yang tidak bagus. Dalam konteks beras, beras Delanggu yang original akan dihargai sama dengan beras di luar Delanggu. Inilah penyebab kerugian besar bagi masyarakat Delanggu. Mereka kehilangan beras Delanggu sebagai *brand* milik mereka.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa *brand* beras Delanggu merupakan *icon*, sekaligus kekayaan lokal mereka, yang dapat dikapitalisasi sepanjang masa. Kehilangan *brand* tersebut bagi masyarakat Delanggu umumnya, dan petani Delanggu khususnya, adalah sebuah kerugian yang sangat besar jika dinominalisasi dengan uang.

Terhadap ulah nakal pengusaha beras ini, pemerintah dalam hal ini Camat Delanggu sendiri merasa kesulitan untuk mengatasinya. Berikut pernyataan Camat Delanggu;

“Kami juga menyadari itu semua Pak, banyak beras daerah Purwodari, Karanganyar, Sragen masuk ke delanggu, dan dioploss dengan beras delanggu dan diakui menjadi beras delanggu. tapi selama ini kami memang belum bisa berbuat banyak. Tolong UIN bisa bantu kami untuk mengatasi itu.” (Wawancara dengan Camat Delanggu pada 7 Juli 2022)

## 5. “Memanfaatkan” Organisasi Komunitas Tani

Sesuai Instruksi Bupati Klaten No.1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinar dan Srinuk bagi ASN dan Pegawai BUMD Kabupaten Klaten, maka seluruh ASN dan Pegawai BUMD Kabupaten Klaten diwajibkan untuk membeli beras Rojolele. Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi petani padi Rojolele Kabupaten Klaten. Dengan instruksi Bupati tersebut, petani Rojolele akan mendapatkan prewaladge (perlakuan istimewa), karena hampir seluruh produk padi mereka akan mudah terserap di pasar khususnya di internal Kabupaten Klaten. Apalagi dalam aturan tersebut petani tidak dilarang untuk menjual beras Rojolele ke luar Klaten, sehingga pasar beras Rojolele terbuka lebar.

Sesuai Instruksi Bupati tersebut, penjualan beras kepada ASN Klaten ditangani oleh Perusda Aneka Usaha. Untuk mendapat jaminan bahwa beras Rojolele untuk ASN tersebut adalah beras petani Klaten, Perusda Aneka Usaha Klaten telah membuat kesepakatan dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) dengan para penyedia beras Rojolele yang telah ditunjuk oleh Perusda dan kemudian tergabung dalam komando strategi penggilingan padi (Kostraling) (Wawancara dengan HR pada 15 Juli 2022). Salah satu Kostraling tersebut adalah Gapoktan yang berlokasi di Desa Kepanjen Delanggu. Ia diharuskan menerima penjualan hasil panen padi Rojolele se Kabupaten Klaten.

Gapoktan dari Delanggu menjual beras ke Perusda seharga Rp 12.000 /kg, sedangkan Perusda menjual ke ASN Rp 13.000. Sementara itu Gapoktan ini hanya membeli gabah bukan beras dari petani seharga Rp 4.800 /kg., jika terpaksa petani menjual dalam bentuk yang sudah pecahan diterima seharga Rp 8.400 / kg. pernyataan informan ini menjelaskan hal tersebut:



“Saya bisa menjual ke luar dengan harga 12.000 sama dengan saya jual ke perusda. Monggo kalau mau ikut jual. Kalau yang Sanggar itu jualnya ke warung SS dan Sebelas Maret (UNS), koperasinya. Kalau *over load* produksi, mereka juga jual ke saya. Tapi kalau saya beli GKG (Gabah Kering Giling) pak. Dengan harga Rp 4.800. Sekarang di luar Srinuk itu di luar sana maksimal Rp 3.800. Yaa selisihnya Rp 1.000. Padahal hasilnya lebih bagus Srinuk. Maka petani harus dipacu untuk tanam Srinuk. Kalau sudah pecah harganya Rp 8.400.” (Wawancara dengan HJ pada tanggal 12 Juli 2022)

Bagi petani Delanggu harga jual hasil panen dalam bentuk gabah merugikan petani. Petani Delanggu bisa menjual dalam bentuk beras seharga Rp 12.000 /kg. Oleh karena itu, petani Delanggu lebih suka menjual dalam bentuk beras. Namun sayangnya, pengusaha suplayer beras ke Perusda tersebut tidak mau menerima penjualan petani berupa beras. Dengan membeli dalam bentuk gabah, ia bisa mendapatkan untung dua kali; pertama selisih gabah dan beras, kedua untung dari margin pembelian pada petani dan penjualan pada perusda. Sebagaimana disampaikan HJ, bahwa Perusda membutuhkan 90 ton beras setiap bulan. Sehingga pengusaha beras mendapatkan keuntungan sekitar ratusan juta setiap bulan. Jika dibandingkan dengan penghasilan petani penghasilan pengusaha ratusan kali lipat. Inilah ketimpangan yang nyata.

Namun masalahnya bukan saja di selisih harga gabah dan beras yang menguntungkan pengusaha dan merugikan petani. Masalah utamanya adalah ketika pengusaha beras tersebut mengatas namakan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Mungkin maksud dari peraturan “suplaiyer harus Gapoktan” adalah agar komunitas tani bisa mendapatkan keuntungan sebagai suplaiyer beras, sehingga keuntungan dari bisnis beras tidak keluar dari lingkungan petani. Namun yang terjadi di Delanggu, dan mungkin juga di daerah lain adalah Gapoktan hanya dipakai sebagai atas nama. Sejatinya yang pemain sebenarnya dari “Gapoktan si suplayer beras Perusda” adalah pengusaha beras lagi, bukan petani. Memang HJ, pengusaha beras yang dimaksud adalah benar-benar seorang ketua Gapoktan di sebuah desa di Kecamatan Delanggu. Namun “Gapoktan si suplayer beras Perusda” sebagai lembaga bisnis dengan segala permodalannya tersebut milik pengusaha beras, bukan milik para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Sehingga

keuntungan dari bisnis suplaiyer beras ke Perusda bukan milik para petani, melainkan milik pengusaha beras dimaksud. Hal ini disampaikan oleh informan dalam wawancara berikut;

“Apa keuntungan Gapoktan dari usaha ini? Gapoktan ya mendapat untung. Kita kasih untung. Kan Gapoktan di sini juga ada kebutuhan seperti gotong royong. Ya kita keluarkan untuk itu. Kan kita tidak dapat dana desa dan apa itu. Maka kalau ada gotong royong buat kalen, ada buat tetek, ya harus dari sini. Jadi walaupun secara fisik *aku ora menei*, tapi kan secara fisik petani menerima manfaatnya, ada jalan lebih mudah. Umpama ada kerja bakti ya kita memberi makan, dan juga sneknya. Dan saya tetap nggerakkan petani, karena petani itu suka malas kalau tidak digerakkan. Misalnya ada wereng saya ada chanel dengan Dinas Pertanian. Saya minta tolong mereka untuk memberi bantuan obat wereng. Petani itu perlu digerakkan.” (Wawancara dengan HJ pada 15 Juli 2022)

Untuk menjadi suplaiyer beras ke Perusda memang diperlukan modal yang tidak sedikit, mulai dari modal untuk membeli gabah, tempat menjemur gabah, mesin penggiling padi, alat transportasi, gudang penyimpanan, hingga biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Rasanya hal itu tidak mungkin dimiliki oleh Gapoktan yang sebenarnya. Belum lagi jika kita berbicara modal sumber daya manusia. Tidak semua Gapoktan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pebisnis. Oleh karena itu, pihak yang sebenarnya paling diuntungkan oleh Instruksi Bupati No.1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 adalah pengusaha beras.

## **6. Strategi Senyap Industri Bibit, Pupuk, dan Obat**

Dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengembalikan *icon* Klaten sebagai penghasil beras Rojolele, ketergantungan petani pada bibit, pupuk, dan obat kimia agak berkurang. Hal ini disebabkan oleh salah satu karakter dari varitas padi Rojolele Srinuk yang tidak begitu adaptif terhadap produk industri utamanya pupuk kimia. Varitas Srinuk sebenarnya lebih cocok dengan pupuk organik (kompos). Berbeda dengan padi varitas lain, tanaman padi ini akan mudah ambruk jika diberi pupuk Orea atau Ponska terlalu banyak. Demikian yang dikatakan informan berikut;

“Rojo lele lebih menguntungkan dibanding dengan padi biasa. Padi biasa dahulu harus menggunakan pupuk kimia secara boros atau *jorjoran*. Pokonya di atas satu kintal...(untuk satu petak). Jadi biayanya membengkak. Misalnya dipupuk dengan satu kuintal, padi belum gemuk. Nah kelebihan Rojolele ini tidak mau kebanyakan Orea.” (Wawancara dengan SR, PR, PY, dan YN pada 12 Juni 2022)

Sebagai alternatifnya, petani memperlakukan tanaman padi mereka dengan pendekatan organik. Mereka membuat pupuk cair organik sendiri. Demikian juga dengan obat-obatannya. Namun sayangnya, dengan berbagai alasan yang dikemukakan, belum semua petani menanam padi Rojolele Srinuk ini. Sebagian petani masih menanam padi varitas non-Srinuk seperti IR 64, C4, Menthik, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang masih menggunakan pupuk dan obat-obatan kimia. Sebagai akibatnya, sekalipun tidak semasif daerah lain, keberadaan toko pertanian yang menjual bibit, pupuk, dan obat kimia masih ada di sekitar Delanggu. Bahkan belakangan ini Eksan Hartanto, ketua Sanggar Rojolele mendapatkan tawaran dana CSR dari salah satu pabrik pupuk kimia, dengan syarat diantaranya mendidikan beberapa gerai di sekitar Delanggu untuk menjual sarana pertanian produk-produk mereka. Namun dengan penuh kesadaran tawaran tersebut ditolak (Wawancara dengan EH pada tanggal 20 Juli 2022).

## **B. Resistensi Petani terhadap Hegemoni Kapitalisme**

Dominasi dan eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar menghasilkan kesenjangan sosial yang semakin melebar di masyarakat. Sebagai hasil dari kepemilikan terhadap alat dan sarana produksi oleh kaum borjuis menghasilkan keuntungan yang semakin lama semakin berlipat. Sementara kaum proletar semakin tereksploitasi dan semakin miskin. Kesenjangan sosial tersebut dimanfaatkan oleh kaum sosialis untuk menumbuhkan kesadaran kelas di kalangan proletar. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran kelas inilah konflik antara kedua kelas proletar dan borjuis dimulai.

Oleh karena itu, setelah menggambarkan hegemoni kapitalisme di Delanggu pada sub bahasan sebelumnya, bahasan berikut akan mendiskripsikan upaya-upaya

petani untuk membebaskan diri dari kegemoni tersebut. Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh petani Delanggu, khususnya yang tergabung dalam paguyuban Sanggar Rojolele dapat dikategorisasikan dalam beberapa dimensi perjuangan; mulai mengembangkan padi Rojolele dengan pendekatan organik, ekspansi pasar, upaya penyadaran kelas, advokasi dan jejaring. Untuk selanjutnya, masing-masing aspek perjuangan tersebut akan dijelaskan dalam behasan berikut ini.

## **1. Pemandirian Petani: Mengembalikan Rojo Lele sebagai *Icon* Delanggu dan Perlakuan Organik**

Yang istimewa dari Delanggu adalah kesuburan tanah dan kebaikan airnya. Keistimewaan tersebut menjadikan pertanian khususnya tanaman padi sebagai bidang usaha yang diandalkan di daerah ini. Karena keistimewaan tanah dan airnya tersebut, varitas padi jenis apapun yang ditanam di daerah Delanggu menghasilkan beras kelas premium. Keistimewaan Delanggu ini dinyatakan informan berikut;

“Nah sombongnya, kami masih percaya bahwa padi yang ditanam di Delanggu ini lebih baik. Delanggu tanahnya regosol, sisa letusan gunung berapi ratusan tahun lalu. Dan mendapatkan aliran air terbaik dari lereng Merapi, seperti Ponggok dan Cokro. Warung SS pernah mengadakan uji rasa dengan membandingkan mana beras RL yang paling baik dari berbagai daerah (Trucuk, Manis Renggoi dan Delanggu). Kami siapkan 11,5 kuintal untuk makan 200 orang, dan hasilnya 90% merasakan beras Delanggu (Sanggar Rojolele) masih lebih baik. Langsung kami tanda tangan MOU dengan SS untuk menyediakan minimal 16 ton per bulan.”  
(Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022)

Karena itulah sejak jaman dahulu, beras Delanggu menjadi *brand* untuk beras premium di berbagai daerah di nusantara. Diantara jenis tanaman padi yang sempat menjadi legenda dalam sejarah beras di nusantara adalah padi Rojolele. Beras Rojolele dikenal sebagai beras yang memiliki cita rasa yang enak, tekstur yang pulen dan bau wangi. Padi Rojolele memiliki tinggi tanaman mencapai 1,5 m, tertinggi diantara jenis varitas padi yang ada. Padi Rojolele juga dikenal memerlukan masa tumbuh hingga panen yang lebih lama dari padi lainya yakni memerlukan waktu lima hingga enam bulan untuk sampai selesai dipanen. Oleh

karena itu padi Rojolele dikenal memerlukan biaya budidaya yang lebih mahal dari padi lainnya.

Gambar 5.1. Beras Rojolele sebagai Icon Delanggu



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Namun seiring dengan kebijakan pemerintah Orde Baru tentang intensifikasi pertanian atau yang dikenal dengan revolusi hijau, padi Rojolele kalah bersaing dengan varitas padi baru yang unggul yang diandalkan pemerintah untuk mensukseskan intensifikasi tersebut. Keunggulan padi varitas baru tersebut antara lain batang taanaman yang jauh lebih pendek, serta usia yang jauh lebih pendek juga –rata-rata varitas baru tersebut hanya memerlukan waktu 3 sampai 3,5 bulan hingga panen. Oleh karena itu sangat dipahami kalau petani pada saat itu lebih memilih untuk menanam padi varitas baru, dan meninggalkan padi Rojolele. Akibatnya sudah sekitar tiga dasawarsa Rojolele hampir hilang dari pasaran. Tanpa disadari, ternyata hilangnya beras Rojolele dari pasaran berarti juga hilangnya pamor atau *icon* Delanggu sebagai daerah penghasil beras Rojolele.

Bersamaan dengan mengemukanya tuntutan otonomi daerah di Era Reformasi yang terjadi pada akhir tahun 90-an, di mana setiap daerah dituntut untuk

memiliki keunikan yang bisa dijual demi eksistensinya, maka semangat untuk mengembalikan *icon* Delanggu mulai muncul. Bahkan *icon* Delanggu sebagai penghasil padi Rojolele digunakan menjadi *icon* Kabupaten Klaten. Namun persoalannya adalah untuk mengatasi kekalahan padi Rojolele dengan varitas padi lain, baik terkait panjang batang tanaman maupun masa tanam hingga panen. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 pemerintah Kabupaten Klaten berupaya menjalin kerjasama dengan lembaga Batan (Badan Tenaga Nuklir Indonesia), --lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas mengadakan penelitian dan pengembangan serta penerapan energi nuklir di bidang pangan dan lainnya,-- untuk mendapatkan

Benih padi Rojolele yang memiliki masa tanam dan tinggi batang tanaman yang lebih pendek. Akhirnya pada tahun 2019 ditemukanlah turunan Padi Rojolele, sesuai dengan kriteria yang diharapkan, yaitu memiliki masa tanam yang lebih pendek, tinggi tanaman yang hampir sama dengan varitas padi yang baru, namun masih memiliki cita rasa paaling mendekati padi Rojolele indukan. Ada tiga varitas baru Rojolele yakni Sritan, Srinuk dan Srinar. Dari ketiga varitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten kini membudidayakan varitas Rojolele Srinuk untuk mengembalikan *icon* Delanggu. Bahkan pemerintah Kabupaten Klaten menjadikan Srinuk sebagai milik pemerintah Kabupaten Klaten, yang dilindungi undang-undang hak paten. Dari sinilah pemerintah mendorong dan mengajak seluruh petani se- Kabupaten Klaten untuk menanam Srinuk.

Sebagai dukungan pemerintah terhadap budidaya Srinuk, Bupati Klaten mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021, tentang pemasyarakatan padi Rojolele Srinuk. Bentuk dukungan dari instruksi tersebut adalah agar semua ASN maupun pegawai atau karyawan Daerah Kabupaten Klaten untuk membeli beras Rojolele Srinuk.

Kelebihan dari varitas baru Rojolele ini, kecuali pada citarasanya, varitas ini juga tidak begitu memerlukan pupuk kimia, dan lebih tahan terhadap serangan wereng. Srinuk lebih cocok untuk diberi pupuk organik kompos. Dari sinilah

kemudian Sanggar Rojolele bersama petani di sekitarnya melaksanakan gerakan kembali ke pertanian semi organik. Disebut dengan perlakuan semi organik karena petani masih menggunakan sedikit (25 Kg) pupuk Urea untuk setiap satu petak sawah pada tanaman padi mereka).

Untuk mensukseskan gerakan semi-organik tersebut, Sanggar Rojolele pernah dan masih bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari LPPNU, Fakultas Pertanian UNS, hingga Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, semua petani anggota Sanggar Rojolele sebanyak 60 petani telah mengadakan hijrah dari petani konvensional ke petani organik. Berbagai pelatihan dilaksanakan oleh anggota sanggar, seperti misalnya pembuatan pupuk cair, pembuatan obat bio-pestisida, dan sebagainya. UNS juga memberikan pendampingan secara intensif terhadap para petani anggota Sanggar. UNS memberikan beberapa alat untuk mengatasi serangan hama wereng, alat elektrik pengusir burung, serta alat pemasok listrik dari panel surya. Hingga saat ini petani Sanggar Rojolele bisa membuat pupuk kompos dan obat bio pestisida sendiri. Pembuatan pupuk dan obat organik tersebut dilakukan secara terpusat di rumah Slamet (salah satu anggota sanggar). Pada saat memerlukan pupuk maupun obat, petani dapat mengambilnya dari tempat tersebut. Kegiatan kemandirian petani ini disampaikan oleh informan berikut;

“Yaa membuat sendiri bahannya sampah-limbah sayur. *Pupuk niku didamel sedoyo anggota kelompok* di rumah pak Slamet. Pupuk dibuat secara bergotong royong. Nanti kalau mau memupuk ambil ke situ. Bahan-bahan ne beli memakai dana kas. Bahannya sesuai pupuk apa. Klu pupuk buah, ya bahannya dari buah-buahan, buah mojo, pisang, m4, sampah sayur-sayuran. Semua bahan ada di sini, beberapa beli.” (Wawancara dengan SR dan temna petani lain pada 6 Juli 2022)

Dengan membudidayakan padi Srinuk dengan perlakuan organik ini petani dapat melakukan efisiensi pada biaya produksi hingga jutaan rupiah. Untuk petani konvensional, satu petak sawah petani membutuhkan pupuk Urea antara 150-200 Kg. Sebagai suatu ilustrasi, harga 50 Kg Urea sebesar Rp 500.000 (Setiawan, 2022). Belum lagi biaya penggunaan obat-obatan pestisida un-organic. Dengan demikian

untuk satu petak sawah petani mesti mengeluarkan biaya pupuk mencapai Rp 2.000.000 an. Kecuali itu, dengan hijrah ke pertanian organik, petani juga dapat ikut berpartisipasi mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, mencegah kerusakan lingkungan dari akibat penggunaan pupuk dan obat pestisida. Untuk memahami lebih jauh tentang dampak penggunaan pupuk dan obat kimia un-organic terhadap kerusakan lingkungan dapat dibaca diberbagai buku dan artikel ilmiah, diantaranya adalah (Udiyani, 2003).

Dengan demikian, perlakuan semi organik ini menjadikan Rojolele Srinuk memiliki kelebihan dibanding varitas lainnya, yakni secara ekonomi memerlukan biaya produksi lebih murah, serta terbebas dari berbagai polusi kimia akibat pupuk dan obat un-organic. Sebagai hasil dari upaya-upaya perlakuan semi organik tersebut, hingga saat ini tidak kurang dari 120-140 Ton setiap tahun, beras Rojolele sehat dihasilkan oleh para petani Sanggar Rojolele.

Gambar 5.1. Perlakuan Organik Padi Rojolele



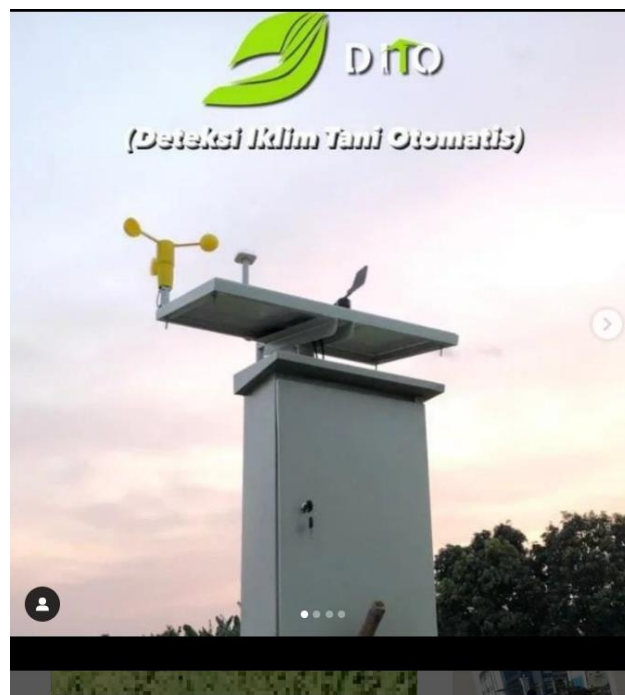
Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele



Pada titik inilah Srinuk menjadi *starting point* bagi petani untuk memulai gerakan pertanian organik. Pada titik ini pula, budidaya Rojolele Srinuk menjadi alat dan “senjata” bagi petani untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada dan eksploitasi oleh pabrik pupuk kimia. Perlawanan petani terhadap pupuk dan obat pestisida kimia ini sangat penting karena pupuk dan obat kimia serta perusahaan yang memproduksinya, merupakan institusi kapitalisme yang dalam teori struktur sosial Karl Marx adalah suprastruktur yang sengaja didesain oleh kelas borjuis untuk mengeksploitasi petani.

#### Gambar 5.2. Akomodasi Smart Farming :

Teknologi untuk menghimpun data suhu & kelembapan udara, suhu & kelembapan tanah, intensitas cahaya matahari, kecepatan & arah angin, pH, EC dan curah hujan di area Project Smart Farming Sanggar Rojolele (persawahan desa Delanggu).



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Dalam konteks Indonesia, hampir semua pabrik pembuat pupuk dan obat kimia bukan lagi BUMN yang dimiliki negara dengan misi sosial, melainkan merupakan lembaga swasta murni yang berorientasi profit. Oleh karena itu

pertanian organik yang berbasis kemandirian masyarakat penting untuk didukung untuk menciptakan struktur sosial yang adil.

## **2. Pembebasan Petani dari Eksploitasi dengan Membangun Pasar Sendiri**

Persoalan umum dari budidaya padi Rojolele Srinuk adalah pada pemasaran hasil produksi. Kesulitan tersebut merupakan konsekuensi dari harga beras Rojolele Srinuk yang memang lebih mahal dari beras biasa (selisih tiga hingga empat ribu per kilogram) (Wawancara dengan MY pada tanggal 7 Juli 2022). Memang Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemasarakatan Padi Rojolele, namun persolan pemasaran akan tetap mengemuka jika hasil panen *over load* sampai di luar daya tampung Perusda.

Gambar 5.2. Gudang beras Sanggar Rojolele



Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti

Selain itu, masih tersisa permasalahan mendasar dalam pemasaran beras Rojolele. Permasalahan tersebut adalah di sekitar pembelian hasil pertanian oleh suplaiyer beras ke Perusda yang tergabung dalam komando strategi penggilingan padi (Kostraling). Petani diharuskan menjual hasil panennya kepada Konstraling dalam bentuk gabah, bukan beras jadi. Padahal penjualan dalam bentuk gabah sangat merugikan petani jika dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk beras jadi. Sebagai ilustrasi, pernah terjadi salah seorang petani Sanggar menjual hasil panen dalam bentuk gabah kepada Sanggar dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) –harga tertinggi pada saat itu. Setelah dimasukkan selep, dan kemudian berasnya dijual, Sanggar masih untung Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Permasalahan lain yang tidak kalah dalam pemasaran beras Rojolele adalah rusaknya *brand* beras Delanggu sebagai beras premium. Tidak bisa dipungkiri bahwa brand beras Delanggu sebagai beras kualitas premium pernah melegenda di masyarakat. Namun saat ini *brand* tersebut tinggal nama saja, kenyataannya tidak lagi demikian. Hal tersebut terjadi karena banyaknya beras yang menggunakan label beras Delanggu, namun sebenarnya beras yang berada di dalamnya tidak murni beras Delanggu, melainkan beras oplosan.

Pengoplosan beras Delanggu dengan beras lain daerah tidak mungkin dilakukan oleh para petani. Petani hanya memiliki beras yang sedikit, sehingga tidak mungkin melakukan pengoplosan beras. Yang paling mungkin pelakunya adalah pedagang besar. Mereka cukup memiliki modal untuk mendatangkan beras dari luar daerah untuk dioplos dengan Beras Delanggu. Pengoplosan beras Delanggu dengan beras dari daerah lain sudah bukan rahasia umum, mulai dari rakyat biasa, para aktivis pertanian, hingga pejabat pemerintah mengetahui akan hal tersebut. Demikian setidaknya persepsi di antara mereka sebagaimana tampak dalam pernyataan berikut;

“Kami juga menyadari itu semua Pak, banyak beras daerah Purwodadi, Karanganyar, Sragen, masuk ke Delanggu, dan dioplos dengan beras Delanggu dan diakui menjadi beras Delanggu. Tapi selama ini kami

memang belum bisa berbuat banyak.” (Wawancara dengan CT pada tanggal 7 Juli 2022)

Keberadaan beras oplosan yang mengatasnamakan beras Delanggu<sup>1</sup> sangat merugikan Delanggu sebagai pemilik brand. Brand yang mestinya bisa menjadi modal pemasaran beras Delanggu, yang terjadi justru sebaliknya. Beras Delanggu menjadi kehilangan keistimewaan, karena dianggap sama dengan beras dari luar Delanggu. Dalam hal tersebut petani Delanggu lah yang paling dirugikan. Demikian dikatakan informan:

“Masuknya beras luar ke Delanggu kami sadari sangat merugikan Delanggu. Karena harga beras kami akhirnya dianggap sama dengan beras dari luar. Ya Pak, karena kita membiarkan beras Delanggu menjadi pasar gelap beras. ....Kami atas nama masyarakat belum punya kemampuan untuk memfilter beras luar bisa masuk Delanggu.” (Wawancara dengan CT pada tanggal 7 Juli 2022)

Jika diperhatikan secara kritis, sistim penjualan beras Rojolele yang dibangun oleh pemerintah tersebut sebenarnya masih tersandera oleh kepentingan pemilik modal besar. Benar seperti dikatakan Marx bahwa supra struktur sosial dalam hal ini institusi sosial, politik, ekonomi –*include* di dalamnya pemasaran hasil produksi—yang dibangun pemerintah, bahkan negara itu sendiri, dalam hal ini pemerintah merupakan perwujudan dari kepentingan kelas borjuis. Hal tersebut tampak pada implementasi dari Instruksi Bupati Klaten tentang pemasyarakatan Rojolele Srinuk. Petani dalam hal ini hanya sebagai suplaiyer beras yang dibutuhkan ASN. Tetapi dalam sistim tersebut petani tidak punya posisi tawar ketika berhadapan dengan kepentingan pengusahaa beras yang tergabung dalam Konstraling.

Demikian juga dengan permasalahan pemasaran sebagai akibat rusaknya brand Beras Delanggu. Dalam hal ini pemilik kapital besar kembali memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Beras Delanggu maksudnya adalah beras yang memiliki cita rasa istimewa. Biasanya bertas tersebut berasal dari daerah Delanggu Raya (Kecamatan Delanggu sendiri, Kecamatan Polan Harjo, sebagian kecil Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Karanganom).

kekuasaan modalnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sekalipun harus mengorbankan kepentingan para petani pada umumnya.

### **Strategi Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Menyikapi kebijakan struktural tentang keharusan penjualan hasil panen dalam bentuk GKG (Gabah Kering Giling) kepada Kostraling yang merugikan petani tersebut, Sanggar Rojolele melakukan dua pendekatan; pertama, strategi jangka pendek; kedua, strategi jangka panjang. Aktualisasi dari strategi jangka pendek, Sanggar Rojolele berupaya membantu petani dengan mencari pasar sendiri di luar instansi wilayah Kabupaten Sragen. Untuk itu, Sanggar memanfaatkan jejaring yang dimiliki untuk membuka pasar alternatif. Di antara jejaring itu Universitas Sebelas Maret (UNS).

Berkat kerjasama dengan UNS, akhirnya UNS melalui unit koperasinya bersedia menampung beras Rojolele produksi petani Sanggar untuk dikonsumsi oleh seluruh dosen dan karyawannya. Selain itu, juga melalui jejaring dengan UNS, Sanggar diberi kesempatan untuk mensuplai beras Rojolele ke Warung SS di Yogyakarta sebanyak 16 Ton per bulan (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022).

Gambar 5.3 Warung “SS” Costumer Beras Rojolele dari Sanggar Rojolele



Sumber : Dokumentasi dari Yogyes.com diakses tanggal 6 September 2022

Terobosan pasar yang dilakukan Sanggar Rojolele tersebut di atas sebenarnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan hasil produksi petani. Masih banyak beras hasil petani yang belum bisa tertampung oleh pasar yang dibangun Sanggar. Sampai saat ini penjualan beras Rojolele oleh Sanggar masih belum stabil (*fluktuatif*). Pada saat produk *over load*, dan Sanggar tidak mampu menyerap secara keseluruhan, akhirnya penjualan kembali jatuh pada tengkulak. Ketika penjualan hasil panen petani ke tengkulak, maka petani akan mengalami kerugian akaibat penurunan harga sekita 30 sampai dengan 40 % dari harga jual dalam bentuk beras. Kesulitan pemasaran yang dilakukan Sanggar, terlihat dari pernyataan yang disampaikan informan berikut;

“Sejauh ini baru ke SS sih Pak. Demand terbatas. Rata-rata SS mengambil 17-20 Ton per bulan Pak. Penjualan masih fluktuatif. Jika tidak terserap ya ke tengkulak pak. ....Jika panen tidak terserap oleh Sanggar, akan diserap tengkulak, dengan harga 30-40% berkurang dari dijual dalam bentuk beras. Ya .... tapi apa daya pak, kita sudah tidak mampu. Kalau sudah *full* di gudang itu ya saya bilang petani harus legowo. Karena kita belum punya market lebih luas lagi. Yang terjadi di internal petani ya dinamikanya luar biasa Pak. Kadang petani juga iri-irian. “*Pas tibo panenmu bagus, pas panen ku pas over load gak terserap,*”. Tapi dari awal

sudah saya sampaikan harus legowo kalau tidak terserap. Tapi kami juga harus berlaku adil kok pak. Kalau kali ini tidak terserap akhirnya jual ke tengkulak, untuk panen yang akan datang kami dahulukan untuk diserap. Karena itu pembelian dari petani kami gilir.” Wawancara dengan EH pada tanggal 31 Mei 2022)

Persoalana lain dari beras dengan perlakuan organik adalah mudah pecah. Hal tersebut disebabkan oleh lebih sedikitnya unsur kalium dalam beras organik jika dibandingkan dengan beras konvensional (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022). Ketika beras dalam visual yang tidak utuh membuat pembeli menawar dengan harga yang lebih rendah. Hal tersebut menjadi hambatan lain dalam penjualan beras Rojolele Srinuk.

Kedua kesulitan penjualan beras Rojolele tersebut sebenarnya dapat teratasi jika masyarakat sebagai konsumen beras Rojolele Srinuk telah memiliki pemahaman tentang urgensi beras sehat. Pemahaman masyarakat yang memadai tentang pentingnya beras sehat dan manfaat pertanian organik akan sangat membantu dalam pemasaran beras Srinuk. Pemahaman masyarakat akan mendorong masyarakat memiliki rasa butuh terhadap beras sehat. Pemahaman masyarakat dimaksud hanya bisa dilakukan dengan mengedukasi masyarakat. Belum munculnya rasa butuh masyarakat terhadap beras sehat ini bisa jadi disebabkan oleh karakter masyarakat kita yang belum *well informed*. Jika masyarakat sudah memahami akan pentingnya beras sehat tentu penyerapan oleh masyarakat akan lebih terbuka. Di sinilah pentingnya narasi di samping branding yang harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat Klaten.

Sementara ini, institusi Sanggar Rojolele adalah terlalu kecil untuk melakukan tugas membangun narasi dan edukasi tersebut. Perlu diketahui, sebagaimana dijelaskan dalam profilnya, Sanggar Rojolele merupakan lembaga seni-budaya. Kepedulian dengan persoalan pertanian di Delanggu boleh dikatakan sebagai nilai lebih Sanggar. Artinya, masih panjang jalan yang harus dilakukan Sanggar agar dapat membantu petani, utamanya mengedukasi masyarakat luas untuk bisa menerima kehadiran beras sehat Srinuk. Namun sekecil apapun Sanggar Rojolele sudah mencoba membangun narasi tersebut, diantaranya dalam bentuk

pembuatan website Sanggar Rojolele. Bahkan Sanggar juga mengadakan pelatihan kepenulisan *copy-writing* untuk penguatan skill para aktivis Sanggar dalam membuat narasi.

Gambar 5.5.

Pelatihan *Copy-Writing* Untuk Aktivis Sanggar Dalam Rangka Penguatan Narasi  
Di Sektor Digital Marketing



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Adapun strategi jangka panjang diwujudkan oleh Sanggar dalam bentuk pembangunan kesadaran kelas para petani. Pembangunan kesadaran kelas ini dilakukan oleh Sanggar Rojolele melalui gerakan seni-budaya, jejaring dan advokasi. Masing-masing gerakan tersebut akan didiskripsikan dalam sub bahasan berikut.

### **3. Membangun Kesadaran Kelas Melalui Seni Budaya**

Sesuai dengan status institusinya, yaitu “Sanggar”, Sanggar Rojolele memiliki program pengembangan seni dan budaya pada generasi muda Delanggu. Di antaranya adalah mengadakan kursus bahasa Inggris untuk anak-anak petani,



pelatihan tari untuk remaja, jagongan tani, hingga festival Mbok Sri Mulih (Dokumentasi Kegiatan Sanggar Rojolele).

Tujuan program kursus bahasa Inggris dan pelatihan tani adalah untuk mengembangkan bakat dan minat generasi muda, juga dalam rangka menjaga seni, budaya, serta tradisi masyarakat Delanggu dari kepunahan. Sedangkan jagongan tani yang dilaksanakan setiap selapan (35 hari) pada setiap malam Senin Kliwon dimaksudkan sebagai media bagi petani untuk saling komunikasi, serta membahas berbagai persoalan pertanian mereka.

Adapun Festival Mbok Sri Mulih dimaksudkan untuk menjaga tradisi adiluhung para petani pada masa lalu, sekaligus sebagai media komunikasi antar petani. Selain itu Festival Mbok Sri Mulih juga dimaksudkan untuk membangunkan nostalgia kebesaran petani Delanggu di masa lalu. Seperti ditulis dalam artikel *websaid Sanggar Rojolele*;

“Pada mulanya, budaya tani adalah budaya guyub dan gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Nilai-nilai yang mulai pupus dikeseharian masyarakat tani sekarang ini. Dahulu, petak-petak sawah dikerjakan bersama-sama oleh para anggota keluarga, dikerjakan penuh rasa dan karsa, sebab hasilnya akan masuk keperut sendiri. Kini, dengan ekosistem baru yang dicetuskan dan dirawat Pemerintah, para petani beralih kesistem upah dan kebanyakan alat produksi menjadi bukan milik sendiri atau komunal. Akibatnya, kualitas padi jadi nomor dua: asal cepat panen, uangnya diparo dengan pemilik lahan, padinya pun langsung masuk ke lumbung-lumbung tengkulak. Bawaan budaya tani masa kini itu melunturkan kesadaran akan nilai-nilai luhur masyarakat tani” (Hartanto, 2022).

Sisi lain dari pertunjukan Mbok Sri Mulih adalah pentas seni yang dilaksanakan bukan di lokasi-lokasi mainstream seni budaya yang berbau borjuis seperti ketoprak dan wayang yang dilaksanakan di alun-alun, melainkan pentas seni kolosal yang diadakan di berbagai lokasi tempat rakyat jelata hidup dan berjuang mempertahankan kehidupan mereka. Oleh karena itu Festival Mbok Sri Mulih bisa dimaknai sebagai seni satire dari masyarakat yang tertindas.

“Awalnya kami menari-nari di tengah sawah, orang menduga-duga jangan-jangan ini lekra, gerakan kiri. Karena seni budaya kita beda dengan mainstream pak. Bukan seni wayang, ketoprak, yang panggungnya di alun-alun. Tapi ini di tengah sawah, di pinggir sungai Kali Woro, Pinggir Kalianjik, ya gerakan-gerakan satire itu lho pak. Cuman nggak ini banget. Sebenarnya pemerintah kabupaten itu nagkep apa yang kita suarkan. (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022).

Gerakan seni budaya Mbok Sri Mulih khususnya, dan semua yang dilakukan Sanggar Rojolele pada umumnya merupakan inisiatif petani grassroot untuk mandiri melawan kebijakan pemerintah yang selama ini sering bersifat top-down dan lebih memihak pada kaum borjuis. Meminjam istilah Heru Purwandari, Sanggar Rojolele dengan Festifat Mbok Sri Mulih ini sebagai “perlawanan tersamar organisasi petani”. Selebihnya Heru mengatakan Kemandirian (petani) tingkat lokal menduduki peran penting terutama jika dikaitkan dengan keinginan menghindari intervensi kapitalis sekaligus memutus relasi kekuasaan dominan. (Purwandani & Tonni, 2019)

Gambar 5.6. Partisipasi Petani dalam Festifat Mbok Sri Mulih



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Dalam terminologi Marx festifat Mbok Sri Mulih ini terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kesadaran kelas mereka yang tertindas dalam

suatu masyarakat. Kesadaran kelas ini penting agar kelas yang tereksplorasi menyadari kedudukan mereka dalam hubungan produksi (Ramli, 2000b). Kesadaran akan hubungan produksi ini dalam pandangan Marx sangat penting, karena dari sini terjadinya konflik dimulai. Dengan demikian kesadaran kelas menjadi semacam prasyarat untuk mempercepat lahirnya masyarakat baru. Seperti hubungan antara perusahaan dan buruh, hubungan produksi yang eksploitatif hanya bisa dihentikan ketika buruh menyadari akan kedudukannya yang sangat penting dalam proses produksi. Dengan kesadaran kelas tersebut buruh memiliki landasan mental-sosiologis untuk “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” melakukan negosiasi dengan kelas sosial lain. Dari negosiasi yang setara tersebut eksploitasi majikan terhadap buruh dapat dihentikan.

Dalam konteks petani padi Rojolele Srinuk, apa yang dilakukan Sanggar dengan festival Mbok Sri Mulih adalah upaya untuk mengedukasi masyarakat tani sehingga mereka memiliki kesadaran akan kedudukan mereka yang sangat penting dalam hubungan produksi. Kesadaran ini penting dimiliki petani sehingga mereka menjadi komunitas yang solid baik dalam ideologi maupun cara pandang terhadap proses produksi. Dari sini petani akan independen, kritis, dan tidak mudah dieksploitasi oleh kaum borjuis melalui pola hubungan produksi. Dengan independensi dan sikap kritis ini, maka petani sebagai kelas sosial akan dipandang eksist, sehingga akan selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengatur kehidupan sosial. Dari kesadaran kelas inilah negosiasi dan advokasi akan memiliki arti yang sebenarnya.

Selama ini petani merupakan kelas sosial yang rapuh, tidak memiliki kesadaran kelas sehingga keberadaannya di Indonesia terus-menerus terpinggirkan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian selama ini lebih bersifat *top-down*. Petani seringkali hanya dijadikan objek penderita dari sebuah kebijakan publik, baik terkait dengan politik, ekonomi, hukum, maupun budaya, bahkan dalam bidang pertanian itu sendiri.

Hal ini disadari oleh para aktivis sosial di Delanggu, sebagaimana tampak dalam pernyataan informan berikut;

“Hambatan perjuangan untuk petani....Terlalu banyak, apa ya... belum ada wadah yg benar-benar getol dan progresif. Itu belum ada pak. SPI (Serikat Petani Indonesia) itu kurang apa advokasinya, tapi ya *nguas* juga. Ya solusinya mendirikan partai sendiri yang fokus memperjuangkan petani. Belum lama ini kami ditawari untuk mendirikan partai buruh cabang klaten. Tapi saya kok pesimis dulu nggih. Ingat di sini kandang banteng, dan seterusnya. Persoalannya adalah kesadaran kelasnya masih kecil. Kalau kesadaran kelas sudah terbangun, ayo nanti klu ada isu apapun yg tidak lancar kita turun dengan aksi.” (Wawancara dengan EH pada 20 Juli 2022)

#### **4. Menggalang Kekuatan dengan Berjejaring**

Upaya yang dilakukan oleh Sanggar Rojolele sebagaimana didiskripsikan di atas adalah sebuah gerakan sosial. Menurut Tarrow (1998) dalam Suharko (2006) merupakan bagian dari politik perlawanan. Gerakan sosial bisa beranggotakan person atau institusi dalam jumlah sedikit maupun banyak, bahkan bisa ribuan atau jutaan orang. Tidak ada definisi tunggal terhadap gerakan sosial. Banyak pakar mendefinisikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Diantara definisi yang patut dikutip di sini adalah, Giddens (1993) dalam Suharko (2006) yang mendefinisikan gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collection action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.

##### **Berjejaring dengan Gerakan Peduli Klaten**

Dalam konteks penelitian ini, ciri-ciri Sanggar Rojolele sebagai gerakan sosial terlihat nyata. Pertama, aksi-aksi nyata Sanggar Rojolele merupakan upaya perlawanan terhadap suatu sistim sosial<sup>2</sup> yang memposisikan petani dalam struktur sosial pinggiran.

---

<sup>2</sup> Sistim sosial adalah merupakan satu set peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang mempunyai nilai (norma), dan cita-cita yang sama (Taufiq Rahman, 2011).

Melawan sistem sosial bukan persoalan mudah dan sederhana, melainkan persoalan yang kompleks. Menyadari akan kompleksitas sistem sosial yang dilawan, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai elemen sosial yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama. Di sinilah latar belakang perlunya jejaring antar individu, kelompok maupun lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, untuk mewujudkan tujuan bersama mereka. Tatanan sosial yang berkeadilan merupakan cita-cita kemanusiaan. Sebaliknya ketidakadilan sosial merupakan musuh bersama manusia.

Sebelum mendirikan Sanggar Rojolele, Eksan Hartanto menyaksikan betapa corak kehidupan para petani Delanggu sangat individualistik (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022). Padahal perjuangan menegakkan keadilan untuk para petani Delanggu tidak bisa dilakukan orang per orang. Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Menyadari akan hal itu, Eksan mencari cara agar tidak terkesan *nguyai segoro* dan bisa menyatukan mereka. Ia mulai berpikir untuk menggunakan seni-budaya sebagai pendekatan untuk bisa kebersamai para petani di Delanggu. Karena itulah Sanggar Rojolele yang berada di ranah seni budaya digunakan Eksan sebagai sarana gerakan di bidang pertanian.

Dengan pendekatan seni budaya ini Eksan dengan Sanggar Rojolelennya lebih jauh dipertemukan dengan berbagai pihak, baik dari kalangan seniman, budayawan, tokoh masyarakat, hingga politisi Klaten dan sekitarnya, yang kesemuanya bergabung dalam jejaring Gerakan Peduli Klaten. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut;

“Ya ketemulah jejaring yang Klaten seperti Pak Kiai Anshori itu, Kiai Sam, Kiai Jazuli, Romo Herjito yang dari Muntilan, terus ketemu dengan actor-actor politik Klaten. Di situ saya melihat ada celah untuk berkolaborasi. Kolaborasinya pentas seni budaya dulu pak. Tapi setelah di situ, kok saya kalau berhenti di seni budaya saja, sedang Delanggu punya

---

Sederhananya, sistem sosial merupakan keseluruhan atas bagian-bagian dalam struktur sosial yang berinteraksi dalam satu kesatuan yang koheren.

identitas besar. Bagi beberapa orang sih Delanggu itu lebih besar dari Klaten. Nah saya bergerak pelan-pelan, *brainstorming*, sering pulang malam juga sy pak....” (Wawancara dengan EH pada 20 Juni 2022)

Ada satu *tagline* yang digunakan sebagai semangat kebersamaan dalam jejaring mereka yaitu “*aku biso opo, aku tandang opo, ayo dilakoni.*” Di balik *tagline* tersebut terdapat semangat kebersamaan untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan, tanpa harus menunggu pihak lain, termasuk dalam hal ini, pemerintah. Bagi mereka pantang menyalah-nyalahkan pihak tertentu, karena hal tersebut hanya akan menguras energi. Dari pada mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik mencari dan melakukan solusi. (Wawancara dengan EH pada 20 Juli 2022).

Sebagai bagian dari gerakan sosial, berbagai isu besar yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten tidak lepas dari fokus gerakan mereka, mulai dari isu ketidakadilan sosial hingga kerusakan lingkungan. Semua isu tersebut dibahas oleh komunitas Peduli Klaten, yang di dalamnya terdapat banyak tokoh dengan berbagai latar belakang kepakarannya.

“Kami ini embrio Gerakan Peduli Klaten Pak. Kalau bapak tahu gelora nusantara pak...yang ada di youtube itu gerakan sosial budayanya pak. Tapi untuk kemasyarakatannya ya Gerakan Peduli Klaten. Orang-orang di belakangnya itu seperti Pak Agus Bebek yang mantan Ketua DPRD 2014-19, Romo Kirjito, Kiai Jazuli, Ketua Pondok Pesantren Pancasila Sakti yang cucunya Mbah Liem itu, ya Mbah Agus Bimo budayawan Klaten, Bu Siti Farida mantan DPRD Klaten, yang sekarang anggota Ambosmen RI. Di belakang kami kuat pak. Cuman kita nggak menonjolkan mereka. Jadi *aku iso opo, aku tandang opo, ayo temandang.* (Wawancara dengan EH pada 20 Juli 2022)

Hasil pembahasan tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk pertunjukan seni budaya yang ditampilkan oleh komunitas lokal di satu wilayah kecamatan di mana isu tersebut terjadi. Festival Mbok Sri Mulih yang dilaksanakan oleh Sanggar Rojolele di Desa Delanggu adalah salah satu bentuk formulasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri, sebagai hasil jejaring dengan Komunitas Peduli Klaten, efek gerakan sosial Sanggar Rojolele memiliki daya lebih kuat dan spektrum pengaruh yang lebih luas.

## **Berjejaring dengan Lembaga Akademik**

Perkembangan sains dan teknologi pada satu sisi dan teknologi informasi pada sisi yang lain adalah dua hal yang tidak bisa dipungkiri untuk saat ini. Pengaruh keduanya memasuki seluruh bidang kehidupan, tanpa terkecuali bidang pertanian. Perkembangan dalam bidang pertanian meliputi penemuan bibit unggul, penemuan pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian, memudahkan irigasi lahan pertanian, penemuan pestisida untuk melindungi tanaman, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, dan alat pertanian untuk meningkatkan efisiensi kerja petani (Utami, 2022). Pemegang otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah lembaga akademik, seperti perguruan tinggi. Oleh karena itu, demikian penting kolaborasi antara bidang pertanian dengan perguruan tinggi.

Gambar 5.4. Sanggar Rojolele Berjejaring dengan UNS



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Sanggar Rojolele sebagai lembaga yang memiliki dedikasi untuk kemajuan pertanian di Delanggu, sangat berkepentingan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Di sisi lain, perguruan tinggi juga berkepentingan untuk berkolaborasi dengan petani. Kolaborasi tersebut bisa dalam kerangka riset,

maupun pengabdian masyarakat. Bahkan saat kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan sistim kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan kegiatan pertanian di dunia nyata adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, petani dan kegiatan pertaniannya dan pendidikan tinggi berhubungan simbiosis mutualisme.

Hubungan kolaborasi antara Sanggar Rojolele dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) sudah terjalin sejak tahun 2020. Banyak manfaat yang telah diperoleh Sanggar atas kerjasama tersebut, antar lain; UNS memberikan dukungan berupa ilmu dan teknologi pertanian organik. Petani mendapatkan pendampingan dari para dosen Fakultas Pertanian UNS untuk membuat pupuk organik cair, bio pestisida, pemberian sarana teknologi elektrik pengusir burung, alat penjebak hama padi, serkaligus sarana panel surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dari berbagai alat tersebut (Wawancara dengan SR pada 6 Juli 2022)

Manfaat lain yang diperoleh Sanggar Rojolele berjejaring dengan UNS adalah terjadi dinamika dan perkembangan ide atau gagasan di kalangan aktivis Sanggar. Kehadiran UNS untuk mendampingi petani Delanggu menjadi narasi sekaligus *branding* bagi pertanian Delanggu khususnya memperkuat *branding* beras Rojolele. Dibanding Rojolele produk petani dari kecamatan lainnya, *brand* Rojolele Delanggu menjadi lebih kuat dengan kehadiran UNS. Dari *branding* inilah manfaat-manfaat lainnya kemudian menyusul. Pertanian padi Rojolele Delanggu saat ini mulai kembali dilirik oleh masyarakat. Terbukti, belakangan ini mulai banyak lembaga lembaga pendidikan, komunitas tani, maupun lembaga riset dari kota lain yang berdatangan ke Delanggu. Manfaat dari branding ini juga memperluas jejaring pemasaran beras Rojolele dari Delanggu. Setidaknya Unit Koperasi UNS sendiri tidak kurang dari dua ton sebulan membeli beras Rojolele ini. Bahkan, ada unit bisnis yang bersedia menjadi pengguna sekaligus distributor beras Rojolele Delanggu. Warung SS dengan semua jaringannya setiap bulan berhasil menjual 16 sampai 20 Ton. Hal itu tentu sangat membantu Sanggar Rojolele khususnya dalam membangun pasar atas hasil produksi anggotanya.



“Kesimpulannya perlu narasi dan *branding*. Tapi petani sering tidak sadar kenapa kita sering seremoni dengan UNS dan ada event Mbok Sri Mulih setiap September memperingati hari tani. Bahwa itu adalah *branding*. Untuk keberlanjutan pertanian di sini. (Wawancara dengan petani anggota Sanggar 12 Juni 2022)

Jejaring dengan UNS ini diperkuat dengan dijadikannya Sanggar Rojolele sebagai lembaga patner UNS untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus merdeka. Mahasiswa belajar bersama petani Delanggu terutama tentang pertanian dengan pendekatan semi organik. Hal tersebut menjadikan sanggar Rojolele sebagai pusat belajar dari berbagai komponen masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan atau kunjungan tamu di Sanggar, maka ke depan potensi meningkatnya kesejahteraan petani tinggal menunggu waktu.

Gambar 5.7

UNS membantu *Marketing Ekspose* beras Rojolele dari Petani Delanggu



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

Jejaring Sanggar dengan UNS sebagai lembaga akademik sebenarnya telah memperkuat posisi petani sebagai kelas proletar ketika harus berhubungan dengan kelas borjuis. Hal tersebut terkait fungsi perguruan tinggi sebagai agen perubahan

sosial yang berada di posisi tengah antara kelas penguasa dan pengusaha di satu sisi dengan petani disisi lain. Perguruan tinggi dengan sikap kritis dan independensinya berperan sebagai pembela masyarakat yang terpinggirkan. Peran tersebut dimainkan oleh UNS ketika ia berupaya untuk memotong mata rantai penjualan beras dari petani langsung kepada endyuser atau distributor beras di masyarakat, tanpa harus melalui tengkulak dan pengusaha beras.

Bukan hanya dengan kampus dalam negeri, dengan perantara UNS, Sanggar juga telah membuka hubungan jejaring dengan salah satu perguruan tinggi Jepang. Belakangan ini, tepatnya pada awal bulan Agustus 2022 Sanggar Rojolele menerima tamu dari beberapa peneliti dari Kagoshima University Jepang, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara UNS dan Kagoshima University untuk melakukan riset di wilayah kerja Sanggar Rojolele. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas SDM Sanggar, kualitas produksi petani Sanggar, beras Rojolele, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diikuti terbukanya pasar ekspor untuk beras Rojolele dan produk petani lainnya.

Gambar 5.5

Sanggar Rojolele dan Tim Riset dari Kagoshima University Jepang



Sumber: Dokumentasi Sanggar Rojolele

### **Berjejaring dengan Ormas Islam**

Jejaring lain yang dijalin oleh Sanggar Rojolele adalah organisasi kemasyarakatan khususnya Lembaga Pendamping Pertanian Nahdlotul Ulama (LPPNU). Lembaga ini ikut mendampingi petani Delanggu ketika memasuki awal perlakuan organik. LPPNU berpatner dengan Sanggar dan petani padi Rojolele Delanggu dalam bentuk pendampingan pembuatan pupuk dan obat pestisida organik. Disamping itu, LPPNU juga berjanji hendak membantu penjualan hasil produk berupa beras organik Rojolele Delanggu. Namun belakangan janji tersebut

tidak bisa ditunaikan karena ada missskomunikasi antara kedua pihak. (Wawancara dengan beberapa informan anggota Sanggar Rojolele; SR, YT, KT, PJ, pada tanggal 6 Juni 2022).

## 5. Advokasi

Peran penting lain yang dilakukan oleh Sanggar Rojolele adalah melakukan advokasi memperjuangkan nasib petani Rojolele Delanggu. Advokasi tersebut meliputi pengawalan dana desa untuk pertanian, pengusulan perbaikan bendungan irigasi, pengusulan hak paten padi Rojolele Srinuk unuk masyarakat Klaten, hingga pengusulan program nasional untuk redistribusi lahan pertanian.

Semua advokasi yang dilakukan Sanggar tidak lepas dari posisi Eksan Hartanto sebagai ketua Sanggar Rojolele. Eksan demikian ia sering dipanggil adalah mantan aktivis buruh di Batam. Selama bekerja di Batam Eksan menghabiskan banyak waktunya untuk berjuang bersama beberapa organisasi serikat buruh di Batam, mulai dari serikat buruh internal perusahaan, hingga serikat buruh lintas perusahaan. Bahkan Ia juga pernah aktif diperjuangan jaringan simbul pekerja metal (Jasmetal) sebagai Ketua Konsulat Cabang di Batang. Eksan juga pernah menjadi Ketua DPK (Dewan Pengupahan Kota) Batam, untuk memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Batam. Berikut penuturan Eksan tentang latar belakang dirinya;

“Saya ditempa di Batam. Dulu saya bicara di depan 5 orang saja *ndredek* pak. Tapi setelah di sana kerja di pabrik dengan keadaan kayak dijajah Jepang, kerja 8 jam per hari tidak mendapat makan gratis. Akhirnya kita buat “yo buat serikt pekerja dulu internal pabrik.” Kemudain dihalang-halangi, hanya difasilitasi forum *bipartheit*. Federasinya Serikat pekerja metal Indonesia pak (SPMI). Induknya (konfederasinya Konfederasi nasionalnya Serikat Pekerja Indonesia (SPI). Induk Asia Pasifiknya *Industrial All*, itu asia pasifik. Tapi kalau untuk internasionalnya, *ITUC* (*International Trade Union Confederation*). (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Sebagai aktivis buruh Eksan mendapatkan wawasan bukan hanya di sekitar perburuhan, nemun juga wawasan ekonomi, organisasi, politik, bahkan juga tentang

berbagai macam pemikiran dan ideologi. Lebih dari itu ia mahir dalam berbagai gerakan sosial, teknik penggalangan masa dan advokasi. Berikut penuturannya;

“Adakah kaderisasi di serikat pekerja. Ada pak. Serikat2 pekerja yang militan itu memang hasil perkaderan. Ada, Pendidikan TOT (*Training of Trainer*), pendidikan dasar organisasi, pendidikan lanjutan...ada pendidikan2 nya. Termasuk diajarkan pemikiran-pemikiran, termasuk gerakan-gerakan sosial. Kita datangkan dosen ekopol juga pak. Saya termasuk yang dulu di awal-awal buruh *go politik*, sinaunya sampai ke Omah Tani Bandar Batang, Pekalongan itu, punya Handoko Wibowo itu. Karena masak orang-orang kaya saja yang boleh berpolitik. Sedang buruh tidak punya alat untuk, duduk di legislative, untuk memperjuangkan regulasi yang pro buruh. Kemarin ada isu JHT, kalau tidak ada perlawanan buruh main diteken saja pak sama Menaker. Jadi saya ditempa di Batam pak. ....Yang terakhir Ketua Konsulat Cabang di Batam, hanya dua tahun untuk megang satu kota. Saya pernah menjabat DPK juga pak (Dewan Pengupakahan Kota) tahun 2011-2013. Untuk naikin UMK kota Batam, bisa naik dua juta. Setiap bulan survei di pasar-pasar. Karena salah kaprah, dulu jaman Habibi Batam itu untuk menjadi halaman depan Indonesia. Tapi yang terjadi saat ini malah menjadi halaman belakangnya Indonesia. Kesejahteraan buruhnya tinggi Jakarta dari Batam. Kita berjuang untuk itu pak. Dulu sampai kita gerakan 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk menekan rapat yang lagi rapat di dalam kantor. Upah yang menetapkan kan Walikota dengan mendengarkan usulan Disnaker.” (Wawancara dengan EH pada 12 Juni 2022)

Dalam melakukan advokasi Eksan memiliki rumus konsep, lobi dan aksi (KLA). Maksud KLA adalah memperjuangkan kepentingan dengan terlebih dulu menyiapkan konsepnya. Jika dengan menawarkan konsep, suatu kepentingan sudah diakomodir, maka selesailah advokasi. Namun jika konsep tertolak, maka Eksan melakukan lobi. “Dengan lobi maka pejabat atau yang berwenang dapat terjaga martabatnya,” demikian latar belakang pentingnya lobi. Namun jika dengan lobi, kepentingan yang diperjuangkan belum juga berhasil maka sebagai jalan terakhirnya adalah melakukan aksi, dengan pengerahan masa (Wawancara dengan EH pada 20 Juli 2022).

Adapun hal-hal yang pernah dan sedang dilakukan advokasi adalah meliputi hal-hal berikut:

- a) Pengawasan Kebijakan Pemerintah Desa hingga Kabupaten

Mengingat pemerintah merupakan stake holder utama sektor pertanian di samping petani itu sendiri, maka mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian menjadi prioritas dalam advokasi Sanggar Rojolele. Kebijakan di tingkat pemerintahan desa misalnya tentang pentingnya alokasi dana desa untuk perbaikan sarana pertanian. Sebagai hasilnya, pemerintah Desa Delanggu merasa sangat terbantu dengan advokasi yang dilakukan Sanggar. Diakui oleh Kepala Desa bahwa untuk kepentingan aspirasi pertanian sudah cukup terwakili oleh kehadiran Eksan Hartanto. Setelah nihil selama pandemi kini pemerintah Desa Delanggu mengalokasikan dana Rp. 5.000.000 untuk pengadaan omah burung hantu (Wawancara dengan Kepala Desa Delanggu pada 7 Juli 2022).

Advokasi untuk pemerintah Kabupaten Klaten adalah tidak kalah penting, mengingat pemerintah Kabupaten memiliki wewenang tentang berbagai hal terkait bidang pertanian dan jejaring yang tidak terbatas. Diantara hasil advokasi Sanggar bersama komunitas lainnya adalah kebijakan Bupati untuk mengembalikan beras Rojolele sebagai icon Kabupaten Klaten.

#### Gambar 5.8

Mengikuti Rapat Kerja Komisi 2 DPRD Kab. Klaten Yang Membedangi Sektor Pertanian Dengan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Klaten,



Sumber : Dokumentasi Sanggar Rojolele

Belakangan ini Eksan juga kritis terhadap kebijakan Kementerian Pertanian yang sdisebut IP 400. Kebijakan ini menurut Eksan tidak realistis, mengingat petani IP 400 merupakan bentuk intensifikasi pertanian, yang sangat yang menyebabkan tanah pertanian semakin kritis. Petani diminta panen, luku, garu dan tandur kembali. Berikut pendapat Eksan;

“Sekarang ada program IP400. Indek panen 400. Setahun disuruh panen 4 kali. Itu program Kementan pusat pak. Klaten sudah dicanangkan 100 Ha. Dia pakai varitas yg 3 bulan panen. Benihnya pindah tanam. Habis panen, luku, garu, dan tandur. Dampaknya, tanahnya semakin kritis. Blue printnya bagus. Petani diminta pakai pupuk organik. Tapi apa petani bisa, bgm air, dan seterusnya? Paradognya di sini pak. Bupati belum lama ini mencananagkan IP 400 di desa Spipit , tetangga desa sini, dengan seremoni. Paginya seremoni, sorenya di situ hujan deras dan banjir. Paradog to pak. Petani 3 kali panen saja, air tidak bisa meresap karena bantatnya tanah. Apa lagi setahun 4 kali. Pasti dihantam orea terus. Ndelalah hujan deras, sorenya banjir. Tanahnya bantat, tidak bisa serap air (Wawancara dengan EH pada 22 Juni 2022)

b) Perbaikan Bendungan Blambangan

Pengairan untuk pertanian di sekitar Delanggu mengandalkan irigasi teknis. Oleh karena itu petani sangat bergantung pada sarana irigasi yang ada. Ketika bendungan sebagai sumber mata air atau saluran airnya rusak, maka pengairan sawah menjadi terganggu. Beberapa tahun yang lalu, bendungan Blambangan desa Kecamatan Delanggu mengalami kerusakan, sehingga tidak berfungsi. Mengingat air merupakan kebutuhan primer bagi pertanian, maka Eksan tidak tinggal diam. Pada 25 Oktober 2019 Eksan melakukan komunikasi melalui aplikasi watshap dengan Gubernur Jawa Tengah. Sebagai hasilnya bendungan tersebut dilakukan rehab oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran dana hampir Rp 200.000.000.

Keberhasilan tersebut tidak datang begitu saja, melainkan memerlukan perjuangan panjang. Eksan mulai berkomunikasi dengan Dinas PembangunanUmum Kabuoaten Delanggu, tapi kemudian lobiying tertolak, dengan alasan bendungan tersebut merupakan wialyah pemerintah provinsi.

Hingga akhirnya pemerintah Provinsi mau menerimanya untuk diperbaiki. Bendungan ini dimanfaatkan oleh setidaknya tujuh desa dari dua kecamatan.

c) Hak Paten untuk Padi Rojolele Srinuk dan Sritan

Menyikapi semakin rusaknya icon Delanggu sebagai produsen beras premium yang disebabkan oleh begitu bebasnya beras dari luar Delanggu atau bahkan juga di luar Kabupaten Klaten yang menggunakan brand sebagai beras Delanggu, Sanggar Rojolele ikut prihatin. Faktor utama penyebab banyaknya beras dari luar Delanggu-Klaten menggunakan brand sebagai beras Delanggu adalah belum dimilikinya hak paten atas beras Delanggu. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Klaten (BAPEDA Kab. Klaten, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Perikanan Kab. Klaten) bersama beberapa komponen masyarakat Klaten (pegiat petani lokal Delanggu Raya) bekerjasama dengan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) guna mendapatkan kembali benih padi Rojolele untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Klaten. Atas dasar itu kemudian BATAN melakukan beberapa riset yang kemudian menghasilkan benih padi varitas baru turunan Rojolele yang dinamakan Srinuk.

“Dulu ada Rojolele induk, yang masa tanamnya 5 bulan lebih, tinggi tanaman 1,5 m...dikenal pari Gendruwo, karena tinggi dan gatal. Sejak tahun 2013 petani lokal di sini pingin riset tentang kemungkinan bisa dibuat varitas baru Rojolele, yang hampir sama dengan padi varitas lain, baik dengan masa tanam maupun tingginya, yang tidak mudah rebah kalau tertimpa angin. Akhirnya pemerintah Kab. Klaten mengajukan ke Batan untuk itu. Riset berjalan 6 tahun (2013-2019) melalui uji multi lokasi tanam, uji ketahanan tanaman, yang terakhir uji cita rasa 2019, dan akhirnya lolos uji sidak varitas.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022)

Untuk menjaga agar tidak semua daerah bisa melakukan klim sebagai beras Delanggu, maka varitas baru Rojolele Srinuk ini kemudian dipatenkan. Dengan hak paten tersebut maka Rojolele Srinuk hanya bisa ditanam di Klaten.

“Baru tahun 2020 mengajukan SK perlindungan varitas tanaman, dan disetujuinya tahun 2021. Baru dilouncing th 2022. Jadi RL saat ini memiliki SK perlindungan tanaman atau disebut HKI. Kalau ada petani



luar Klaten menanam itu ada pidananya pak. Itu masukan kami juga pak. Waktu rapat dengan pendapat (RDP) dengan DPRD komisi dua, yang membidangi pertanian. Kita belajar dari karung beras yang bertuliskan beras Delanggu, padahal isinya beras luar Delanggu. Jadi biar itu tidak terjadi dengan beras Rojolele yang ajukan riset lama, 6 tahun, maka biar yang merasakan kesejahteraan petani local.” (Wawancara dengan EH pada 31 Mei 2022).

d) Redistribusi Lahan

Advokasi yang paling mendasar dilakukan oleh Sanggar Rojolele adalah redistribusi lahan. Satu fenomena hegemoni kapitalisme yang terjadi dalam bidang pertanian Delanggu adalah tentang kepemilikan lahan. 95% petani Delanggu tidak memiliki lahan sendiri. Mereka menjalankan pertanian di lahan milik orang lain dengan sistim “maro”. Mereka adalah petani penggarap. Penghasilan petani penggarap adalah setengah dari keseluruhan hasil panen. Padahal mereka yang menanggung biaya operasional taninya, mulai dari penyiapan lahan hingga panen. Sementara itu ada salah satu orang yang bukan petani memiliki 20% luas lahan di Delanggu. Dia akan mendapatkan setengah hasil panen yang disetor oleh petani penggarap.

“Bikin regulas yang benar-benar menarik anak muda untuk terju Rp 8 juta, dibagi dua, hasilnya Rp 4 juta, dikurang ongkos garap 1,5 juta. Hasilnya dibagi dua, hasilnya Rp 2,5 juta ...dibagi 4 bulan, tidak mencapai Rp 500.000. Lajangpun hasil itu tdk cukup.” (Wawancara dengan Eksan pada 12 Juni 2022)

Menyikapi ketidakadilan tersebut muncul dalam benak pimpinan Sanggar Rojolele untuk melakukan advokasi tentang reforma agraria atau redistribusi lahan. Yang dimaksud redistribusi lahan menurut Eksan adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan hak guna lahan pertanian yang selama ini tidak produktif kepada pemuda petani, sehingga petani penggarap tidak harus membagi penghasilannya. Hal tersebut tampak dalam wawancara berikut;

“Yang dimaksud redistribusi lahan teknisnya saya kurang tahu pak. Tapi maksudnya Kementerian Agraria dimulai dari memetakan lokasi yang menjadi lumbung pangan di Indonesia ini. Nah perda tentang pemetaan tata ruang wilayah juga dikuatkan. Yang zona hijau harus

dijaga betul, jangan sampai disentuh oleh pembangunan nasional. Nah anak muda diberi hak guna saja pak. Kalu hak milik rawan dijual. Yang pasti tanah tersebut digarap anak muda dan hasilnya dipakai sendiri. Tidak dibagi dua. Ekstrimnya seperti itu pak.” (Wawancara dengan Eksan 31 Mei 2022)

Ia yakin bahwa dengan reformasi agraria, minat anak muda untuk menjadi petani akan bengkit kembali, karena dengan pertanian kesejahteraan mereka akan meningkat. Bertolak pada keyakinan akan kebenaran idenya Eksan sebagai ketua Sanggar memprovokasi siapapun untuk menyetujui idenya tersebut. Ide tersebut disampaikan di manapun ketika Eksa bertemu dengan berbagai elemen masyarakat dari tokoh politik, pejabat publik, hingga kawan-kawan sesama petani.

### **C. Sanggar Rojolele dalam Pandangan Dakwah Pembebasan**

Untuk dapat membaca dengan tepat apa yang dilakukan oleh Sanggar Rojolele jika dilihat dari sudut pandang dakwah, maka memahami latar belakang sosial budaya masyarakat yang terjadi pada saat ini adalah penting dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan interkoneksi dan integrasi antar berbagai bidang kehidupan. Kehidupan keagamaan di mana dakwah menjadi bagian di dalamnya pun demikian, pasti terkait dengan bidang sosial budaya masyarakat yang tengah terjadi pada saat ini.

Gelombang besar yang pengaruhnya mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat saat ini tidak bisa lepas dari modernisasi khususnya dan hubungan antar bangsa-bangsa Barat dan Timur pada umumnya. Seperti kita ketahui bahwa modernisasi selain membawa kemajuan di berbagai bidang, tetapi juga membawa dampak negatif yang tidak kalah mengawatirkan. Modernisasi telah membawa masyarakat untuk hidup secara tidak seimbang. Masyarakat cenderung untuk lebih mementingkan kehidupan duniawi yang bercorak materialistik. Akibatnya masyarakat modern mengalami apa yang disebut dengan alienasi (keterasingan diri). Semakin modern masyarakat, semakin maju kehidupannya, serta semakin sejahtera. Namun pada saat yang sama, mereka merasakan kekosongan makna

dalam dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh nihilnya spiritualitas dalam peradaban modern. Spiritualitas merupakan jati diri manusia, sehingga nihilnya spiritualitas dalam kehidupan modern menghasilkan alienasi bagi manusia sebagai pemiliknya. Manusia modern mengalami dahaga spiritual yang luar biasa. Dari sinilah kita kemudian memahami mengapa ritualitas keagamaan menjadi pusat kerumunan masyarakat modern. Ritualitas keagamaan diyakini serta dirasakan masyarakat muslim modern sebagai pusat spiritualitas. Oleh karena itu, berbagai acara ritual keagamaan yang menjual spiritualitas menjadi laris manis “dibeli” oleh masyarakat modern.

Dengan setting sosial budaya yang demikian melahirkan beragam gerakan dakwah yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat muslim Indonesia. *Mainstream* gerakan dakwah Indonesia berusaha memberikan jawaban instan atas dahaga spiritualitas masyarakat modern. Gerakan dakwah yang bercorak spiritualitas serta membawa pesan etis-moral keagamaan (*akhlaq*) ini berlangsung di berbagai tempat atau wilayah di mana komunitas muslim berada. Setiap hari minimal sekali atau dua kali, diselenggarakan acara dakwah keagamaan dengan nuansa etis-spiritualistik semacam ini di berbagai media massa televisi nasional maupun lokal.

Yang lebih tragis adalah adanya fenomena komodifikasi agama dan penyiaran agama. Semua tayangan penyiaran Islam di televisi melibatkan banyak iklan. Kita semua paham bahwa iklan sebenarnya instrumen kapitalisme bukan saja untuk kepentingan pemasaran produk industri, tetapi bahkan membangun mental konsumerisme masyarakat muslim. Iklan juga membangun *mainset* baru masyarakat muslim untuk tidak saja belanja kebutuhan primer mereka, tetapi juga menjadikan kebutuhan tersier seolah-olah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Tujuan akhirnya adalah menjadikan masyarakat muslim sebagai pasar atas produk mereka, sehingga eksploitasi menjadi semakin massif.

Di samping itu, ada gerakan dakwah yang lebih menekankan pada upaya mengejar ketertinggalan masyarakat muslim dibandingkan dengan masyarakat

modern. Inilah yang dilakukan oleh kelompok muslim modernis. Sesuai dengan namanya, gerakan dakwah ini mengusung tema kese-arahannya antara Islam dan modernitas. Modernitas dipahami sebagai suatu keharusan yang tidak mungkin dihindarkan oleh masyarakat muslim. Bahkan menurut mereka ada kesesuaian antara nilai Islam dan nilai modernitas. Yang harus dikerjakan oleh muslim adalah melakukan pembaharuan dan pemurnian (*purification*) paham keagamaan, untuk mengembalikan pada ajaran Islam yang *otentik*. Ajaran Islam *otentik* inilah yang bersifat universal dan akan mampu mengejar ketertinggalan kehidupan kaum muslimin. Gerakan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah sebagai representasi gerakan modern Islam dapat mewakili kelompok ini.

Sebagian kalangan muslim lainnya memahami kehidupan modern sebagai musuh yang mengancam corak kehidupan mereka yang bersifat religius. Oleh karena itu muncul gerakan dakwah yang eksklusif. Mereka mengasingkan diri dengan membuat tembok pembatas dengan budaya modern. Gerakan dakwah ini berupaya membuat tandingan dengan menampilkan kembali corak kehidupan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh jaman dahulu. Jika masyarakat modern memiliki tradisi berobat secara medis, mereka menawarkan pengobatan herbal. Jika masyarakat modern mengusung musik modern, mereka mengusung musik nasid, dan seterusnya.

Dari ketiga model dakwah yang diselenggarakan masyarakat muslim Indonesia tersebut di atas, meminjam istilah Asghar Ali Engineer adalah gerakan dakwah yang menekankan Islam formal dan ibadah ritual. Gerakan dakwah ini lebih menekankan penampilan, ibadah ritual, dan akhlak dalam pengertian personal. Benar bahwa semua ibadah ritual tersebut merupakan kewajiban dalam Islam, namun Islam bukan hanya ajaran ibadah ritual dan moral personal saja. Mereka sedikit melupakan inti dari misi Islam untuk mewujudkan tatanan sosial yang beretika, berkeadilan, dan egalitarian (Engineer, 1990). Akibatnya mereka kurang begitu melihat terjadinya kesenjangan sosial antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, masyarakat borjuis dan masyarakat proletar di negara-negara

muslim. Mereka gagal melihat terjadinya hubungan eksploitatif dalam masyarakat antara mereka pemilik kapital dengan mereka masyarakat yang papa.

Memang ada sebagian kalangan muslim yang mengusung tema-tema ekonomi dalam dakwah mereka. Mereka menyerukan pada masyarakat untuk meninggalkan praktek riba dan anti bank. Mereka ingin kembali pada sistim ekonomi Islam khususnya dan nilai-nilai fundamentalisme Islam pada umumnya. Mereka ingin menerapkan syariat Islam sebagaimana pernah dipresentasikan oleh para ulama Islam klasik, seraya menolak hal-hal yang secara formal bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam yang dimaksud adalah seperti hukum potong tangan bagi pencuri, mencambuk orang yang mabuk, dan merajam untuk pezina. Inilah yang kemudian disebut sebagai gerakan fundamentalisme Islam (Guidere, 2012). Tetapi tetap saja, mereka membatasi diri pada hal-hal yang sebenarnya bersifat formal dan simbolis. Mereka ingin mendirikan bank tanpa bunga, tetapi mereka tidak sadar bahwa yang akan memanfaatkan jasa bank tersebut tidak lain adalah kaum borjuis. Tidak terpikirkan oleh mereka untuk membuat skema kredit untuk orang miskin. Akhirnya bank tanpa bunga tersebut hanya dimanfaatkan oleh kelas *the have* untuk memperkuat permodalan mereka. Secara general, mereka sama dengan penyelenggara dakwah sebelumnya, tidak memikirkan pola hubungan sosial yang eksploitatif yang terjadi di masyarakat muslim dan tidak pula berupaya untuk mengatasinya. Di sinilah urgensi dakwah pembebasan sebagai solusi untuk masyarakat muslim yang tereksploitasi oleh kekuatan kapitalistik.

Sanggar Rojolele sadar bahwa telah terjadi hubungan sosial yang eksploitatif dalam masyarakat Delanggu. Dalam kelompok sosial tersebut terdapat para buruh tani dan petani penggarap yang tereksploitasi di satu sisi dan para ptuan tanah dan pengusaha beras dan pemilik industri pertanian sebagai penghisap di sisi lainnya. Hubungan sosial yang ribawi tengah terjadi di Desa Delanggu. Menyadari akan hal itu, maka Sanggar Rojolele mengambil kebijakan untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang tereksploitasi.

Dalam perspektif dakwah pembebasan, apa yang dilakukan oleh Sanggar Rojolele dengan mendampingi para petani di Delanggu merupakan bentuk dari dakwah pembebasan. Sanggar Rojolele tidak mengajak para petani untuk mengaji kitab, atau mengikuti kajian tentang *kaifiyah* sholat, puasa dan haji. Sanggar Rojolele juga tidak mengajak petani untuk melakukan amalan-amalan tasawuf yang kaya dengan nuansa spiritual. Yang dilakukan Sanggar Rojolele adalah menguatkan kompetensi kultural para petani, mencerahkan petani dengan inagurasi seni-budaya yang berbau satire, membuka sumbatan komunikasi struktural dengan pemerintah, serta melakukan advokasi dengan berbagai kalangan untuk memperjuangkan pola hubungan sosial yang berkeadilan.

Namun merujuk pada teori dakwah pembebasan yang menyaratkan dua hal; melakukan usaha pembebasan (*liberation*) dari kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang represif dan hegemonistik; dan pembebasan teologi konservatif menuju teologi transformatif, maka dakwah yang dilakukan Sanggar Rojolele sebenarnya baru memenuhi syarat yang pertama. Sanggar Rojolele telah berupaya membebaskan petani penggarap dan buruh tani dari hegemoni tuan tanah dan pengusaha beras dan pertanian. Namun untuk melakukan mengubah pemahaman keagamaan masyarakat yang masih konservatif, belum dilakukan.

Islam merupakan agama pembebasan, mulai dari nilai-nilai dasarnya, konsep teologinya, ibadah ritual, hingga prinsip etik-moralnya, sangat mendukung upaya pembebasan sebagaimana dilakukan Sanggar Rojolele. Oleh karenanya Sanggar mestinya tidak menafikkan agama (Islam) dalam merumuskan misi, program kerja dan aktivitasnya, hingga jejaringnya. Islam sangat berbeda dengan agama pada umumnya, yang digambarkan Marx sebagai candu. Islam, sebagaimana dipresentasikan dalam sejarah para Nabi, seperti Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW adalah agama yang merangkul, mendampingi, dan membela kaum *mustadhafin* (masyarakat lemah)(Rakhmat, 1986).

Dakwah pembebasan inilah yang mestinya dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah di berbagai tempat di Indonesia atau bahkan dunia pada umumnya. Masih

banyak warga masyarakat yang berada dalam posisi tertindas dalam pola hubungan ekonomi, sosial, dan budaya. Tugas lembaga dakwah adalah mengangkat masyarakat yang termarginalkan, sehingga terbebas dari eksploitasi kelompok sosial lainnya. Mereka dalah petani kecil, buruh tani, petani penggarap, pedagang kaki lima, nelayan, buruh, dan sebagainya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari perspektif teori konflik Marx, masyarakat Delanggu bukan masyarakat yang sedang baik-baik saja, melainkan masyarakat yang “sakit”. Terjadi ketegangan dalam pola hubungan sosial, utamanya antara kaum borjuis yang terdiri dari tuan tanah serta para pengusaha beras di satu sisi, serta petani penggarap dan buruh tani sebagai kelompok masyarakat proletar. Pemiaraan terhadap hal tersebut merupakan bom waktu yang setiap saat siap meledak dalam bentuk ketidak amanan ketahanan pangan masyarakat dan bangsa.

#### 1. Hegemoni kapitalisme di Desa Delanggu

Berikut bentuk hegemoni kapitalisme yang terjadi di Desa Delanggu;

- a. Penguasaan lahan oleh tuan tanah. Minoritas tuan tanah menguasai mayoritas luas lahan sawah. Kenyataan ini telah mengakibatkan munculnya kemiskinan struktural petani penggarap dan buruh tani. Para petani dan buruh tani harus membagi hasil pertanian mereka yang sudah sangat kecil untuk dibagi dengan tuan tanah, sehingga kehidupan mereka semakin miskin. Akibat lainya dari ketidakadilan struktural tersebut adalah mandegnya regenerasi petani. Tidak banyak generasi muda yang mau memilih menjadi petani.
- b. Hegemoni kapitalisme di Desa Delanggu lainya adalah berupa dominasi dan hegemoni pengusaha beras. Pengusaha beras menjadi bagian dari kelompok borjuis yang menguasai pasar. Keuntungan lebih besar dari hasil panen pertanian bukan dinikmati oleh petani, melainkan oleh pengusaha beras ini. Dengan modal produksi yang mereka miliki, pengusaha beras lebih dipercaya pasar daripada petani. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi, pengusaha beras tidak sungkan memanfaatkan lembaga pertanaan seperti kelompok tani dan



gapoktan untuk mendapatkan subsidi, bantuan untuk petani, fasilitas dan prefaladge lainnya dari pemerintah.

- c. Hegemoni kapitalisme terhadap petani Delanggu semakin lengkap dengan adanya upaya senyap yang dilakukan oleh pengusaha industri besar pertanian, produsen bibit, pupuk, dan obat pertanian.

## 2. Resistensi Petani terhadap hegemoni kapitalisme di Desa Delanggu

Sanggar Rojolele merupakan lembaga kecil yang berideologi kiri, berada di tengah-tengah wilayah “lumbung padi” yang dengan tidak kenal lelah mendampingi petani untuk terbebas dari hegemoni kapitalisme. Adapun upaya yang dilakukan Sanggar Rojolele tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bersama komponen masyarakat serta pemerintah berupaya mengembalikan padi Rojolele sebagai icon Desa Delanggu. Untuk saat ini upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan ditemukannya turunan varietas Rojolele yakni Srinuk dan Sriten. Kedua varietas tersebut telah dipatenkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, serta telah dibudidayakan di sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengatasi rantai pasar yang menekan petani, Sanggar Rojolele juga berupaya untuk membangun pasar sendiri. Melalui pasar ini, petani dapat secara langsung menjual hasil panen mereka kepada *end user*.
- c. Sanggar Rojolele juga berupaya untuk membangun kesadaran kelas petani melalui seni-budaya, antara lain dengan event “Festifat Mbok Sri Mulih (FMSM)”. Hasilnya memang belum signifikan, tetapi petani mulai menyadari pentingnya bersinergi satu dengan lainnya untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri.
- d. Sanggar Rojolele juga membangun jejaring dengan berbagai komponen sosial di sekitar kabupaten Klaten di antaranya melalui Perguruan tinggi (UNS) dan Komunitas Peduli Klaten untuk memperjuangkan nasib petani.

- e. Upaya terakhir yang dilakukan Sanggar adalah melakukan advokasi kebijakan pemerintah mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga kabupaten. Hal mendasar yang dilakukan Sanggar adalah advokasi dalam bidang reformasi agraria yang disebut dengan “land reform”.
3. Dari sudut pandang dakwah, apa yang dilakukan Sanggar Rojolele merupakan dakwah pembebasan. Sebagai indikasinya adalah pembelaan terhadap para petani penggarap dan buruh tani dari eksploitasi kelompok kapitalis. Namun demikian, dakwah pembebasan yang dilakukan Sanggar Rojolele belum didasarkan atas pandangan keagamaan yang mendukung perubahan (teologi transformatif).

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada peneliti berikutnya, masih banyak tema sosiologi pertanian yang perlu diangkat menjadi objek penelitian berikutnya. Antara lain pemetaan potensi kaderisasi petani melalui pesantren.
2. Kepada lembaga dakwah. Tidak mungkin Sanggar sebagai lembaga kecil melakukan dekonstruksi pemahaman teologi konservatif ke teologi transformatif. Oleh karena itu lembaga dakwah bisa mengambil peran tersebut, untuk dissinergikan dengan dakwah pembebasan Sanggar Rojolele.
3. Kepada Sanggar, hendaknya menjadi lembaga yang menjaga sustainabilitas perjuangan. Mengingat pendampingan terhadap kaum lemah, adalah jalan perjuangan yang amat panjang.
4. Kepada masyarakat dan komponen sosial lainnya hendaknya peduli dengan perjuangan dakwah pembebasan, bukan malah sebaliknya menjadikan agama sebagai alat legitimasi kelompok penindas.

## DAFTAR PUSTAKA

- @widyamataram. (2021). *Sektor Pertanian Penyelamat Ekonomi Masa Pandemi*.
- Alamban, R. (2002). *Agriculture: Bio-organic Farming Increases Farm Production*. S&T Media Service, Science and Technology Information Institute. Communication Resources and Production Division.
- Aliyuddin, A. (2016). Dakwah Bi Al-Hal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *ANIDA, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 15(2), 187–206. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida>
- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aryanto, F. (2022, May). Konflik agraria, petani di Mukomuko Bengkulu rawan dikriminalisasi. *Antara Bengkulu*, 1.
- Azhar, I. S. (1999). *Radikalisme Petani Masa Orde Baru*. Yayasan Untuk Indonesia.
- Azis, M. A. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pesantren.
- Banowati, E. (2013). *Geografi Sosial*. Penerbit Ombak.
- Bapan Pusat Statistik, B. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen>.
- Bellanca, N. (2013). Capitalism. *Handbook on the Economics of Reciprocity and Social Enterprise*, May, 59–68. <https://doi.org/10.4337/9781849804745.00013>
- Berry, D. (2004). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyono, B. T. (1983). *Masalah Petani Gurem*. Liberty.
- Delanggu, K. D. (2021). *Buku Data Monografi Desa Delanggu Tahun 2021*.
- Duteurtre, G., Pannier, E., Hostiou, N., Pham, D.K., Bonnet, P. (2021). Economic Reforms and the Rise of Milk Mega Farms in Vietnam: Governing the Post-socialist Transition. *European Journal of Development Research*. <https://doi.org/10.1057/s41287-021-00456-3>
- Elster, J. (1986). *Karl Marx "Marxisme-Analisis Kritis*. PT Prestasi Pustaka Karya.
- Engineer, A. A. (1990). *Islam and Liberation Theology.~ Essays on Liberative Elements in Islam*, New Delhi. Sterling Publisher Private LimitecL.
- Fakih, M. (1995). —*Tanah Sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang*

*dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi, ed. Untoro Hariadi & Masruchah, (LSM-LP2M (ed.)). BNPT atau.*

- Fakih, M. (2003). *Bebas dari Neoliberalisme*. Insist.
- Fitrianto, R. (2017). Perkembangan Industri Karung Goni Delanggu 1934 - 1968. *Ilmu Sejarah S1*, 2(4).
- Fukuyama, Francis; Hantington, S. P. (2005). *The Future of World Order*. Ircisod.
- Garnham, N. (1990). *Capitalism and Communication Global Culture and The Economics of Information*. Sage Publications.
- Guidere, M. (2012). *Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism*. The Scarecrow Press.  
[https://books.google.co.id/books?id=p5FWkN6B09YC&pg=PA76&redir\\_esc=y#v=onepage&q=definition islamic fundamentalism&f=false](https://books.google.co.id/books?id=p5FWkN6B09YC&pg=PA76&redir_esc=y#v=onepage&q=definition%20islamic%20fundamentalism&f=false)
- HAR. Gibb. (1998). *Islam and Civization* (V).
- Hartanto, E. (2022). *Festival Mbok Sri*. Sanggar-Rojolele.Id. <https://www.sanggar-rojolele.id/artikel/read/festival-mbok-sri>
- Haryanto, D. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*,. PT. Prestasi Pustakarya.
- Hasdiansyah, A., Sugito, Suryono, Y. (2021). Empowerment of farmers: The role of actor and the persistence of coffee farmers in rural pattongko, indonesia Open Access , pp. 3805-3822. *Qualitative Report*, 26(12), 3805–3822.  
[https://doi.org/DOI 10.46743/2160-3715/2021.4876](https://doi.org/DOI%2010.46743/2160-3715/2021.4876)
- Idris, M. A. (2020). "Dakwah Pembebasan" Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Buku "Nuansa Fiqih Sosial." *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.1 : Juni 2020*, 6(1), 35–52.
- Ikaningtyas, D. A. (2013). *Produksi Beras di Delanggu pada Masa Orde Baru 1968-1984*. Universitas Gadjah Mada.
- J. Heryanto. (2003). Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, V(1), 17–24.
- Jaya, P. H. I. (2012). 161 Jurnal Dakwah, Vol. XIII, No. 2 Tahun 2012 DAKWAH PEMBEBASAN:Sebuah Cerita Dari Saung Balong, Majalengka,Jawa Barat. *Jurnal Dakwah*, VIII(2), 161–176.  
[https://www.academia.edu/79143330/DAKWAH\\_PEMBEBASAN\\_Sebuah\\_Cerita\\_Dari\\_Saung\\_Balong\\_Majalengka\\_Jawa\\_Barat](https://www.academia.edu/79143330/DAKWAH_PEMBEBASAN_Sebuah_Cerita_Dari_Saung_Balong_Majalengka_Jawa_Barat)
- Juliantara, D. (2020). *Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi*. 18.
- Kambali, M. (2017). Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.13>

- Kartasapoetra, K. (1991). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. PT. Milton Putra.
- Khusna, K., Kurniati, R. F., & Muhaimin, M. (2019). Pengembangan Model Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.89-98>
- Magdoff, F. (2015). A rational agriculture is incompatible with capitalism. *Monthly Review*, 66(10), 1–18. [https://doi.org/10.14452/MR-066-10-2015-03\\_1](https://doi.org/10.14452/MR-066-10-2015-03_1)
- Mantalean, V. (2022, May 18). Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkap Saat Konflik Agraria. *Kompas.Com*, 1.
- Margaret, P. (2010). *Sosiologi Kontemporer*,. Raja Grafindo Persada.
- Maulana, S. H. S. dan M. (n.d.). LUAS LAHAN USAHATANI DAN KESEJAHTERAAN PETANI: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30.
- Muthahhari, M. (1988). *Falsafah Pergerakan Islam*. Penerbit Mizan.
- Muthahhari, M. (1993). *Masyarakat dan SEjarah, Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Mizan.
- Naim, M. (2011). Kita Belum Merdeka. *Kompas*.
- Oneal, J. R., & Russett, B. M. (2016). CLASSICAL REALISM, LIBERALISM, MARXISM: REVISITING THE MAINSTREAM APPROACHES IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY. *Transnasional*, 11(1), 47–60. <https://doi.org/10.1111/1468-2478.00042/ABSTRACT>
- Onghokham, O. (1998). *Kapital dan Politik dalam Ruth Mc Vey Southeast Asian Capitalists*. Yayasan Obor Indonesia.
- Poesoro, A. W. L. (2005). *POLICY ASSESSMENT Juni 2005 MEMBANGKITKAN INVESTASI DI INDONESIA*. [www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)
- Prabowo, G. (2020). Revolusi Hijau di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/10/161812669/revolusi-hijau-di-indonesia>.
- Prakoso, T. S. (2021, October). Benih Rojolele Srinuk & Srinar Hanya untuk Petani Klaten. *Solopos.Com*.
- Pramana, A., Adhianata, H., Zamaya, Y., Nopiani, Y., Alvionita, P. (2021). Acceleration of Sago Food Diversification in Improving the Welfare of Sago Farmers in Riau Province. *Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP 934(1), 012091. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012091>
- Priadi, D., Kuswara, T., & Soetisna, U. (2007). PADI ORGANIK VERSUS NON ORGANIK: STUDI FISILOGI BENIH PADI (*Oryza sativa L.*) KULTIVAR

LOKAL ROJOLELE ORGANIC VERSUS NON-ORGANIC RICE: A CASE STUDY OF SEED PHYSIOLOGY OF RICE (*Oryza sativa* L.) LOCAL CULTIVAR ROJOLELE. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 9(2), 130–138.

- Purwandani, H., & Tonni, L. M. K. dan F. (2019). PERLAWANAN TERSAMAR ORGANISASI PETANI: SINERGI ANTARA KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN GERAKAN SOSIAL. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06(03), 240–249. <https://media.neliti.com/media/publications/181004-ID-perlawanan-tersamar-organisasi-petani-si.pdf>
- Purwanta, H. (2014). Gerakan Kiri di Klaten: 1950-1965. *Patrawidya*, 15(3), 357–372.
- Qadavi, J. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)*.
- Raharjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes Of the Qur'an*,. Mineapolis. Bibliotheca Islamica.
- Rakhmat, J. (1986). *Islam Alternatif*. Penerbit Mizan.
- Ramli, A. M. (2000a). *Peta Pemikiran Karl Marx :Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. LKIS.
- Ramli, A. M. (2000b). *Peta Pemikiran Karl Marx :Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. LKIS.
- Rifki, M. S. (2021). *Romantika Swasembada Beras Zaman Orde Baru, Mungkinkah Dapat Terjadi Kembali?* <https://retizen.republika.co.id/posts/14729/romantika-swasembada-beras-zaman-orde-baru-mungkinkah-dapat-terjadi-kembali>
- Ritzer, G. and D. J. G. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Rohmawati, Sean Fitria Laily, Nurani, Farida; Ribawanto, H. (2017). PEMBERDAYAAN PETANI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 147–153. <https://media.neliti.com/media/publications/77222-ID-pemberdayaan-petani-dalam-meningkatkan-k.pdf>
- Rojolele, D. S. (2016). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*.
- Samekto, FX, A. (2018). *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan....*, hal. 80. ?

- Santoso, M. A. F. (2021). *Civil Society Perspektif Islam dan Barat: dari Wacana Global ke Gerakan di Indonesia* (Cetakan Pe). IB Pustaka.
- Sardjono, D. (2021, October). Petani Klaten Sukses Kembangkan Padi Rojolele Srinar dan Srinuk. *Mediaindonesia.Com*.
- Satriya, S. (2021). *Upaya dan Tantangan Regenerasi Petani Indonesia*. <https://ugm.ac.id/id/berita/21731-upaya-dan-tantangan-regenerasi-petani-indonesia>
- Scott, B. R. (2006). *The Political Economy of Capitalism*.
- Setiawan, K. (2022, January). Petani: Harga Pupuk Nonsubsidi Naik Tidak Wajar sampai 100 Persen. *Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1548257/petani-harga-pupuk-nonsubsidi-naik-tidak-wajar-sampai-100-persen>
- Shimogaki, Kazio. (1993). *Kiri Islam antara Modernisme dan Posmodernisme. Telaah Kritis Pemeikiran Hasan Hanafi* (8th ed.). LKIS.
- Shimogaki, Kazuo. (1993). *Kirim Islam Antara Modernisme dan Posmodernisme*. LKIS.
- Sinha, S. (2021). From cotton to paddy: Political crops in the India Punjab. *Geoforum*. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.017>
- Siswanto, B., Pertumbuhan, K., Negara, P., Artikel, I., Artikel, R., Sistem, K. K., Pertumbuhan, P., Liberal, G., Komunis, K., & Komunis, E. (2015). KOMPARASI PERTUMBUHAN PDB NEGARA LIBERAL KAPITALIS, KOMUNIS, DAN EKS-KOMUNIS. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 76–83. <https://doi.org/10.17970/JREM.15.150106.ID>
- Statistik, B. P. (2020). Kecamatan Delanggu Dalam Angka 2020. In *BPS Kabupaten Klaten*.
- Statistik, B. P. (2021). *Kecamatan Delanggu Dalam Angka 2021*.
- Sugiyanta, & Aziz, S. . (2016). Beras dan Tanaman Pangan Organik Lainnya. In A. D. Astuti, Sudarsono, A. Sulaeman, & M. Syukur (Eds.), *Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia* (Pertama, pp. 203–218). Penerbit IPB Press.
- Suharko, S. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–34.
- Suherman, A. (2021). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2014 dan 2020*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukirno, H. (2018). Gerakan Protes Petani Klaten. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 5(1), 95–105.
- Sumardjono, M. S. . (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas.

- Sundoro, G. (2020). *Asal-Usul Delanggu (Versi R.Djojmartono)*. <http://lembaranterlipat.blogspot.com/2020/02/sejarah-delanggu-versi-Djojmartono/htmlsejarah>
- Suprana, J. (2022, February 9). Konflik Agraria Desa Wadas. *Kompas.Com*, 1. Kompas.com - 09/02/2022, 10:59 WIB%0A%0AArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul %22Konflik Agraria Dehttps://www.kompas.com/tren/read/2022/02/09/105915265/konflik-agraria-desa-wadas
- Suseno, F. M. (2003). *Pemikiran Kaarl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, P. (2021, October). Kisah Beras Delanggu yang Kini Tinggal Nama. *Koran Solo Pos*. <https://m.solopos.com/kisah-beras-delanggu-yang-kini-tinggal-nama-1175251>
- Suseno, P. (2022, March 10). Jadi yang Pertama, Desa Delanggu Perintis Kampung Tangguh Narkoba. *Solopos.Com*, 1. <https://www.solopos.com/jadi-yang-pertama-desa-delanggu-perintis-kampung-tangguh-narkoba-1270384>.
- Sutomo, Y. T. (2011). *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*. Universitas Negeri Semarang.
- Syahyuti. (2003). *PEMBANGUNAN PERTANIAN PANGAN INDONESIA DALAM PENGARUH SISTEM KAPITALISME DUNIA : Analisis Ekonomi Politik Perberasan*. 18.
- Syariati, A. (1982). *Man and Islam*. University of Mashhad Press.
- Syariati, A. (1995). *Tugas Cendekiawan Muslim*. Raja Grafindo Persada.
- Taufiq Rahman, M. (2011). *Glosari Teori Sosial* (1st ed.). Ibnu Sina Press.
- Tilzey, M. (2021). From neoliberalism to national developmentalism? Contested agrarian imaginaries of a postneoliberal future for food and farming. *J Agrar Change*, 21, 180–201. <https://doi.org/10.1111/joac.12379>
- Tjondronegoro, S. M. . & G. W. (Ed). (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Pnguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Triatmo, A. W. (2014). *Kapita Seleкта Pemikiran Dakwah*. EFUDE Press.
- Triatmo, A. W. (2022). *Ilmu Dakwah dari objek Kajian hingga Profesi*. Efude Press.
- Udiyani, P. M. M. S. (2003). *KAJIAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DAERAH PERT ANIAN BERDASARKAN DATA RADIOAKTIVIT AS ALAM*. <https://digilib.batan.go.id/e-prosiding/FileProsiding/Lingkungan/Bapeten/artikel/Pande-Made-Udiyani-172.pdf>



- Utami, S. N. (2021, June 16). Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Pupuk Kimia Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: <https://bit.ly/3g85pkA> iOS: <https://apple.co/3hXWJ0L>. *Kompas.Com*.
- Utami, S. N. (2022). Manfaat IPTEK di Bidang Pertanian. *Kompas.Com*.
- Warto, W. (2015). Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya Poor Peasant Condition and Its Prevention Effort. *Jurnal PKS Vol 14 No 1 Maret 2015; 20 - 29, 14(1), 20–29*.
- Wasikoen, H., & Saksono, G. (2014). *Sosialisme Sukarno Sumber Ekonomi Kerakyatan*. Kaliwangi.
- Widodo, W., Rina Kamardiani, D., & Rahayu, L. (2016). Minat Konsumen Terhadap Beras Organik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, November, 134–142*. <https://doi.org/10.18196/agr.2234>
- Widyatama, E. (ed). (2019, October). Survei: 1 Persen Orang Kaya RI Kuasai 50 Persen Aset Nasional. *Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1556434/aset-bank-syariah-indonesia-tembus-rp-265-triliun-per-desember-2021>
- Yang, Y., Pham, M.H., Yang, B., Sun, J.W., Tran, P. N. . (2022). Improving vegetable supply chain collaboration: a case study in Vietnam . *Supply Chain Management, 27(1), 54–65*. <https://doi.org/10.1108/SCM-05-2020-0194>
- Yazid, Y. (2021). *Trickle Down Effect dan Ekonomi Kerakyatan*. <https://pajak.go.id/artikel-Trickle-Down-Effect-dan-Ekonomi-Kerakyatan>

